



Diplomasi Parlemen **di Tengah** **Gejolak Dunia**

Peran BKSAP DPR RI
di Kancah Parlemen Dunia

Tide Aji Pratama, dkk



Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
2024



DIPLOMASI PARLEMEN DI TENGAH GEJOLAK DUNIA

**Peran BKSAP DPR RI
di Kancah Parlemen Dunia**

Tide Aji Pratama, dkk



Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
2024

Pengarah

Dr. H. Fadli Zon, SS., M.Sc (Ketua)
Ghilang Dhielafararez, SH, LLM
Putu Supadma Rudana, M.B.A.
Dr. H. Sukamta, Ph.D
Ir. H. A. Hafisz Thohir.

Koordinator

Endah T.D. Retnoastuti, S.S., M.Phil

Penyunting

Salim Shahab & Den Setiawan

Penulis

Tide Aji Pratama, M.Si.
Mochamad Ilyas, M.A.
Masyithoh Annisa Ramadhani, M.A.
Isep Parid Yahya, M.Sc.
Keanu Arief Triputra Ramadhana Trisulo, BA (Hons.), LLM
Anindita Kusuma Listya, MPP.
Made Fitri Maya Padmi, M.Sc.
Heriyono Adi Anggoro, M.Hum.

Riset dan Data

Warsiti Alfiah, S.IP., DESS (Ketua)
Rd. Anne Widyana, S.S., M.Si
Andam Perwitasari, SIP, MIP
Refaini Hasna Ghassani, SH

Desain Cover & Isi

Hendra Adrian

Penata Letak

Rindias Mega Rahmawati, A.md

Sekretariat

Siti Nur Aidah, SAP, MAP
Ahmadi
Sigjit Fitriyanto

ISBN

ISBN

Hak Cipta 2024, pada Penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi tanpa izin sah dari penerbit

Diterbitkan oleh:

Sekretariat Jenderal DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, 10270

Dikeluarkan oleh:

Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Parlemen Regional
Biro Kerja Sama Antar Parlemen dan Organisasi Internasional

Cetakan Pertama, September 2024



DIPLOMASI PARLEMEN DI TENGAH GEJOLAK DUNIA

**Peran BKSAP DPR RI
di Kancah Parlemen Dunia**

Tide Aji Pratama, dkk



Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
2024

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa;

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Sejak awal 2020, situasi global berada dalam kondisi *vivere pericolosamente* (hidup penuh bahaya). Dunia mengalami tantangan yang silih berganti ataupun berbarengan, mulai dari pandemi Covid-19, krisis kemanusiaan global, memanas dan terbakarnya kembali konflik seperti Rusia-Ukraina serta Israel-Gaza dan Konflik Laut Merah, sampai pada meningkatnya ancaman terhadap keberlangsungan bumi kita ini. Ada pada satu masa, krisis tersebut multidimensi, mengacaukan tatanan kehidupan baik di level nasional maupun internasional. Kita terguncang.

Selain itu, kita menyaksikan bagaimana skema multilateralisme, sebagai pengusahaan bersama kehidupan bertetangga antarnegara-bangsa dalam mengelola isu-isu global, makin menimbulkan pesimisme. Kita juga melihat bagaimana perwajahan dan kepentingan politik global bergeser seiring realitas ekonomi ataupun kebutuhan taktis strategis.

Di saat itulah, kita melihat peran dan konsistensi Indonesia untuk tetap berpegang pada prinsip bebas aktif dalam mengarungi berbagai perwajahan dan dalam memperkuat ujian kehidupan gotong royong antarnegara. Pemerintah Republik Indonesia menjalankan kebijakan politik luar negeri (Polugri) bebas aktif-nya dengan semangat pemulihan,

pemersatu, pelindung, dan pemegang prinsip kemanusiaan. Ini terekam jelas dalam berbagai upaya diplomasi, mulai dari kerja sama vaksin, keketuaan di ASEAN, penegas *rule-of-law and rule-of-the game* dalam sengketa dagang, hingga konsistensi Indonesia dalam bersikap terhadap isu-isu konflik dan kemanusiaan, seperti masalah pengungsi Rohingya dan serangan tanpa pandang bulu Israel di Gaza.

DPR RI, sebagai salah satu pihak penyelenggara hubungan luar negeri nonpemerintah (baca: Penjelasan Pasal 5 UU Hubungan Luar Negeri 37/1999), melapis kekuatan diplomasi Indonesia dengan langkah-langkah yang berorientasi pada upaya melindungi kepentingan nasional dan global dengan menghindari munculnya kepentingan-kepentingan sepihak yang merugikan, memproteksi planet tempat kita hidup, serta berjuang bagi mereka yang tertindas dan terjajah. Langkah-langkah ini tidak hanya mewujud kala dunia sedang baik-baik saja. Diplomasi parlemen via dunia virtual pun tetap berjalan manakala pandemi COVID-19 masih menjadi ancaman serius bagi dunia.

Dalam menavigasi berbagai kerumitan dunia itu, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) meyakini, partisipasi dan kontribusi aktif DPR dalam ranah internasional menjadi kunci agar Indonesia dapat menjadi pemengaruh di komunitas global. Oleh karena itu, dalam Rencana Strategis BKSAP 2019–2024, kami mematok target ambisius untuk peningkatan *leadership* dan juga pemengaruh agenda internasional.

Alhamdulillah, berkat peran aktif BKSAP, sejumlah anggota DPR RI dipercaya menduduki jabatan-jabatan bergengsi di organisasi antarparlemen, seperti di Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC), Asian Parliamentary Assembly (APA), dan Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC). Selain itu, BKSAP juga berperan aktif sebagai pemengaruh dan penentu agenda, terutama saat berperan sebagai tuan rumah pertemuan forum antarparlemen. Sedikitnya ada tujuh agenda tuan rumah pertemuan organisasi antarparlemen yang dihelat DPR RI pada periode ini.

“ BKSAP juga berperan aktif sebagai pemengaruh dan penentu agenda, terutama saat berperan sebagai tuan rumah pertemuan forum antarparlemen.

Tidak hanya dalam upaya mendukung pelaksanaan Polugri Indonesia, BKSAP juga bertindak selaku gerbang kerja sama multilateral dan bilateral antarparlemen yang fokus pada upaya-upaya penguatan lembaga legislatif. BKSAP adalah medium penguatan kapasitas DPR agar dapat secara kuat menjalankan mandat konstitusionalnya melalui sejumlah pelatihan, lokakarya, dan upaya penguatan pengetahuan lainnya yang tersedia.

Buku ini menyajikan kronik aktivitas diplomasi parlemen yang dilakukan oleh BKSAP periode 2019–2024. Catatan ini merupakan potret keberlanjutan peningkatan peran DPR untuk berada dan berpengaruh di tengah-tengah komunitas global, sekaligus sebagai jembatan untuk memperkuat dialog, wawasan, dan kapasitas DPR akan beragam agenda internasional yang notabene saat ini tidak dapat dipisahkan dari isu-isu keseharian di level domestik.

Ke depan, BKSAP secara ideal dapat lebih aktif berkontribusi sebagai jembatan penguatan kapasitas DPR seraya menyeimbangkan kepentingan nasional dalam dukungan-dukungan internasional tersebut. BKSAP juga kiranya dapat makin berperan dalam penguatan pengaruh dan penyedia data informasi yang akurat atas isu-isu internasional dan kebijakan domestik dari parlemen negara lain.

BKSAP berpandangan cukup ideal apabila di masa mendatang DPR memiliki kantor-kantor penghubung (*liaison offices*) di sejumlah negara dengan tradisi keparlemenan serta peran parlemen yang kuat. Praktik serupa juga ditunjukkan sejumlah negara, seperti Korea Selatan yang memiliki atase

“ Ke depan, BKSAP secara ideal dapat lebih aktif berkontribusi sebagai jembatan penguatan kapasitas DPR.

legislatif di Indonesia, Perpustakaan Kongres Amerika Serikat yang memiliki kantor di Jakarta, ataupun Parlemen Eropa yang membuka kantor penghubung untuk ASEAN, AIPA, dan DPR di Jakarta.

Tidak hanya itu, sebagai upaya memperkuat peran internasional DPR, BKSAP juga berpandangan perlunya memperkuat sistem pendukung DPR (sekretariat dan tenaga ahli) dengan pengayaan pengalaman internasional lewat program-program seperti tukar pengalaman (*exchange of experience*) metode kerja parlemen di negara lain ataupun penugasan khusus di organisasi-organisasi antarpaulen melalui kontribusi sukarela untuk pendanaan program terfokus ke organisasi dimaksud. Langkah-langkah ini merupakan upaya afirmasi lembaga legislatif untuk dapat makin kuat, baik dalam kapasitas internasional maupun nasional. Kedua hal tersebut, bersama dengan sumbangsih ide-ide dalam catatan kerja BKSAP periode-periode sebelumnya, semoga dapat menjadi bahan dialektika mendalam untuk memperkuat DPR beserta sistem pendukungnya.

Sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih atas dukungan pimpinan DPR RI dalam kerja-kerja BKSAP dan misi diplomasi parlemen. Penghargaan mendalam kepada para anggota DPR RI yang pernah menjadi pimpinan BKSAP periode 2019–2024, seperti Charles Honoris, Sihar Sitorus, dan Mardani Ali Sera, atas dedikasi dan pengabdianya serta apresiasi setinggi-tingginya kepada para anggota BKSAP lintas

fraksi dan lintas komisi yang telah menyumbangkan sebagian waktunya untuk turut berjuang dalam diplomasi parlemen.

Tidak lupa, kami berterima kasih kepada Sekretariat Jenderal dan Biro Kerja Sama Antar-Parlemen dan Organisasi Internasional DPR RI, serta Tenaga Ahli BKSAP atas dukungan teknis, administratif, dan substantif yang luar biasa selama lima tahun ini. Kepada Kementerian Luar Negeri dan kementerian-kementerian teknis lainnya, organisasi masyarakat sipil dan pemikir, dan juga media, terima kasih atas kolaborasi dan sinergi yang telah terjalin selama ini. Kami berharap, segala kerja sama yang ada akan berkesinambungan dalam area diplomasi parlemen. Semua demi upaya negara untuk ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. (Ketua BKSAP DPR RI)



SAMBUTAN **Ketua DPR RI**

Sepanjang tahun 2019 hingga 2024 kita menyaksikan bagaimana dunia dihadapkan pada situasi yang penuh risiko dan ketidakpastian; pandemi COVID-19 yang bersifat global, konflik dan tensi geopolitik yang memanas, ketimpangan sosial yang makin dalam antara negara maju dan negara berkembang, ancaman perubahan iklim yang dampaknya makin kita rasakan, tren pelambatan pertumbuhan ekonomi global, serta meningkatnya kejahatan transnasional lintas negara. Tidaklah berlebihan jika kemudian banyak yang menganggap bahwa tahun-tahun tersebut merupakan tahun-tahun terberat yang harus dihadapi oleh semua negara.

Situasi dengan tantangan yang kompleks seperti ini mengharuskan peningkatan kerja sama antarnegara, karena sejatinya tidak ada satu negara pun yang mampu mengatasi tantangan-tantangan tersebut sendirian. Dalam konteks ini, diplomasi menempati posisi utama sebagai sebuah instrumen penting yang dapat digunakan oleh negara untuk menjembatani dialog dan negosiasi, membangun kerja sama, serta melaksanakan aksi-aksi kolektif.

Selama kurun waktu 2019–2024, DPR RI tetap aktif dalam menguatkan diplomasi negara, baik dalam lingkup bilateral, regional, maupun internasional, dengan Badan Kerja Sama

Antar-Parlemen (BKSAP) sebagai *focal point*. Paruh pertama dalam kurun waktu tersebut, diplomasi parlemen dijalankan dengan mengutamakan protokol kesehatan dan optimalisasi teknologi digital sehingga, sekalipun terpisah jarak dan waktu dengan mitra wicara, secara substansi kepentingan nasional Indonesia tetap dapat disampaikan.

Setelah pandemi mereda, DPR RI mengambil panggung utama dalam diplomasi parlemen di lingkup regional dan global, dengan menjadi tuan rumah dari beberapa sidang organisasi parlemen yang sangat penting, dalam rangka meningkatkan citra Indonesia sebagai negara kekuatan menengah yang berhasil mengatasi pandemi dan tengah bangkit. Pada 2022, DPR RI berhasil menjadi tuan rumah pelaksanaan sidang parlemen dunia ke-144 (The 144th IPU General Assembly) di Nusa Dua, Bali, disusul menjadi tuan rumah pertemuan parlemen negara-negara G20 (P20 Speakers Summit) ke-8 di Jakarta. Pada 2023, kita juga sukses melaksanakan sidang tahunan organisasi parlemen negara-negara ASEAN (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly/AIPA) yang ke-44 di Jakarta dan pertemuan rutin ketua parlemen negara-negara MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, Australia) yang juga dilaksanakan di Jakarta.

Kesuksesan DPR RI sebagai tuan rumah dari perhelatan-perhelatan penting tersebut berhasil memperkuat posisi DPR RI di panggung diplomasi parlemen dan menciptakan kesan yang sangat baik tentang Indonesia. Tidak hanya itu, pada

ranah praksis, DPR RI berhasil membawa agenda-agenda nasional untuk dibicarakan di forum-forum regional dan global, seperti mengenai agenda penguatan kerja sama politik-keamanan, sosial-ekonomi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, ekonomi hijau, serta berbagai isu lain yang sejalan dengan kepentingan Indonesia. Langkah positif tersebut sangat bermanfaat sebagai penguat diplomasi yang dilaksanakan oleh DPR RI, khususnya BKSAP, baik secara bilateral, regional, maupun internasional. Demikian pula halnya di dalam negeri, BKSAP bergerak membangun komunikasi lintas pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka memperkaya wawasan yang akan menjadi bekal substansi diplomasi parlemen DPR RI. BKSAP juga menyosialisasikan capaian-capaian diplomasi parlemen DPR RI kepada masyarakat pada umumnya dan para akademisi kampus pada khususnya.

Ke depan, tantangan global yang bersifat multidimensi masih akan terus berlanjut. Ketidakpastian ekonomi global, konflik berkepanjangan, serta perubahan iklim akan terus menjadi topik utama di forum-forum parlemen global. DPR RI tentunya berkomitmen penuh untuk mengambil langkah-langkah inisiatif dan inovatif sebagai upaya memperkuat komitmen parlemen global dalam menyelesaikan berbagai tantangan. DPR RI akan terus memperjuangkan berbagai topik yang menjadi kepentingan nasional dan menjembatani kebutuhan daerah dengan berbagai agenda regional dan global dengan berpegang teguh pada politik luar negeri yang bebas, independen, dan aktif. DPR RI tentunya berupaya terus

melaksanakan diplomasi yang sejalan dengan politik luar negeri RI dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap Piagam PBB, hukum internasional, serta kedaulatan bangsa.

Rangkaian aktivitas diplomasi DPR RI, khususnya BKSAP, yang terangkum dalam *Buku Kaleidoskop* ini tentu penting tidak hanya sebagai catatan perjalanan diplomasi parlemen selama lima tahun terakhir, tetapi juga sebagai pijakan bagi langkah DPR RI ke depan. Saya yakin, DPR RI akan makin maju dan berkontribusi positif bagi pelaksanaan politik luar negeri RI demi kepentingan nasional.

Ketua DPR RI (2019–2024)

Dr. (H.C.) Puan Maharani

GLOSARIUM

5PC Five-Point Consensus, untuk penyelesaian konflik di Myanmar

A

ADB Asian Development Bank
AIPA ASEAN Inter-Parliamentary Assembly
AOIP ASEAN Outlook on Indo-Pacific
APA Asian Parliamentary Assembly
APPF Asia-Pacific Parliamentary Forum
APPPGH Asia Pacific Parliamentarian Forum on Global Health
ASEAN-RAI ASEAN Responsible Agriculture Investment

B

BDF Bali Democracy Forum
BDS Boikot, Divestasi, dan Sanksi
BPPMI Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

C

Cardoso Report Laporan Ketua Panel of Eminent Persons on United Nations–Civil Society Relations, Fernando Henrique Cardoso (Mantan Presiden Brasil), pada 2004
CBDR Common but differentiated responsibilities
CLCS Commission on the Limits of the Continental Shelf
COC Code of Conduct
COP Conference of Parties
CoSP-UNCAC Conference of States Parties to the United Nations Convention Against Corruption

Covid-19	Coronavirus Disease 2019
CPO	Crude palm oil
CRPH	Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw

D

DOC	Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea
Doha Round	Putaran terakhir (2001) negosiasi perdagangan di antara negara-negara anggota WTO

E

EAS	East Asia Summit
EAWF	Eurasian Women's Forum
EBET	Energi Baru dan Energi Terbarukan
ECNL	European Center for Not-for-Profit Law Stichting
Enhanced NDC	Enhanced National Determined Contribution

F

FAO	Food and Agriculture Organization
FSA	Agreement on Fisheries Subsidies/Fisheries Subsidies Agreement

G

G20	Group of Twenty, kelompok yang terdiri dari 20 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan satu organisasi antarpemerintah dan supranasional yaitu Uni Eropa
GAPKI	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
GKSB	Grup Kerja Sama Bilateral
GOPAC	Global Organization of Parliamentarians Against Corruption
Green Jobs	Mencakup pekerjaan di bidang pertanian, industri, jasa, dan administrasi yang berkontribusi terhadap pelestarian atau pemulihan kualitas lingkungan juga memenuhi kriteria pekerjaan yang layak-upah yang memadai, kondisi yang aman, hak-hak pekerja, dialog sosial, serta perlindungan sosial.

H

HAM IPU	IPU Bureau of the Standing Committee for Democracy and Human Rights
HKTI	Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
HPP	Harmonisasi Peraturan Perpajakan

I

IAF	Indonesia-Africa Forum
IAPF	Indonesia-Africa Parliamentary Forum
ICJ	International Court of Justice – Mahkamah Internasional
ICNL	International Center for Not-for-Profit Law
I-EU CEPA	Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement
INTA	International Trade
IORA	Indian Ocean Rim Association
IPCC	Intergovernmental Panel on Climate Change
IPPP	Indonesia–Pacific Parliamentary Partnership
IPU	Inter-Parliamentary Union
IRG	Implementation Review Group
ITU	International Telecommunication Union

K

KPPI	Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia
------	----------------------------------

M

MIKTA	Mexico, Indonesia, Republic of Korea, Turkey and Australia
MSG	Melanesian Spearhead Group

N

NDI	National Democratic Institute
Negara Pihak	Negara yang menyatakan terikat pada ketentuan yang diatur dalam perjanjian internasional
NFT	Non-Fungible Token

Nine-Dashed-Line Sembilan garis putus-putus imajiner yang menunjukkan klaim Tiongkok atas hampir seluruh Laut Tiongkok Selatan

O

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

Open Parliament Inisiatif global untuk mendorong transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inovasi parlemen melalui kolaborasi berkelanjutan bersama masyarakat sipil

OPI Open Parliament Indonesia

P

P20 G20 Parliamentary Speakers' Summit

PCWTO Parliamentary Conference on WTO

PMI Pekerja Migran Indonesia

PPP Public Private Partnership

PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar

PUIC Parliamentary Union of the OIC Member States

S

SARS-CoV-2 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2

SEAPAC South-East Asia Parliamentarians Against Corruption

SILEG Sistem Informasi Legislatif

SIPRI Stockholm International Peace Research Institute

T

TPB/SDGs Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals

TPPO Tindak Pidana Perdagangan Orang

U

UHC Universal Health Coverage

UMKM Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UN OCHA	United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs
UNCATOC	United Nations Convention Against Transnational Organized Crime
UNCLOS	United Nations Convention on the Law of the Sea
UNCTAD	United Nations Conference on Trade and Development
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNFCCC	United Nations Framework Convention on Climate Change
UNGASS	UN General Assembly Special Session
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees
UNWTO	United Nations World Tourism Organization
UU MD3	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

V

VUCA	Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity
------	--

W

WAIPA	Women Parliamentarians of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly
WFD	Westminster Foundation for Democracy
WHO	World Health Organization
WMO	World Meteorological Organization
WPL	Women Political Leaders
WRI	World Resources Institute
WTO	World Trade Organization
WWF	World Water Forum

Z

ZEE	Zona Ekonomi Eksklusif
-----	------------------------



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	V
Sambutan oleh Ketua DPR RI	XI
Glosarium	XV
Daftar Isi	XX

BAGIAN I:

MEWUJUDKAN KETERTIBAN DAN PERDAMAIAN DUNIA

1. Mengawal Harapan Bangsa Palestina	3
2. Memperjuangkan Nasib Rohingya	17
3. Misi Menyelamatkan Korban TPPO	27
4. Aktif Mendamaikan Rusia–Ukraina	37

BAGIAN II:

INDONESIA DAN DINAMIKA KAWASAN

5. Dua Sisi Indo-Pasifik	47
6. Indonesia dan Laut Tiongkok Selatan	53
7. Panja Indo-Pasifik	61

BAGIAN III:

MERAWAT DEMOKRASI DAN

SEMANGAT ANTIKORUPSI

- | | |
|--|----|
| 8. Diplomasi, Demokrasi, dan Pandemi | 71 |
| 9. Gerakan Antikorupsi Global | 85 |

BAGIAN IV:

KERJA SAMA EKONOMI

- | | |
|---|-----|
| 10. Memperkuat Kerja Sama Ekonomi
pada Masa Pandemi..... | 99 |
| 11. Menanti Reformasi Sistem
Perdagangan WTO..... | 107 |
| 12. Membela UMKM dan Industri
Kelapa Sawit..... | 113 |

BAGIAN V:

MENJAGA BUMI

- | | |
|---|-----|
| 13. Memperkuat Diplomasi Perubahan Iklim..... | 125 |
| 14. Mewujudkan Ekonomi Hijau
dan Berkelanjutan | 135 |

BAGIAN VI:

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

15. Mengakselerasi Pembangunan	
Berkelanjutan	145
16. Pemberdayaan Perempuan dan	
Kesetaraan Gender	151
17. Pemuda, Politik, dan Kebijakan Publik.....	161
18. Transformasi Digital.....	169
19. Pelestarian Budaya.....	181
20. Keterbukaan Akses Kesehatan	187

BAGIAN VII:

**BERSAHABAT, BEKERJA SAMA, DAN
MENJANGKAU PUBLIK**

21. Peran Nyata GKSB.....	195
22. Edukasi, Transparansi, dan Partisipasi.....	203

BAGIAN VIII:

DPR RI DI KANCAH INTERNASIONAL

23. Memperkuat Diplomasi Parlemen	211
24. Membangun Sinergi, Menuai Partisipasi	217
25. Kontribusi Penting Indonesia di IPU.....	223
26. Kepemimpinan DPR RI di Forum Internasional dan Regional	229
27. Indonesia–Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)	243
28. Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF) ...	255

BAGIAN XI:

BKSAP 2.0

29. BKSAP 2.0: Diplomasi Parlemen Indonesia ke Depan.....	265
Referensi	278





BAGIAN

**MEWUJUDKAN
KETERTIBAN DAN
PERDAMAIAN DUNIA**

01

FOTO: AL JAZEERA

Mengawal Harapan Bangsa Palestina

Upaya mewujudkan kemerdekaan Palestina selama lebih tujuh dasawarsa tak kunjung membuahkan hasil. Alih-alih usai, krisis di Jalur Gaza justru meletus lagi pada 7 Oktober 2023 yang membakar intensitas baru yang tinggi. Situasi di Palestina pun makin runyam. Konflik Rusia versus Ukraina yang terjadi lebih dahulu dan masih terjadi hingga sekarang ikut memperpelik penyelesaian konflik Palestina-Israel. Kekuatan-kekuatan global pendukung Rusia-Ukraina ikut mewarnai konflik tersebut yang melibatkan proksi-proksinya. Dunia kian terbelah dan kompleks.

Menengok ke belakang, terdapat fakta bahwa misi-misi diplomasi perdamaian Palestina-Israel sudah ditempuh sejak lama, yang tampak dari catatan sejarah. Di antaranya, Perjanjian Camp David 1978, KTT Madrid 1991, Kesepakatan Oslo 1993–1995, KTT Camp David 2000, *Road Map 2002–2003*, KTT Annapolis 2007, dan *Deal of the Century* Januari 2020. Bahkan, banyak resolusi Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB yang telah diadopsi.

Namun, konflik tak juga mereda. Rangkaian kekerasan dengan korban tewas puluhan ribu jiwa sungguh merupakan pemandangan yang mengerikan. Berdasarkan catatan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA), sejak 7 Oktober 2023 hingga pertengahan Juli 2024 saja lebih dari 38.000 warga Palestina tewas akibat konflik berkepanjangan tersebut.¹

Khusus mengenai *Deal of the Century* yang digagas Presiden AS Donald Trump, DPR RI melalui BKSAP menolaknya karena tidak sesuai dengan pandangan Indonesia terhadap upaya kemerdekaan Palestina. BKSAP menilai, proposal *Deal of the Century* tentang rencana perdamaian Timur Tengah tidak bisa disebut sebagai proposal perdamaian, tetapi lebih merupakan sebuah tindakan perampokan sistematis. Pasalnya, alih-alih menawarkan solusi komprehensif, proposal tersebut lebih sebagai upaya Trump mengamankan kepentingan politik Israel di atas tanah Palestina. Oleh karena itu, diperlukan soliditas parlemen negara muslim untuk memprotes keras kebijakan tersebut.²

Sebenarnya akar masalah konflik Palestina-Israel sangat terang benderang: penjajahan Israel atas tanah bangsa Palestina. Merujuk kepada fakta sejarah, Palestina adalah tanah jorjahan Israel berkat kontribusi besar negara-negara adidaya, terutama Inggris dan Amerika Serikat. Alhasil, Israel adalah penjajah.

1 Reported Impact Since 7 October 2023, (2024), "UN OCHA", <https://www.ochaopt.org/>.

2 Fadli Zon, (2020, 8 Februari), "Fadli Zon: Soliditas Parlemen Negara Muslim, Faktor Penting Mewujudkan Kemerdekaan Palestina", https://www.instagram.com/p/B8TLsB2JNad/?img_index=1.

Maka, dalam konteks ini, sikap Indonesia tentu saja akan selalu menolak eksistensi Israel. Hal itu karena konstitusi Indonesia menegaskan, “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

“ BKSAP menilai, proposal Deal of the Century tentang rencana perdamaian Timur Tengah tidak bisa disebut sebagai proposal perdamaian, tetapi lebih merupakan sebuah tindakan perampokan sistematis.

Semua komponen di Indonesia, termasuk parlemen, memegang teguh prinsip mendukung penuh kemerdekaan seutuhnya bangsa Palestina dan menolak keras penjajahan yang dilakukan Israel. Prinsip tersebut termanifestasikan, antara lain, *pertama*, Indonesia termasuk negara pertama yang mengakui kemerdekaan Palestina setelah dideklarasikan di Aljazair pada 15 November 1988. *Kedua*, pada 29 November 2012, Negara Palestina secara sah diperhitungkan sebagai *non-member observer state* PBB melalui *co-sponsor*, salah satunya Indonesia. *Ketiga*, Indonesia merupakan salah satu negara *co-sponsor* dalam sebuah momen upacara bersejarah penaikan bendera Palestina

di Markas Besar PBB di New York pada 10 September 2015. *Keempat*, pada Maret 2016, Indonesia menunjuk Maha Abou Susheh sebagai Konsul Kehormatan Indonesia pertama yang berkedudukan di Ramallah, Tepi Barat.

Sejak peran diplomasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dikukuhkan oleh Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), geliat dukungan terhadap Palestina oleh DPR makin kokoh. Melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD), DPR telah dan terus bekerja untuk mengawal kemerdekaan bangsa Palestina.

Kendati derap diplomasi DPR RI kerap kali dikategorikan *Track Two Diplomacy*, faktanya diplomasi DPR RI menyediakan “ruang lebih besar” dibandingkan diplomasi pemerintah, termasuk terkait sokongan untuk Palestina. DPR RI terbukti dapat bersuara lebih keras menyuarakan kepentingan bangsa Palestina. DPR RI juga dapat secara lebih leluasa merangkul semua elemen pejuang Palestina, termasuk Hamas, faksi pejuang Palestina yang bukan representasi Palestina di forum-forum resmi.

Sekadar contoh, pada 30 November 2020, BKSAP bekerja sama dengan League of Parliamentarians for Al-Quds menghelat webinar internasional bertajuk “The Palestinian Cause and

Ways to Support It in Light of The Regional and International Development”. Pada webinar tersebut, BKSAP memberikan panggung kepada Ahmad Bahar, pejabat sementara Palestine Legislative Council atau parlemen versi Hamas.

Secara umum, dalam rentang beberapa tahun ke belakang, DPR RI bekerja sangat aktif dalam upaya mengawal harapan kemerdekaan bangsa Palestina. Forum-forum parlemen merupakan kanal utama DPR RI untuk menggemakan dukungan penuh terhadap Palestina.

Di forum Inter-Parliamentary Union (IPU), DPR RI kerap kali mengajukan draf resolusi bertopik Palestina sebagai *emergency item* meskipun belum berhasil diadopsi lantaran suara dukungan yang belum memadai, seperti pada Sidang Umum IPU ke-143 yang diselenggarakan di Madrid, 26–30 November 2021. Ketika itu DPR RI mengajukan draf resolusi bertajuk „Global Parliamentary Support for the Humanitarian Situation of the Palestinians“.³

Kendati di sesi *emergency item* belum membuahkan hasil sesuai harapan, sikap tegas DPR RI dalam mendukung Palestina selalu diutarakan saat sesi *general debate* IPU. Misalnya, saat *general debate* pada Sidang Umum IPU ke-146, 11–15 Maret 2023, di Manama, Bahrain. Ketika menyoroti situasi di Palestina, Fadli Zon, yang saat itu mewakili Delegasi DPR RI, mengungkapkan

3 Inter-Parliamentary Union, (2021), “Request submitted by the delegation of Indonesia (23 November 2021) ‘Global parliamentary support for the humanitarian situation of the Palestinians’”, <https://www.ipu.org/documents/2021-11/request-submitted-delegation-indonesia-23-november-2021-global-parliamentary-support-humanitarian-situation-palestinians>.



Ketidakadilan global menyebabkan penderitaan kolektif rakyat Palestina.

Foto: Al Jazeera

bahwa yang paling meresahkan adalah ketidakadilan global yang masih bercokol yang menyebabkan penderitaan kolektif rakyat Palestina selama hampir lebih dari tujuh dekade. Secara tegas Fadli mendesak dunia untuk mengakhiri kemunafikan dan standar ganda Barat yang sangat telanjang ketika menyikapi dampak dari pendudukan Israel yang mengerikan.

Pernyataan keras, lugas, dan tanpa tedeng aling-aling terkait kondisi di Palestina kembali bergema pada Sidang Umum IPU ke-147 di Luanda, Angola, 23–27 Oktober 2023. Menurut Delegasi DPR RI, saat ini masih tertanam mentalitas neokolonial yang bersemayam di pola pikir beberapa negara Barat ketika berhadapan dengan isu Palestina. Ketegasan Indonesia diikuti dengan pengajuan rancangan resolusi

darurat berjudul “Stopping the War and Violations of Human Rights in Gaza”. Namun, usulan resolusi itu gagal terwujud karena kurangnya dukungan dan hanya memperoleh 60,2% suara (masih kurang dari syarat dua pertiga suara).⁴

Penting dicatat, komitmen DPR RI mengawal harapan negara Palestina yang merdeka terus bergaung sekalipun di sebuah forum yang tidak secara langsung memiliki relevansi dengan topik Palestina. Pada Sidang Umum IPU ke-144 di Bali, 20–24 Maret 2022, misalnya, Ketua DPR RI dalam sambutan pembuka mengingatkan insan parlemen global agar tidak melupakan Palestina yang belum sepenuhnya mendapatkan kemerdekaannya. Padahal sidang umum tersebut waktu itu mengusung tema “Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change”. Hal senada juga dilakukan DPR RI saat mengajukan nota protes kepada Parlemen India yang secara sepihak tidak menyinggung isu Palestina dalam *joint statement* yang merupakan *outcome document* G20 Parliamentary Speaker’s (P20) Summit ke-9 yang digelar di India pada 13–14 Oktober 2023.

Komitmen dukungan DPR RI terhadap perjuangan bangsa Palestina juga bergaung nyaring di Asian Parliamentary Assembly (APA) dan Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC). Berbeda dengan IPU, mayoritas anggota APA dan PUIC secara umum merupakan pendukung perjuangan bangsa Palestina.

⁴ DPR RI, (2023, 25 Oktober), “Usulan Resolusi DPR RI tentang Gaza Didukung Separuh Suara Parlemen Dunia”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47194/t/Usulan%20Resolusi%20DPR%20RI%20tentang%20Gaza%20Didukung%20Separuh%20Suara%20Parlemen%20Dunia>.

Saat sidang Executive Committee PUIC di Abidjan, Pantai Gading, 17–18 Juli 2023, Delegasi DPR RI mendesak PUIC agar segera mengambil langkah cepat dan tepat untuk melindungi rakyat Palestina dari kejahatan berulang-ulang dan tanpa sanksi apa pun yang dilakukan militer Israel. Delegasi DPR RI kemudian mengajak parlemen Muslim global untuk mendorong pemerintahnya masing-masing agar mendukung penuh Palestina dalam upaya mencapai keanggotaan penuh di PBB.

Secara komprehensif, pandangan DPR RI terhadap situasi Palestina terkini terangkum saat berpartisipasi dalam Sidang Darurat ke-5 PUIC dan pertemuan perdana Komisi Khusus Palestina APA di Teheran, 9–10 Januari 2024. Dalam pertemuan yang dihelat secara maraton tersebut, Delegasi DPR RI mengingatkan urgensi langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan rakyat Palestina. Diingatkan pula, status kedaruratan perlu diimplementasikan melalui gencatan senjata dan akses bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan ke Jalur Gaza.⁵

Adapun langkah-langkah konkret yang diusulkan Delegasi DPR RI kepada PUIC yaitu memberikan dukungan penuh atas permohonan Afrika Selatan di Mahkamah Internasional, mendorong Palestina menjadi anggota penuh PBB, menolak normalisasi dengan Israel, mendukung gerakan isolasi Israel dari interaksi antar negara melalui kampanye BDS (Boikot,

5 Media DPR RI, (2024), "Usulan Konkret BKSAP DPR RI ke Parlemen OKI dan Parlemen Asia Selamatkan Palestina", <https://emedia.dpr.go.id/2024/01/13/usulan-konkret-bksap-dpr-ri-ke-parlemen-oki-dan-parlemen-asia-selamatkan-palestina/>.

Divestasi, dan Sanksi), mengirimkan surat resmi ke Inter-Parliamentary Union (IPU) yang mendesak penangguhan keanggotaan Israel, menyampaikan kecaman keras atas standar ganda dan hipokritas beberapa negara Barat, mendesak reformasi PBB, dan menetapkan Israel sebagai negara teroris dan rezim apartheid.⁶

“ Dalam pertemuan yang dihelat secara maraton tersebut, Delegasi DPR RI mengingatkan urgensi langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan rakyat Palestina.

Pada pertemuan perdana Komisi Palestina APA, Delegasi DPR RI memperingatkan bahwa situasi di Jalur Gaza tak ubahnya petaka dan berada di bawah bayang-bayang genosida hingga taraf menuju kepunahan. Delegasi DPR RI kemudian mengajukan empat proposal program kerja sebagai agenda yang dapat dilakukan dalam waktu dekat oleh Komisi Palestina APA. *Pertama*, pembentukan misi khusus untuk berkunjung ke negara-negara yang berbatasan dengan Palestina, seperti Mesir, Suriah, dan Yordania, untuk memastikan bantuan kemanusiaan ke Gaza tanpa hambatan. *Kedua*, seruan anggota APA agar kompak mendukung Palestina. *Ketiga*, urgensi pembentukan lembaga dana untuk rekonstruksi Gaza.

6 *Ibid.*

Keempat, urgensi pelatihan dan lokakarya rutin yang berfokus pada topik-topik spesifik, khususnya terkait pembangunan dan peningkatan kapasitas masyarakat Palestina.

DPR RI juga menyampaikan pernyataan tegas dalam kerangka menyikapi dampak krisis di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023. Ada tujuh hal yang disampaikan, yakni sebagai berikut.

1. Dukungan penuh terhadap permohonan Afrika Selatan ke International Court of Justice (ICJ – Mahkamah Internasional) terkait dakwaan aksi genosida yang dilakukan Israel. Krisis yang terjadi di Gaza dan Palestina akhir-akhir ini murni akibat dampak buruk pendudukan/penjajahan Israel, termasuk tindakan provokatif yang tak henti-hentinya terhadap Al-Haram Al-Aqsa.



Delegasi Indonesia berfoto bersama dengan seluruh delegasi pada pertemuan perdana Komisi Khusus Palestina APA di Teheran, 9–10 Januari 2024. Foto: Dok. DPR RI.

2. Urgensi peningkatan pengakuan kenegaraan Palestina untuk memenuhi keanggotaan penuhnya di PBB.
3. Kebutuhan mendesak untuk mengisolasi Israel dari interaksi antarnegara, antara lain melalui promosi gerakan BDS (Boikot, Divestasi, dan Sanksi).
4. Kecaman keras terhadap standar ganda dan pandangan munafik dari banyak negara Barat ketika menyikapi konflik Palestina dan Israel.
5. Kebutuhan mendesak akan reformasi sistem internasional, khususnya PBB dan Dewan Keamanannya, untuk memperkuat peran penegakan hukum internasional dalam menyelesaikan seluruh konflik, termasuk di Palestina.
6. Pengadopsian Israel sebagai negara penjajah dan teroris serta rezim apartheid. Oleh karena itu, setiap perlawanan Palestina terhadap Israel bukanlah tindakan teroris, termasuk yang dilakukan oleh Hamas dan perlawanan Palestina lainnya.

Keteguhan DPR RI dalam mengawal harapan kemerdekaan penuh Palestina tidak sekadar tercermin di forum-forum multilateral parlemen. DPR RI juga mengawal harapan tersebut melalui kanal forum-forum bilateral dengan berbagai negara, termasuk Parlemen Palestina.

Dalam kerangka pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan berbagai parlemen, hubungan persahabatan DPR RI dengan Parlemen Palestina merupakan salah satu yang paling penting. Mengakui eksistensi Parlemen Palestina adalah upaya memelihara eksistensi negara Palestina yang

merdeka dan diakui masyarakat dunia. Dalam konteks ini, pada 23–27 Mei 2022, Delegasi GKSB Palestina DPR RI bertolak ke Amman, Yordania, untuk menggelar pertemuan bilateral secara langsung dengan Parlemen Palestina. Pada mulanya, Delegasi GKSB Palestina DPR RI direncanakan bertolak ke Jalur Gaza. Namun, rencana tersebut sulit diwujudkan lantaran hambatan-hambatan teknis, terutama faktor keamanan.

Selama lawatan ke Amman, Delegasi GKSB Palestina DPR RI melakukan berbagai agenda kegiatan. Di antaranya, pertemuan dengan Ketua Parlemen Palestina, Rawhi Ahmed Mohammed Fattou, pertemuan dengan Konsul Kehormatan Indonesia untuk Palestina, Maha Abu Shusheh (Konsul Kehormatan Indonesia di Ramallah), dan kunjungan ke Kamp Pengungsi Palestina Al-Wehdat di pinggiran Kota Amman.

Sejumlah catatan layak untuk ditindaklanjuti, khususnya dalam kerangka mengokohkan hubungan bilateral Indonesia-Palestina, termasuk mengawal harapan berdirinya Palestina sebagai negara yang merdeka. Catatan-catatan itu adalah tawaran Indonesia sebagai mediator rekonsiliasi nasional bangsa Palestina, penyederhanaan prosedur persyaratan beasiswa Indonesia bagi pelajar Palestina, penguatan distribusi bantuan kemanusiaan Indonesia untuk Palestina, termasuk pengungsi di Yordania, dengan penekanan agar lebih kredibel dan akuntabel, pemanfaatan tenaga-tenaga pendidik Palestina untuk pesantren-pesantren di Indonesia, penyelenggaraan

pertemuan di Indonesia dengan fokus pembahasan situasi di Yerusalem, dan informasi rencana kunjungan delegasi bisnis Palestina ke Indonesia.

Pamungkas, sokongan penuh DPR RI untuk Palestina tidak sebatas di forum-forum yang sudah tersedia. DPR RI juga melakukan inisiatif-inisiatif lain, seperti inisiasi pembuatan *joint statement* secara *online* pada Mei 2021 untuk menentang dan menolak keras aneksasi Israel atas wilayah Palestina. *Joint statement* itu ditandatangani oleh lebih dari 200 anggota parlemen dari seluruh dunia, antara lain Turki, Yordania, Amerika Serikat, Maladewa, Kuwait, Qatar, Aljazair, Maroko, Ghana, Brasil, Tunisia, Finlandia, Mauritania, Austria, Polandia, Belgia, Tajikistan, Inggris, Libya, Italia, dan Afrika Selatan.

Sebagai penutup, sangat menarik untuk merenungi ucapan Nelson Mandela saat berpidato bertepatan dengan *International Day of Solidarity with the Palestinian People* pada tahun 1997, “*We know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians.*” Ini senada dengan pernyataan tegas Presiden Pertama Indonesia Soekarno, “Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel.”



02

**Gelombang pengungsi
Rohingya sudah dimulai
sejak beberapa abad lalu.**

Foto: Al Jazeera

Memperjuangkan Nasib Rohingya

Kisah tragis pengungsi Rohingya tidak hanya lahir sejak kudeta militer Myanmar, 1 Februari 2021. Penderitaan mereka sudah dimulai sejak lama. Mereka adalah etnis minoritas Muslim yang tinggal di Rakhine yang terus mendapat tekanan dari kaum mayoritas beragama Buddha sejak berabad-abad lalu.

Pada awal 1400-an, Arakan (nama lama Rakhine) dikuasai Raja wilayah itu. Naramekhla pun mengungsi ke Bengal (kini Bangladesh). Kemudian Naramekhla. Namun, ia terusir dari Arakan setelah pasukan Kerajaan Burma menyerbu ia merebut kembali daerah kekuasaannya sekitar seperempat abad berikutnya berkat bantuan tentara Muslim dari Kesultanan Bengal. Meskipun berkuasa kembali di Arakan, wilayah itu menjadi bagian dari Kesultanan Bengal pada periode 1430 hingga 1785.¹ Sebagai bagian dari suatu kesultanan, Naramekhla dan sejumlah pejabatnya mendapat gelar Islam

¹ Imtiyaz Yusuf, (n.d.), "Islam di Myanmar: Bacaan Pengantar. Program Program Magister Agama dan Lintas Budaya – UGM", <https://crs.ugm.ac.id/islam-di-myanmar-bacaan-pengantar/>.

kendatipun seorang Buddhis. Ia, misalnya, mendapat gelar Suleiman Shah.

Setelah cukup lama menjadi bagian Kesultanan Bengal, pada 1784 Raja Bodawpaya dari Burma menginvasi dan menaklukkan Arakan. Arakan pun kembali dikuasai Burma. Orang-orang Muslim Rohingya diusir dan dieksekusi. Sebagian dari mereka, sekitar 35.000 orang, melarikan diri ke Bengal.² Satu abad kemudian, Inggris menguasai Burma, termasuk Arakan. Dalam penguasaan kolonial Inggris, orang-orang Rohingya kembali ke Arakan karena dianggap bisa bekerja dengan baik. Lalu Burma merdeka pada tahun 1948.

“ UNHCR menyebut kehidupan mereka selama puluhan tahun mengalami kekerasan, diskriminasi, dan persekusi di Burma yang berganti nama menjadi Myanmar pasca-kudeta militer 1988.

Dalam pemerintahan Burma, orang-orang Rohingya dianggap imigran ilegal yang datang selama pemerintahan kolonial Inggris (1824–1948) dan setelahnya. Menurut pemerintah Burma, mereka sengaja menyebut diri mereka sebagai orang

2 European Foundation for South Asian Studies (EFSAS), (2018, Mei), “The Rohingya Issue – Its wider ramifications for South Asia”, <https://www.efsas.org/publications/study-papers/the-rohingya-issue-%E2%80%93-its-wider-ramifications-for-south-asia/>.

Rohingya untuk menyembunyikan latar belakang Bengali dan untuk mencoba mendirikan wilayah Muslim otonom di Negara Bagian Rakhine bagian utara. Pemerintah Burma menyebut orang-orang Rohingya sebagai “Bengali” untuk menggarisbawahi bahwa mereka adalah imigran ilegal dari Bangladesh yang merupakan ancaman demografis bagi Rakhine yang beragama Buddha yang dianggap sebagai penduduk asli negara bagian tersebut. Hal ini memberi dalih bagi pemerintah Burma untuk secara sistematis mencabut hak pilih Rohingya dan mengusir mereka keluar dari negara tersebut.³

Pada tahun 1982 rezim Burma menerbitkan undang-undang kewarganegaraan. Melalui undang-undang itu, etnis Rohingya yang menempati wilayah Rakhine, wilayah paling miskin di Burma, tidak dimasukkan sebagai “ras nasional” negara tersebut alias bukan warga negara Burma. Akibatnya, menurut United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), sejak saat itu mereka menjadi populasi tanpa kewarganegaraan (*stateless*) terbesar di dunia. UNHCR menyebut kehidupan mereka selama puluhan tahun mengalami kekerasan, diskriminasi, dan persekusi di Burma yang berganti nama menjadi Myanmar—pasca-kudeta militer 1988. Mereka perlahan-lahan mulai meninggalkan Myanmar pada 1990-an.

Pada Agustus 2017, lebih dari 750.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh menyusul tindakan keras militer

3 *Ibid.*

di Rakhine. Mereka bergabung dengan gelombang pengungsi Rohingya sebelumnya yang meninggalkan negara itu pada tahun 1970-an dan 1990-an. Saat ini, hampir satu juta pengungsi Rohingya tinggal di Bangladesh, sebagian besar dari mereka berada di distrik Cox's Bazar, dekat perbatasan dengan Myanmar.

Secara detail, sebagian besar pengungsi Rohingya tinggal di 33 kamp di Cox's Bazar, yang merupakan permukiman pengungsi terbesar di dunia. Situasi pengungsi Rohingya juga merupakan salah satu situasi pengungsi berlarut-larut terbesar di dunia. Dalam kaitan ini, laporan Human Rights Working Group pada tahun 2020 menyebut permukiman pengungsi Rohingya sebagai "An Open Prison without End" — Penjara Terbuka Tanpa Akhir.⁴

Sementara itu, lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke negara tetangga, termasuk Indonesia. Hingga akhir 2023, Indonesia telah menampung ribuan pengungsi. Ke depan, gelombang pengungsi Rohingya diperkirakan akan terus berdatangan ke Indonesia disebabkan beragam faktor. Di antaranya, *pertama*, memburuknya kondisi keamanan di kamp pengungsi di Bangladesh. Kekerasan, penyiksaan, pemerkosaan, pernikahan paksa, pembunuhan oleh gangster, serta pemerasan dan kriminalisasi oleh polisi yang bertugas membuat para pengungsi khawatir akan

4 Human Rights Watch, (2020, Oktober), "An Open Prison without End" - Myanmar's Mass Detention of Rohingya in Rakhine State", https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/09/myanmar1020_web.pdf.

Posisi Rakhine dan Cox's Bazar di Perbatasan Myanmar dan Bangladesh



Sumber: https://www.researchgate.net/publication/353270001_The_Lancet_Regional_Health_-_Western_Pacific_12_2021_100175_Bengali_translation_of_the_abstract_in_Appendix_1

keselamatan mereka dan keluarganya. *Kedua*, tertutupnya jalur laut ke Thailand dan Malaysia. Pemerintah Thailand tidak segan melakukan *pushback*, mendorong kapal kembali ke laut, yang membahayakan nyawa ratusan manusia perahu Rohingya. *Ketiga*, konflik politik yang tak kunjung reda di Myanmar.

Darurat Damai

Problematika kemanusiaan di Myanmar terkait Rohingya merupakan salah satu fokus diplomasi parlemen yang dilakukan DPR RI. Dalam berbagai kesempatan, BKSAP

DPR RI menekankan urgensi peran Indonesia dalam upaya penyelesaian masalah kemanusiaan di Myanmar.

Pada forum sidang ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-38 yang diselenggarakan September 2017 di Manila, Filipina, Delegasi DPR RI mengajukan sebuah draf resolusi yang mengancam kekerasan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya. Namun, draf tersebut ditolak keras oleh delegasi Parlemen Myanmar.

Di tingkat forum parlemen yang lebih luas, yakni dalam sidang tahunan Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) ke-28 yang diselenggarakan di Canberra, Australia, pada 13–16 Januari 2020, Delegasi DPR RI mengusulkan resolusi terkait penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar yang disponsori bersama-sama dengan Malaysia. Salah satu fokus yang disorot Delegasi DPR RI adalah kedaruratan penciptaan perdamaian di Myanmar sebagai salah satu kunci mengakhiri krisis kemanusiaan etnis Rohingya. Meskipun melalui perdebatan panjang, resolusi itu berhasil diadopsi APPF dan menjadi resolusi penting di bidang politik dan keamanan.

Sementara itu, dalam forum AIPA, perundingannya masih berjalan sengit. Pada Sidang Umum AIPA ke-41 yang dihelat secara virtual pada 8–10 September 2020, dalam pertemuan di Komisi Politik, Delegasi DPR RI mengajukan dua paragraf terkait isu Rohingya. Paragraf tersebut merupakan adaptasi

komitmen politik yang telah secara tertulis disepakati oleh para pemimpin ASEAN. Di antaranya terkait dukungan bagi Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan, menjamin proses repatriasi yang aman dan bermartabat bagi para pengungsi Rohingya di Rakhine. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Myanmar.

Penolakan itu tidak menyurutkan upaya DPR RI yang tetap berkomitmen penuh untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di Myanmar, termasuk mengakhiri penderitaan etnis



Nestapa pengungsi Rohingya. Foto: Al Jazeera

Rohingya. Dalam pertemuan di Komisi Politik pada Sidang Umum AIPA ke-42, 24 Agustus 2021, DPR RI mengajukan draf resolusi terkait krisis Myanmar. Kendati mendapat dukungan dari mayoritas peserta sidang, resolusi usulan DPR RI itu terganjal keberatan dari Laos dan Vietnam. Keduanya meminta penundaan pembahasan krisis Myanmar karena ketidakhadiran delegasi Myanmar di persidangan. Akibatnya, usulan resolusi itu tidak bisa diadopsi.

Upaya membela kemanusiaan etnis Rohingya di forum AIPA akhirnya membuahkan hasil. Ketika menjadi tuan rumah Sidang Umum AIPA ke-44 di Jakarta, Komisi Politik AIPA akhirnya menyepakati draf resolusi menyangkut kerja sama parlemen untuk mencapai perdamaian jangka panjang di Myanmar. Melalui resolusi ini, DPR RI menegaskan kembali semangat kolektif dalam memulihkan perdamaian dan demokrasi di Myanmar melalui implementasi Konsensus Lima Poin tentang Myanmar. Penting dicatat bahwa sampai saat ini junta militer Myanmar dinilai menolak mengimplementasikan Lima Poin tersebut.

Kini, solusi untuk mengakhiri penderitaan pengungsi Rohingya makin menemukan relevansinya dalam konteks Indonesia. Sebagai bukti, sampai akhir 2023, tercatat Indonesia telah menampung ribuan pengungsi Rohingya. Meski pada awalnya kedatangan pengungsi Rohingya disambut dingin dengan dalih Indonesia bukan bagian dari Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia akhirnya tetap menerima para

pengungsi tersebut karena *humanity above everything*. Dalam konteks Indonesia, itu karena bangsa Indonesia memegang teguh prinsip “Kemanusiaan yang adil dan beradab” yang mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya, baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, maupun terhadap lingkungannya.



03

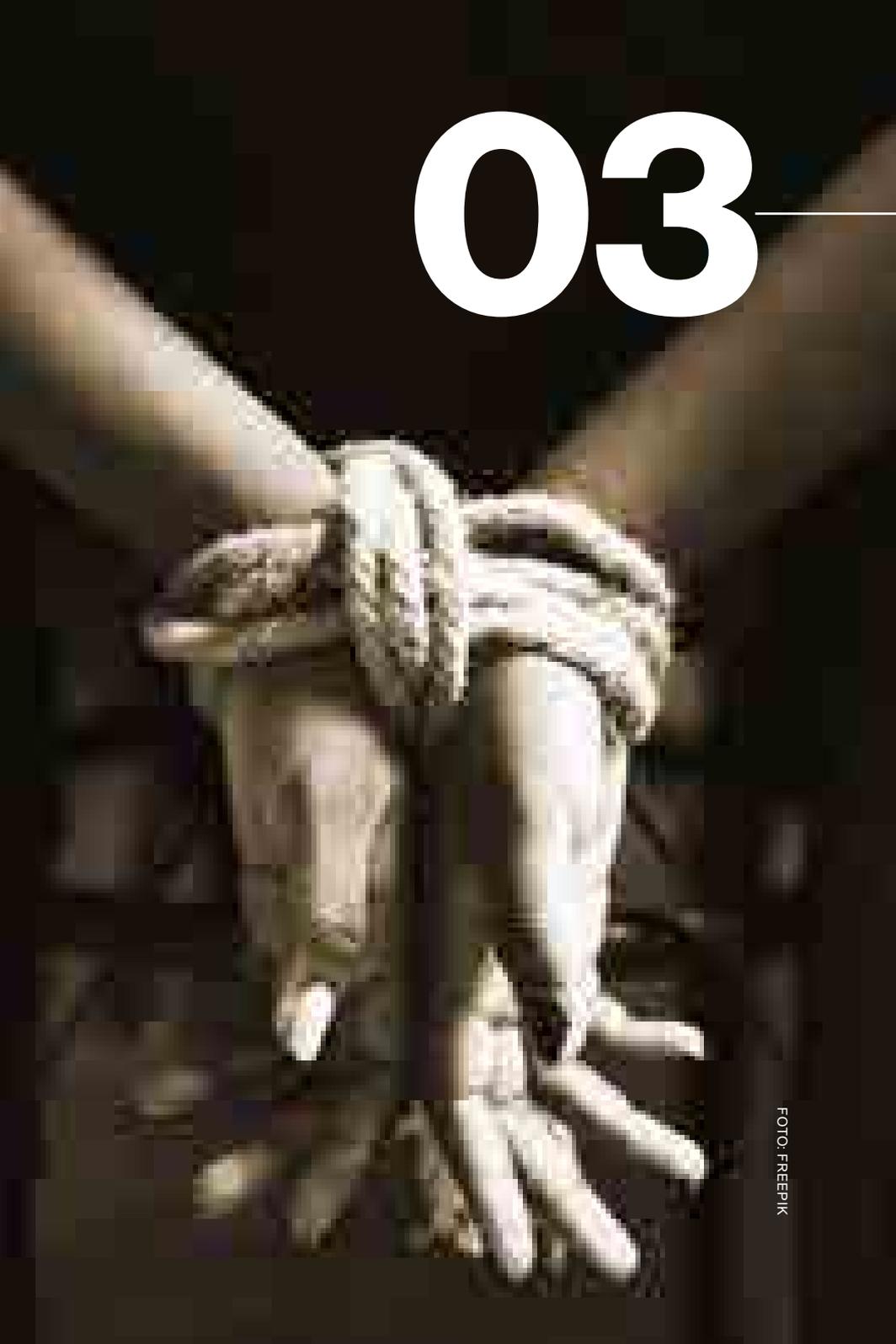


FOTO: FREEPIK

Misi Menyelamatkan Korban TPPO

Human trafficking atau perdagangan orang merupakan tindak kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Melalui pemanfaatan kemajuan teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi, perdagangan orang menjadi lebih terstruktur, sistematis, dan masif yang melampaui batas-batas negara. Walhasil, perdagangan orang sudah menjadi masalah dan ancaman bersama masyarakat global.

Dalam kerangka memerangi tindak kejahatan tersebut, kerja sama dunia telah mengadopsi sejumlah konvensi internasional. Di antaranya:

1. *International Convention for the Suppression of White Slave Traffic* (1921);
2. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women and Children* (1921);
3. *International Convention for the Suppression of Traffic in Women of Full Age* -(1933);
4. *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (1979);

5. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) (2020).

Dalam bingkai Indonesia, konvensi-konvensi terkait perdagangan orang tersebut menjadi bagian dari pertimbangan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Undang-undang tersebut mendefinisikan TPPO sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar-negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Merujuk kepada definisi UUTPPO tersebut, pekerja migran—terutama perempuan—merupakan kelompok yang sangat berisiko menjadi korban TPPO. Di Indonesia, badan yang mendapat tugas untuk menempatkan dan melindungi para pekerja Indonesia di luar negeri adalah Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Menurut BP2MI, dalam tiga tahun (2020–2023) pihaknya telah menangani kurang lebih 94.000 migran Indonesia yang dideportasi dari Timur Tengah-Asia. Sebanyak 90% dari yang dideportasi itu adalah mereka yang dahulu berangkat secara tidak resmi

(*unprocedural*) yang diyakini diberangkatkan oleh sindikat penempatan pekerja migran Indonesia. Dari jumlah migran yang dipulangkan itu, sebanyak 1.900 di antaranya pulang dalam keadaan meninggal. Jadi, rata-rata tiap hari ada dua jenazah migran yang dipulangkan ke Indonesia dari berbagai negara.¹

Jumlah pekerja migran Indonesia yang *unprocedural* sendiri sangat mengkhawatirkan. Pada tahun 2017 Bank Dunia melaporkan bahwa pekerja migran Indonesia mencapai 9,0 juta orang, padahal berdasarkan data BP2MI jumlahnya 4,7 juta orang. Berdasarkan selisih itu, BP2MI memperkirakan jumlah migran *unprocedural* sebanyak 4,3 juta orang.²

Pekerja migran Indonesia tidak hanya direkrut melalui prosedur resmi atau sindikat penempatan kerja tertentu. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang jaringan internasional untuk menjerat para migran Indonesia secara *online* dengan iming-iming pekerjaan dengan gaji besar. Kamboja, salah satu negara di ASEAN yang sedang berkembang industrinya, menjadi sasaran para migran Indonesia yang ingin mengadu nasib bekerja di bidang industri (terutama komputer) dengan gaji besar. Mereka menemukan lowongan pekerjaan dari sindikat penjerat itu antara lain melalui media sosial. Oknum orang Indonesia yang menjadi perantara TPPO menjerat para korban.

1 Kanavino Ahmad Rizqo, (2023, 30 Mei), "BP2MI Ungkap Data Ngeri WNI Korban TPPO, Ribuan Depresi hingga Cacat", Detik.com, <https://news.detik.com/berita/d-6746983/bp2mi-ungkap-data-neri-wni-korban-tpo-ribuan-depresi-hingga-cacat>.

2 *Ibid.*

Setelah berhasil menjerat sejumlah korban, oknum itu membawa sejumlah korban ke Kamboja tanpa memungut biaya dari korban. Ternyata di sana mereka “dijual” ke perusahaan yang berlokasi di Sihanoukville, salah satu kota industri baru di Kamboja. Setelah masuk ke gedung perusahaan itu di kota tersebut, mereka tidak bisa keluar lagi. Mereka dipekerjakan dengan jam kerja melebihi jam kerja normal. Ada yang bekerja mulai dari pukul 08.00 hingga 01.00 dini hari. Bahkan, bidang pekerjaannya pun melenceng dari yang dijanjikan. Bukan menjadi perancang sistem komputer perusahaan, seperti yang dijanjikan, melainkan menjadi operator skema penipuan daring dengan target WNI di Tanah Air.³

Mereka juga berisiko diperjualbelikan antarperusahaan di Kamboja jika tidak memenuhi target. Penindasan itu diketahui publik setelah di antara korban ada yang mengunggah kondisi yang mereka alami ke media sosial hingga akhirnya kepolisian Kamboja turun tangan menyelamatkan mereka. Pada pertengahan 2022, berita ratusan TPPO Indonesia di Kamboja menjadi pembahasan pemerintah Indonesia dan Kamboja.⁴

BKSAP Ikut Turun Tangan

Saat menjalankan diplomasi parlemen ke Kamboja, Laos, dan Vietnam pada akhir tahun 2022, Delegasi BKSAP DPR

3 Laraswati Ariadne Anwar, (2022, 3 Agustus), “Cerita Korban TPPO di Kamboja: Saya Dipaksa Jadi Operator Penipuan Daring Menarget WNI”, Kompas.id, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/08/02/cerita-korban-tpo-di-kamboja-saya-dipaksa-jadi-operator-penipuan-daring-menarget-wni>.

4 *Ibid.*



Di samping menjadi korban, ada juga WNI yang menjadi bagian dari pelaku TPPO. Foto: Vecteezy.com

RI melihat langsung permasalahan TPPO sebagai tantangan yang harus segera ditangani secara lintas sektoral dan lintas negara. Dalam pandangan Delegasi BKSAP, semua pihak terkait harus bekerja sama secara koordinatif, terutama untuk mengatasi persoalan TPPO agar tidak makin meruyak.

Kunjungan Delegasi BKSAP ke tiga negara itu diawali dari Kamboja dengan mengikuti ASEAN-AIPA Leaders' Interface yang diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja, pada 10–11 November 2022. Di sela-sela kegiatan itu, Delegasi BKSAP mendapatkan informasi secara langsung dari petugas Kementerian Luar Negeri RI yang secara khusus dikirim ke Kamboja untuk menangani TPPO. Petugas itu menyampaikan

bahwa masih banyak WNI yang menjadi korban TPPO di Kamboja yang belum tertangani dan terdokumentasikan oleh KBRI di Kamboja. Persoalannya, WNI itu tidak sekadar sebagai korban, tetapi juga terlibat sebagai bagian dari pelaku jaringan TPPO.

Selanjutnya Delegasi BKSAP difasilitasi KBRI untuk melakukan pertemuan dengan WNI yang bekerja di Sihanoukville. Ditengarai di kota itu terdapat 53 WNI yang menjadi korban

“ Menurut pandangan Delegasi DPR RI, konflik, perang, dan situasi kekerasan lainnya dapat menyebabkan perempuan melarikan diri dari negaranya dan akhirnya terlibat dalam perdagangan dan penyelundupan migran.

penipuan perusahaan investasi palsu. Delegasi BKSAP berdialog dengan perwakilan pekerja WNI di Sihanoukville untuk mendapatkan informasi secara langsung terkait persoalan yang dihadapi pekerja WNI di Kamboja. Menyikapi persoalan yang dihadapi pekerja WNI di Kamboja, dan setelah melakukan pertemuan dengan perwakilan pekerja WNI, Delegasi BKSAP memandang penting untuk dilakukannya peningkatan kerja sama antara pihak Indonesia dan pihak

Kamboja dalam menyelesaikan TPPO dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal tersebut juga perlu dilakukan untuk mengatasi jaringan TPPO di negara ASEAN yang lain, terutama Vietnam, Laos, dan Thailand. Dalam kaitan ini, saat menerima *courtesy call* Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Laos di Gedung DPR, 12 Desember 2022, pimpinan BKSAP menyampaikan urgensi kerja sama yang lebih erat antara Indonesia dan Laos dalam memerangi TPPO.

Sebelumnya, BKSAP juga memperhatikan kasus TPPO di Timur Tengah. Pada 23–27 Mei 2022, BKSAP mengirim Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Indonesia-Palestina untuk melakukan kunjungan ke Amman, Yordania. Pada kesempatan itu, GKSB Indonesia-Palestina berkesempatan melakukan dialog singkat dengan sejumlah PMI yang menjadi korban TPPO. Ditemukan, di antara para korban tersebut, PMI yang dokumen paspornya tidak sesuai dengan fakta, antara lain pemalsuan usia. Mereka juga merupakan korban agen-agen ilegal di Indonesia yang memfasilitasi mereka untuk bekerja sebagai PMI di Yordania dan negara-negara sekitarnya, seperti Irak. Banyak di antara korban tidak mendapatkan upah yang dijanjikan selama bertahun-tahun karena perjanjian kontrak kerja yang tidak jelas.

Di berbagai forum multilateral parlemen, DPR RI terlibat sangat aktif memberikan gagasan-gagasan substantif dalam kerangka memerangi TPPO. Pada forum *34th Session of the Forum of Women Parliamentarians* yang diselenggarakan di

Kigali, Rwanda, pada 11–15 Oktober 2022, Delegasi DPR RI kembali mengingatkan bahaya TPPO, khususnya bagi perempuan. Menurut pandangan Delegasi DPR RI, konflik, perang, dan situasi kekerasan lainnya dapat menyebabkan perempuan melarikan diri dari negaranya dan akhirnya terlibat dalam perdagangan dan penyelundupan migran.

Demikian juga saat menghadiri sidang Standing Committee on Democracy and Human Rights IPU, 13 Maret 2023, di Bahrain, Delegasi DPR RI menyampaikan pandangannya terhadap draf awal resolusi bertema “Orphanage Trafficking: The Role of Parliaments in Reducing Harm”. Pandangan yang disampaikan saat itu, di antaranya adalah:

1. Mengingatkan peran penting parlemen dalam memastikan anak-anak di panti asuhan aman dari perlakuan kekerasan dalam segala bentuknya, termasuk eksploitasi untuk perdagangan manusia;
2. Mengingatkan peran penting parlemen dalam mengawasi panti asuhan, siapa donaturnya, sistem manajemennya, dan sumber daya manusianya. Selain itu, harus memastikan panti asuhan itu akuntabel, transparan, dan dapat diakses.

Penting dicatat juga ihwal keterkaitan erat TPPO dengan tindak kejahatan terorganisasi lainnya, seperti terorisme. Hal tersebut disampaikan Delegasi DPR RI saat berpartisipasi pada sidang Komisi Politik dan Luar Negeri PUIC di Aljazair, 26–30 Januari 2023. Ketika itu diingatkan bahwa terorisme

terkait erat dengan kejahatan terorganisasi transnasional, penyelundupan narkoba, pencucian uang, serta perdagangan senjata dan manusia ilegal. Oleh karena itu, semua negara harus berkolaborasi dan berbagi sumber daya untuk melawan berbagai kejahatan terorganisasi berskala global.

Secara singkat, misi diplomasi DPR RI menyelamatkan manusia dari TPPO tidak sekadar karena isu tersebut telah menjadi masalah bersama masyarakat global. Namun, lebih jauh lagi, upaya memerangi TPPO adalah mandat konstitusi yang menegaskan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.



04



FOTO ATLANTICCOUNCIL.COM

Aktif Mendamaikan Rusia–Ukraina

Stabilitas dunia mengalami guncangan dengan adanya serangan militer Rusia ke Kiev, ibukota Ukraina, pada 24 Februari 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin mendeklarasikan Rusia perang melawan Ukraina sebagai upaya demiliterisasi Ukraina dengan alasan perlindungan warga Rusia di Ukraina. Tentu saja operasi militer ini menjadi babak baru hubungan Rusia-Ukraina yang sebetulnya sudah berkonflik setidaknya sejak tahun 2014. Namun, yang lebih krusial, konflik Rusia-Ukraina ini menjadi ancaman nyata bagi rantai pasok pangan dan ekonomi global. Lebih dari itu, konflik ini membawa bipolarisasi kekuatan-kekuatan dunia.

Serangan Rusia itu memicu reaksi keras dari seluruh dunia, termasuk negara-negara Barat dan juga PBB. Tidak terkecuali Pemerintah RI, juga beraksi cepat dengan mengeluarkan pernyataan sikap resmi melalui Kementerian Luar Negeri. Pada hari kedua sejak pecahnya serangan, tepatnya pada 25

Februari 2022, Pemerintah RI menyampaikan beberapa poin, di antaranya tentang pentingnya penghormatan terhadap tujuan dan prinsip Piagam PBB dan hukum internasional, termasuk penghormatan terhadap integritas wilayah dan kedaulatan. Pemerintah RI juga menegaskan bahwa serangan Rusia dapat mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan dan dunia sehingga harus segera dihentikan melalui penyelesaian secara damai lewat diplomasi.

Sebagai bagian dari upaya diplomasi parlemen, DPR RI juga mengambil reaksi cepat untuk mengurangi tensi konflik Rusia-Ukraina. DPR RI menjalankan diplomasi parlemen melalui tiga cara: *pertama*, dengan pendekatan kelembagaan melalui arsitektur tata kelola parlemen global. Dua bulan pasca-perang Rusia-Ukraina pecah, DPR RI bersama IPU menggelar Sidang Majelis Umum IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali, pada Maret 2022. Momen tersebut menjadi ruang debat bagi seluruh delegasi parlemen anggota IPU yang berjumlah 180 negara. Meskipun tema Sidang Umum IPU mengenai gerakan menuju *net-zero emission*, konflik Rusia-Ukraina juga dibicarakan di semua forum IPU.

Dalam sidang tersebut, DPR RI menginisiasi pembahasan agenda darurat (*emergency item*) untuk menggalang dukungan global dalam menghentikan perang dan menciptakan resolusi konflik. Indonesia kemudian menjadi *co-sponsor emergency item* yang akhirnya disetujui dengan judul “Peaceful resolution of the war in Ukraine, respecting international law, the Charter

of the United Nations and territorial integrity”. DPR RI berperan penting dalam mendorong agenda darurat tersebut, terutama mengenai pentingnya peran diplomasi parlemen dunia, mengedepankan dialog, terutama antarparlemen, serta pembentukan IPU Task Force untuk resolusi konflik Rusia-Ukraina.

“ Pemerintah RI juga menegaskan bahwa serangan Rusia dapat mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan dan dunia sehingga harus segera dihentikan melalui penyelesaian secara damai lewat diplomasi.

Sebagai inisiator, Ketua BKSAP DPR RI juga menjadi anggota IPU Task Force mewakili Grup Asia-Pasifik bersama dengan Ketua Parlemen Namibia dan Afrika Selatan dari Grup Afrika, Wakil Ketua Parlemen Uruguay dari Grup Amerika Latin dan Karibia, Parlemen Kazakhstan mewakili Grup Eurasia, Parlemen Uni Arab Emirates mewakili Grup Arab, serta perwakilan Parlemen Israel dan Belgia yang mewakili Grup Twelve Plus sebagai grup yang mencakup wilayah Eropa Barat. Sebagai anggota *task force*, Ketua BKSAP DPR RI fokus pada upaya mendorong dialog tripartit antara IPU, Parlemen Rusia, dan Parlemen Ukraina. BKSAP DPR RI juga konsisten

mendorong agar IPU Task Force tetap independen dan selalu menjadikan hukum internasional sebagai rujukan.

Melalui IPU Task Force, BKSAP DPR RI terus mengupayakan diplomasi parlemen untuk menghentikan perang dan pelanggaran terhadap HAM. Ketua BKSAP DPR RI juga mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Rusia dan Ukraina untuk berdialog, masing-masing dengan Parlemen Ukraina dan Parlemen Rusia. Meskipun cita-cita dialog tripartit urung terlaksana karena kedua belah pihak, terutama Ukraina, menahan diri, representasi Indonesia dengan pesan-pesan perdamaannya mampu menjadi corong bagi aspirasi warga Indonesia akan perlunya perdamaian. Itu juga sejalan dengan amanat UUD 1945 untuk turut serta menciptakan perdamaian dunia.

Kedua, DPR RI juga melakukan pendekatan diplomasi integratif. DPR RI menjalankan diplomasi yang berupaya mengintegrasikan blok-blok yang berkonflik yaitu blok Rusia dan blok Ukraina yang disokong negara-negara Barat. Hal ini tercermin dari kebijakan DPR RI dan IPU untuk mengundang kedua belah pihak dalam forum parlemen negara-negara G20 atau The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) yang digelar di Jakarta pada Oktober 2022. Meskipun terdapat tekanan Barat untuk mengucilkan Rusia dari panggung politik, Pemerintah RI dan DPR RI tetap teguh untuk menghadirkan keduanya di ajang Sidang P20.



BKSAP DPR RI fokus pada upaya mendorong dialog tripartit antara IPU, Parlemen Rusia, dan Parlemen Ukraina. Foto: Dok. DPR RI.

Sikap yang sama juga dilakukan DPR RI dalam forum parlemen Asia Tenggara atau Sidang Umum AIPA ke-44, yang dihelat di Jakarta pada 5–10 Agustus 2023, dengan memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk hadir dan melakukan dialog sebagai negara *observer*. Ini merupakan wujud politik luar negeri RI yang bebas aktif dan tidak memihak dalam kondisi apa pun, termasuk kepada negara-negara yang berkonflik. Politik luar negeri Indonesia dijalankan untuk tunduk dan berpihak pada kemanusiaan, kemerdekaan, anti-kolonialisme, kedaulatan, dan tunduk pada hukum internasional.



Diplomasi perdamaian Rusia-Ukraina dijalankan melalui penguatan hubungan bilateral Indonesia dengan Rusia dan Ukraina baik di level pemerintah maupun parlemen. Foto; Dok. DPR RI.

Ketiga, diplomasi perdamaian di Rusia-Ukraina juga dijalankan melalui strategi penguatan hubungan bilateral, baik di level pemerintah maupun di level parlemen. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Rusia yang terjalin sejak tahun 1950. Rusia berperan penting dalam masa-masa awal kemerdekaan RI. Sejalan dengan itu, Indonesia juga menjalin hubungan baik dengan pihak Ukraina. Hubungan diplomatik sudah terjalin sejak awal berdirinya Ukraina pasca-bubaranya Uni Soviet pada tahun 1991. Melalui hubungan diplomatik yang baik dengan kedua negara yang berkonflik, DPR RI

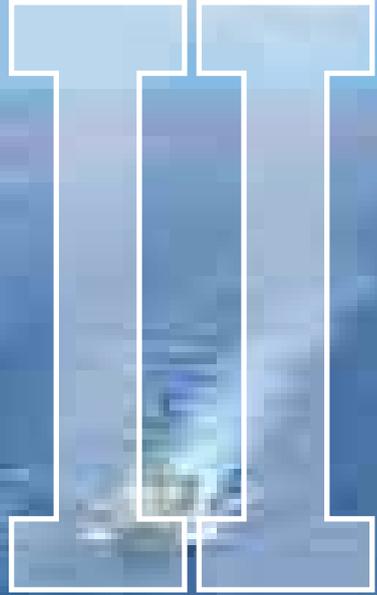
terus menyampaikan pesan-pesan perdamaian kepada kedua belah pihak melalui forum-forum bilateral.

Dengan demikian, misi Indonesia untuk hadir di panggung global dalam konteks menciptakan perdamaian telah dilakukan secara konsisten di tingkat parlemen. DPR RI, sesuai dengan mandat implementasi diplomasi parlemen, telah melakukan berbagai inisiatif untuk mendamaikan negara yang berkonflik. Penekanan dikhususkan pada dialog, diplomasi, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap HAM dan hukum internasional.





BAGIAN



**MEMELIHARA
STABILITAS DAN
MEMBANGUN
KONEKTIVITAS DI
TENGAH DINAMIKA
KAWASAN**

05



FOTO: VECTEEZY

Dua Sisi Indo-Pasifik

Secara umum, istilah Indo-Pasifik merujuk kepada bentang wilayah yang mencakup mulai dari Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik, Benua Asia Daratan, Benua Australia, Asia Tenggara, serta negara-negara maju, seperti Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Amerika Serikat, dan Kanada. Terminologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Perdana Menteri Jepang, Sinzo Abe, melalui pidatonya yang terkenal, *Confluence of the Two Seas*, pada tahun 2007 di depan Parlemen India. Ketika itu Abe menggunakan istilah Indo-Pasifik untuk menggambarkan makin kuatnya kedudukan strategis Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dalam percaturan politik internasional, seiring dengan bergesernya pusat gravitasi politik dan ekonomi dari daratan Eropa dan Timur Tengah ke Asia.

Dari perspektif politik dan keamanan, Indo-Pasifik sangat kompleks. Indo-Pasifik memiliki sejarah panjang konflik, perang, dan pertentangan ideologi antar-negara besar yang memiliki kepentingan di kawasan ini, baik pada masa sebelum Perang Dingin, pada saat Perang Dingin, maupun sesudah

Perang Dingin berakhir. Tidak bisa dimungkiri, jika dilihat dari dinamika yang terjadi saat ini di Indo-Pasifik, terdapat potensi konflik terbuka yang bisa terjadi kapan saja.

Jika dirunut, secara teknis Korea Utara dan Korea Selatan masih berperang. Kondisi relatif damai yang tidak stabil di antara kedua negara tersebut saat ini sewaktu-waktu dapat berubah menjadi krisis nuklir. Kemudian, ada permasalahan antara Tiongkok dan Taiwan, sengketa perbatasan antara Jepang dan Tiongkok, serta yang paling kompleks adalah isu Laut Natuna Utara yang tidak hanya melibatkan negara-negara di kawasan, tetapi juga negara besar di luar kawasan. Perkembangan terbaru, hadirnya AUKUS (Australia, United Kingdom, United States)¹, yang alih-alih meningkatkan stabilitas, tetapi justru berpotensi memicu eskalasi situasi keamanan yang sudah rapuh, dengan hadirnya kapal selam nuklir milik Australia.

Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) pada tahun 2023 mencatat bahwa anggaran belanja militer negara-negara ASEAN terus mengalami peningkatan secara gradual dan signifikan. Pada tahun 2000 angkanya US\$20,3 miliar dan menjadi US\$43,2 miliar pada tahun 2021. Pada kurun waktu 2002–2021, Singapura tercatat memiliki anggaran pertahanan terbesar, mencapai US\$11 miliar. Posisi berikutnya ditempati Indonesia, dengan pengeluaran sebesar US\$8,2 miliar pada tahun 2023.

1 AUKUS adalah kemitraan keamanan trilateral untuk kawasan Indo-Pasifik antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Diumumkan pada 15 September 2021, kemitraan ini melibatkan AS dan Inggris yang membantu Australia dalam memperoleh kapal selam bertenaga nuklir.



Kawasan Indo-Pasifik mendominasi 50% dari perdagangan maritim di dunia. Foto: Wikipedia

Di sisi lain, potensi ekonomi yang dimiliki Indo-Pasifik sangat menjanjikan. Kawasan ini merupakan pusat perdagangan global yang di dalamnya terdapat 65% populasi dunia, menyumbang 63% PDB dunia, serta berkontribusi terhadap 46% perdagangan barang dunia. Kawasan ini juga mendominasi 50% dari perdagangan maritim di dunia. Selain itu, Indo-Pasifik memiliki posisi yang strategis sebagai jalur maritim utama perdagangan dunia dengan pertumbuhan tercepat dalam hal adopsi internet, konektivitas digital antara masyarakat dan bisnis. Negara-negara ASEAN,

yang merupakan bagian dari Indo-Pasifik, juga memiliki potensi energi baru terbarukan.² Satu hal lagi yang juga menarik, dengan sumber daya alam berlimpah yang belum sepenuhnya dieksplorasi, Indo-Pasifik merupakan rumah bagi keanekaragaman hayati yang paling beragam di dunia yang memicu persaingan negara-negara besar dalam mendapatkan akses terhadap potensi-potensi tersebut.³

Dua sisi yang saling bertolak belakang tersebut, di satu sisi membuat situasi politik dan keamanan menjadi “rapuh” di tengah potensi ekonomi yang besar, tetapi di sisi lain menjadikan Indo-Pasifik kawasan yang paling dinamis saat ini di dunia. Indonesia cukup berhati-hati dalam menyikapi dinamika yang terjadi di Indo-Pasifik. Sebagai lingkungan strategis, kawasan ini sangat signifikan dalam memengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia. Indonesia juga menyadari makin meningkatnya signifikansi Indo-Pasifik bagi perekonomian dunia. Namun, tanpa stabilitas, keamanan, perdamaian, dan penghormatan kepada hukum internasional, tidak mungkin potensi besar yang ada di kawasan ini dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh negara mana pun.

Hal itu ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI dalam Ministerial Forum on the Indo-Pacific di Paris, Prancis, 22 Februari 2022. Menlu RI menyampaikan bahwa Indonesia melihat Indo-Pasifik sebagai lautan kesempatan yang sangat

2 Ambar Kumar Ghosh, Debosmita Sarkar, Anasua Basu Ray Chaudhury, “Security, Economy, and Ecology: Setting Priorities for Cooperation in the Indo-Pacific”, <https://www.orfonline.org/research/security-economy-and-ecology>.

3 Soumya Bhowmick, “The Indo-Pacific Economics: Inextricable Chinese linkages and Indian challenges”, *Raisina Debates*, ORF Expert Speak, December 8, 2021.

luas, terlalu luas untuk didominasi hanya oleh satu negara mana pun. Sementara itu, Presiden RI menggarisbawahi pernyataannya di berbagai kesempatan bahwa kerja sama maritim merupakan kunci dalam pengembangan arsitektur kawasan Indo-Pasifik, dan Indonesia memiliki komitmen kuat dalam meningkatkan kerja sama maritim, baik melalui Indian Ocean Rim Association (IORA) maupun East Asia Summit (EAS).



06

An aerial photograph of a turquoise lagoon. The water is a vibrant, clear blue-green color. Several small, dark-colored boats are scattered across the lagoon, some appearing to be in motion. The background shows a hazy horizon with some distant structures or land.

FOTO: TRAVELGUIDE.NET

Indonesia dan Laut Tiongkok Selatan

Berbicara mengenai Indo-Pasifik tentunya tidak bisa dilepaskan dari isu Laut Tiongkok Selatan (*South China Sea*) yang berbatasan dengan Laut Natuna Utara. Sejatinya Indonesia memang tidak termasuk dalam daftar negara yang memiliki klaim di Laut Tiongkok Selatan sebagaimana kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berpegang teguh pada prinsip bebas dan aktif. Indonesia memilih untuk tetap bersikap netral dalam konflik tersebut dan tidak berambisi untuk mengklaim wilayah itu karena menghormati hukum dan aturan internasional, termasuk *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dan *Code of Conduct* (COC) di Laut Tiongkok Selatan yang diharapkan mampu menjadi aturan tata perilaku yang merefleksikan norma dan prinsip dengan tujuan menciptakan kawasan Laut Tiongkok Selatan yang stabil, aman, dan damai.

Konflik perbatasan di Laut Tiongkok Selatan dimulai sejak 1947 ketika Tiongkok mengklaim wilayah itu sebagai wilayah teritorialnya berdasarkan sejarah penguasaan tradisional di

masa lampau. Berdasarkan klaim tersebut, Negeri Tirai Bambu meluncurkan peta wilayah itu dengan *eleven-dashed-line* (sebelas garis putus-putus). Pada tahun 1950-an, dua garis putus-putus di dekat Taiwan dihilangkan sehingga tinggal sembilan (*nine-dashed-line*). Sementara itu, Filipina, Vietnam, Taiwan, Brunei, dan Malaysia mengklaim bahwa sebagian wilayah Laut Tiongkok Selatan masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara-negara tersebut berpijak pada UNCLOS.¹

Pada 6 Mei 2009, Malaysia dan Vietnam secara bersama-sama mengklarifikasi ZEE mereka di bagian selatan Laut Tiongkok Selatan ke Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS), suatu komisi yang memiliki wewenang untuk penentuan garis batas terluar landas kontinen.² Selain bersama-sama dengan Malaysia, Vietnam mengajukan nota diplomatik terpisah ke PBB pada hari berikutnya.

Merespons nota diplomatik dua negara itu, pada 7 Mei 2009 Tiongkok memublikasikan peta *nine-dashed-line* melalui nota diplomatik ke PBB. Empat negara, yakni Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina merespons dengan mengajukan protes melalui nota diplomatik ke PBB. Alasan utama Indonesia adalah karena peta tersebut memasukkan ZEE Indonesia dan tidak mengakui UNCLOS sebagai rujukan.

1 Erta Darwati & Aprianus Doni Tolok, (2023, 27 Juli), "Kontroversi Nama Laut China Selatan Berubah Jadi Laut Natuna Utara", *Bisnis.com*, <https://kabar24.bisnis.com/read/20230727/15/1678883/kontroversi-nama-laut-china-selatan-berubah-jadi-laut-natuna-utara>.

2 Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs, United Nations, (2024, 28 Juni), "Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) Outer limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines: Submissions to the Commission: Partial Submission by Malaysia in the South China Sea", https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_mys_12_12_2019.html.

Untuk melindungi ZEE Indonesia di bagian utara Pulau Natuna yang sebelumnya bernama Laut Natuna dan berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan di bagian selatan, pada tahun 2017 namanya diganti menjadi Laut Natuna Utara. Perubahan nama itu mendapat protes dari Tiongkok. Namun, penamaan tersebut sudah sesuai dengan aturan internasional dan penggantian nama itu hanya untuk laut yang berada di wilayah Indonesia.

Pada Agustus 2023 Tiongkok menerbitkan peta kontroversial terbaru yang bertajuk *ten-dashed-line* yang diklaim oleh Tiongkok legal karena berdasarkan peta kuno Tiongkok tahun 1947. Tentu hal ini menimbulkan reaksi tajam dari berbagai negara yang dilewati oleh garis ini, termasuk Indonesia. Tiongkok melakukan klaim sepihak dengan memperluas wilayah geografisnya di wilayah Laut Natuna Utara melalui penerbitan peta ini. Di beberapa bagian, garis putus-putus tersebut tumpang-tindih dengan wilayah ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Indonesia sebagai negara *non-claimant* atau negara yang tidak ikut bersengketa di Laut Tiongkok Selatan, secara konsisten menyampaikan keberatan atas peta baru itu karena tidak berdasarkan UNCLOS 1982 atau Konvensi PBB tentang Hukum Laut.³

3 Nirmala Maulana Achmad & Dani Prabowo, Tim Redaksi, (2024, 20 Maret), "Menko Polhukam: RI Konsisten Sampaikan Keberatan Peta '10-Dash Line' China", Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/06145421/menko-polhukam-ri-konsisten-sampaikan-keberatan-peta-10-dash-line-china>.

Inklusif dan Kerja Sama

Dalam merespons berbagai tantangan kawasan, Pemerintah Indonesia mengedepankan konsep arsitektur kawasan Indo-Pasifik yang stabil, damai, inklusif, dan mengedepankan kerja sama ketimbang persaingan kepentingan. Inilah perspektif utama yang mendasari proposal *Indo-Pacific Outlook* yang kemudian diterima oleh para pemimpin ASEAN sebagai cara pandang bersama dalam menyikapi dinamika Indo-Pasifik, serta menjadi panduan bagi kerja sama yang lebih luas yang melibatkan negara-negara di luar kawasan.

Bidang kerja sama yang menjadi fokus dalam *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* mencakup empat bidang, yakni kerja sama maritim, konektivitas, pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dan kerja sama ekonomi. Ini sejalan dengan prioritas kebijakan Pemerintah Indonesia di wilayah timur yang berorientasi kawasan Pasifik yaitu: Penguatan Kerja Sama Maritim, Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), serta Konektivitas Regional. Selain kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia juga menyadari bahwa di masa yang akan datang, masa depan dan kedaulatan wilayah Indonesia akan sedikit banyak dipengaruhi oleh dinamika geopolitik yang terjadi di kawasan ini.

BKSAP DPR RI, sebagai *focal point* diplomasi parlemen DPR RI, mendukung penuh pendekatan diplomasi seperti pada *ASEAN Outlook on Indo-Pacific*. Hanya melalui pendekatan

***Nine-Dashed-Line* yang Diklaim Tiongkok**



Sumber: Office of Ocean and Polar Affairs, Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, U.S. Department of State, 2014.

inklusif dan kerja sama, Indo-Pasifik dapat menjadi kawasan yang aman, stabil, dan damai bagi semua. Semangat kerja sama menjadi modal kuat dalam menghadapi *trust deficit* yang tinggi akibat dinamika politik dan keamanan yang ada.

Dalam berbagai kesempatan di forum regional, seperti pada Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dan pertemuan tahunan Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF), BKSAP secara konsisten selalu menyuarakan pentingnya mengutamakan diplomasi untuk menjembatani perbedaan persepsi dan kepentingan antarnegara, menghormati integritas dan kedaulatan wilayah, serta membangun kerja sama yang saling menguntungkan dan sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing negara.

Konsistensi tersebut juga tecermin dari resolusi-resolusi usulan DPR RI yang berhasil diadopsi baik pada pertemuan AIPA maupun APPE. “Resolution on Enhancing Parliamentary Diplomacy on Maritime Security to Foster Regional Stability in Southeast Asia” yang diadopsi pada Sidang Umum AIPA ke-44 tahun 2023 di Jakarta, misalnya, berbicara mengenai pentingnya mendorong peningkatan diplomasi parlemen dalam rangka memelihara keamanan maritim untuk menciptakan stabilitas regional di Asia Tenggara.

Sebagai bagian dari Indo-Pasifik yang sangat dinamis, penting untuk selalu mengupayakan kerja sama dalam menanggulangi ancaman keamanan maritim. Khususnya, mengingat

bahwa perdagangan maritim merupakan salah satu sumber daya utama pendapatan nasional dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan. Dialog dan diplomasi juga penting dalam rangka menciptakan stabilitas di tengah tantangan geopolitik dan geostrategis yang kompleks, serta permasalahan maritim yang belum terselesaikan, khususnya di Laut Tiongkok Selatan.

DPR RI melalui resolusi tersebut juga mendorong implementasi penuh dan efektif dari *Declaration of Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC), serta menyerukan penyelesaian segera dari *Codes of Conduct* (COC), dengan tetap berupaya untuk memelihara dan mempromosikan perdamaian, keamanan, stabilitas, keselamatan, serta kebebasan navigasi dan penerbangan di atas Laut Tiongkok Selatan. Sementara itu, melalui APPEF, DPR RI selalu menyerukan pentingnya diplomasi dan dialog antar-pihak yang berkepentingan untuk berbagai isu sensitif, seperti isu potensi krisis nuklir di Semenanjung Korea. Sebagai dokumen politik, resolusi-resolusi tersebut penting dalam kerangka membangun kesepahaman dan kesamaan perspektif dari negara-negara di kawasan. Ini merupakan modalitas utama jika kita menginginkan Indo-Pasifik yang stabil.



07



FOTO: JPDFENSEFORUM.COM/REUTERS

Panja Indo-Pasifik

Kawasan Pasifik Selatan, yang merupakan bagian dari Indo-Pasifik, menjadi salah satu fokus dari kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan diplomasi kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah timur. Sangat penting bagi Indonesia untuk membina hubungan persahabatan yang baik dengan negara-negara kepulauan yang ada di kawasan tersebut, dalam rangka membangun persepsi yang sama terhadap Indonesia serta pengakuan terhadap kedaulatan wilayah Indonesia, khususnya di wilayah timur. Terhadap dinamika yang ada ini, maka sudah sewajarnya jika salah satu fokus diplomasi parlemen BKSAP dalam konteks kedaulatan adalah kawasan Indo-Pasifik.

Salah satu hal yang mendasari kedekatan Indonesia dengan Pasifik Selatan adalah faktor ras, karena ras Melanesia yang merupakan mayoritas ras masyarakat negara-negara di Pasifik Selatan juga mendiami sebagian besar wilayah Indonesia di bagian timur. Hal ini mempertegas keberagaman bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai ras, suku, dan identitas

etnis, tetapi tetap memiliki komitmen untuk bersatu menjadi satu kesatuan bangsa Indonesia.

Untuk dapat lebih optimal mendukung pelaksanaan diplomasi parlemen di Indo-Pasifik, Pimpinan BKSAP kemudian membentuk sebuah panitia kerja (Panja) yang dinamakan Panja Indo-Pasifik. Dibentuknya Panja Kerja Sama Indo-Pasifik pada tahun 2022 ini merupakan kelanjutan dari Panja Kerja Sama Kawasan Pasifik yang dibentuk pada tahun 2020, serta Panja Indo-Pasifik yang dibentuk pada tahun 2021. Secara garis besar, rekomendasi dari kedua Panja terdahulu tersebut menyarankan agar BKSAP sebagai *focal point* dari diplomasi parlemen DPR RI dapat secara konsisten terus mendukung Diplomasi Kedaulatan yang menjadi salah satu fokus diplomasi Pemerintah Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi di Kawasan Indo-Pasifik yang makin kompleks.

Kegiatan-kegiatan Panja Indo-Pasifik antara lain berupa *focus group discussion* (FGD) dengan pihak terkait seperti instansi pemerintah ataupun perwakilan masyarakat sipil atas isu tertentu seperti konektivitas maritim, pembangunan inklusif, dan kerja sama antarkawasan yang disepakati untuk diperjuangkan melalui diplomasi parlemen. Itu tentunya tidak hanya yang memiliki kaitan dengan Indo-Pasifik, tetapi lebih jauh lagi, yakni yang berdampak pada integritas dan kedaulatan wilayah Indonesia. Kemudian juga, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk memberikan

masukannya atas isu tertentu yang menjadi fokus kepentingan nasional Indonesia dalam kerangka kerja sama dengan negara-negara di kawasan Pasifik, serta kunjungan kerja ke daerah, khususnya daerah perbatasan, untuk mengumpulkan data dari konstituen tentang kebutuhan masyarakat yang perlu diakomodasi. Kunjungan kerja ini dilaksanakan dua kali dalam setahun ke daerah yang berbeda.

Beberapa kegiatan Panja yang menghasilkan rekomendasi signifikan, misalnya, pelaksanaan Rapat Konsultasi Terbatas dengan Universitas Pertahanan (Unhan) pada 8 Februari 2021 sebagai kelanjutan dari pelaksanaan FGD mengenai Indo-Pasifik sebelumnya, yang melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan pemerintah (Kementerian Luar Negeri) dan akademisi. Melalui Rapat Konsultasi Terbatas itu, BKSAP mendapatkan berbagai masukan penting dari perspektif pertahanan, untuk menguatkan implementasi diplomasi kedaulatan di kawasan Indo-Pasifik melalui diplomasi parlemen.

Diskusi yang berjalan antara BKSAP dan Unhan menghasilkan poin-poin substantif berupa rekomendasi bentuk-bentuk diplomasi yang bisa didalami dan dilaksanakan oleh BKSAP ke depan. Bentuk-bentuk diplomasi yang direkomendasikan oleh Unhan adalah:

1. Diplomasi Konservasi Sumber Daya Laut;
2. Diplomasi Kedaulatan Perbatasan Samudra Lepas;
3. Diplomasi Kedaulatan Pasifik Selatan;

4. Diplomasi Kedaulatan Sistem Persenjataan Tanpa Awak;
5. Diplomasi Kedaulatan dalam Penggunaan E-Bomb di Kawasan; dan
6. Diplomasi Kedaulatan Spillover Effect Konflik Laut Natuna Utara.

Pada kesempatan lain, Panja Indo-Pasifik melaksanakan kunjungan kerja ke Ubud, Bali, 11–13 Januari 2022, dengan tema „Proyeksi Kerja Sama Indonesia–Pasifik 2002: Perspektif Parlemen“. Kunjungan kerja ini dimaksudkan sebagai kegiatan pembuka Panja Indo-Pasifik untuk tahun 2022, sesuai dengan rekomendasi Panja terkait pada tahun sebelumnya yaitu 2021. Kegiatan utama dari kunjungan kerja tersebut adalah berdialog dan berdiskusi dengan para akademisi dan *civil society* yang ada di Bali, untuk menghimpun masukan-masukan dan rekomendasi dari semua pemangku kepentingan yang ada di Indonesia, dalam rangka memperkuat diplomasi parlemen yang dijalankan oleh BKSAP untuk tahun 2022, khususnya untuk Panja Indo-Pasifik. Perwakilan akademisi dan *civil society* yang hadir pada dialog tersebut adalah dari Institute for Peace and Democracy dan Universitas Warmadewa Bali.

Beberapa rekomendasi dari kunjungan kerja tersebut adalah:

- 1) Memanfaatkan momentum *launching green economy* di Kawasan Timur Indonesia dapat diupayakan sebagai prioritas (dipertajam dengan segmentasi untuk

- Indonesia Timur dan Pasifik), mengingat indikasi, misalnya, ada negara Pasifik yang akan tenggelam;
- 2) Membangun kerja sama di bidang pendidikan;
 - 3) Membangun kerja sama dalam pengembangan *green economy* di Indonesia Timur dan Pasifik, *public health*, dan lingkungan hidup;
 - 4) Membangun konektivitas infrastruktur dengan menghubungkan pendidikan dengan *green economy*. Kemudian, dalam rangka merealisasikan konsep *connecting* Indo-Pasifik, dapat dimulai dengan mengubah perspektif. Artinya, tidak didominasi oleh “perspektif Jawa”, tetapi membangun semua *tools* yang dibutuhkan untuk optimalisasi pembangunan di



Diplomasi Kedaulatan Perbatasan Samudra Lepas adalah salah satu bentuk diplomasi yang bisa dialami dan dilaksanakan oleh BKSAP. Foto: marinelink.com

wilayah Indonesia Timur, dan Pasifik pada umumnya. Dengan kata lain, pembangunan dan konektivitas diwujudkan mulai dari daerah *periphery* atau daerah yang paling tepi.

Rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari Rapat Konsultasi Terbatas dengan Unhan dan kunjungan kerja ke Bali yang dilaksanakan dalam kurun waktu 2021–2022 sebagaimana dijelaskan di atas, memberikan perspektif baru bagi pimpinan BKSAP dalam perencanaan dan pelaksanaan diplomasi parlemen, khususnya dalam konteks memperjuangkan kedaulatan Indonesia.

Sebagai wujud komitmen BKSAP DPR RI dalam mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang inklusif, maka kerja sama dan kolaborasi dengan seluruh pihak, khususnya parlemen, menjadi kata kunci. Pada tahun 2018 lalu, DPR RI menginisiasi diselenggarakannya pertemuan parlemen negara-negara Pasifik Selatan yang bertajuk “Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)” dengan total 16 parlemen dari negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan yang hadir. Hal ini juga merupakan bentuk dukungan kepada Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan konektivitas dan mempercepat pembangunan Indonesia, khususnya di wilayah timur.

Kegiatan ini merupakan forum parlemen Pasifik pertama yang diinisiasi DPR RI dengan tujuan mendorong kerja sama

antarpemerintah yang dapat berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan, mengingat bahwa Indonesia dan negara-negara di kawasan tersebut mengalami tantangan serupa terkait konektivitas maritim, masalah bencana alam dan lingkungan, serta hal lain seperti pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Berbagai upaya diplomasi parlemen untuk mempererat hubungan Indonesia dengan parlemen negara-negara Pasifik diharapkan melahirkan *co-existence* dan *pro-existence* yang berlandaskan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing, dan selanjutnya mampu berkontribusi untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama antara Indonesia dan Kawasan Pasifik.





A close-up photograph of a hand holding a vibrant red flower. Overlaid on the flower is a large, white, hollow outline of the number '111'. The background is softly blurred, showing a person in a blue and white striped shirt and a white medical device with a red cross symbol.

BAGIAN

**MERAWAT DEMOKRASI
DAN SEMANGAT
ANTI-KORUPSI**

08

Dalam tahap tertentu
pandemi Covid-19 telah
mengganggu demokrasi.

Foto: whyy.org

Diplomasi, Demokrasi, dan Pandemi

Pandemi penyakit *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) adalah bencana global mengerikan yang disebabkan oleh penyebaran virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang begitu cepat dan mematikan. Dimulai sejak awal 2020 dan dinyatakan pandeminya berakhir pada pertengahan 2023, wabah tersebut telah menelan korban lebih dari 7 juta orang meninggal dari total lebih dari 700 juta kasus.¹

Sejak awal penyakit ini telah menimbulkan kepanikan global karena sebarannya yang luas hingga menjangkau hampir seluruh penjuru dunia dan sulitnya mengendalikan penyebarannya. Beberapa negara terpaksa melakukan langkah darurat ekstrem, seperti memberlakukan *lockdown* di wilayah yang penyebarannya sulit dikendalikan. Keputusan tersebut menimbulkan dampak ekonomi, sosial, dan bahkan

1 WHO, (2024, 14 Juli), "WHO COVID-19 dashboard", <https://data.who.int/dashboards/covid19/deaths?n=c>.

menimbulkan protes karena dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM).²

Dalam tahap tertentu, pandemi Covid-19 juga dianggap mengganggu perkembangan demokrasi. Sejumlah negara disinyalir mengalami gangguan politik tersebut dengan tingkat yang beragam. Potensi gangguan demokrasi ini telah diperkirakan sejak awal karena, dalam situasi darurat, penguasa berpotensi menggunakan kewenangan daruratnya untuk merestriksi pergerakan, memberangus ketidaksetujuan, dan bahkan hingga memanfaatkannya untuk memperpanjang kekuasaan dengan tata cara yang pada akhirnya melanggar HAM. Komisioner HAM PBB, Michelle Bachelet, menegaskan bahwa wewenang luar biasa dalam penanganan Covid-19 tidak boleh menjadi kedok untuk pelanggaran dan penyalahgunaan HAM.³

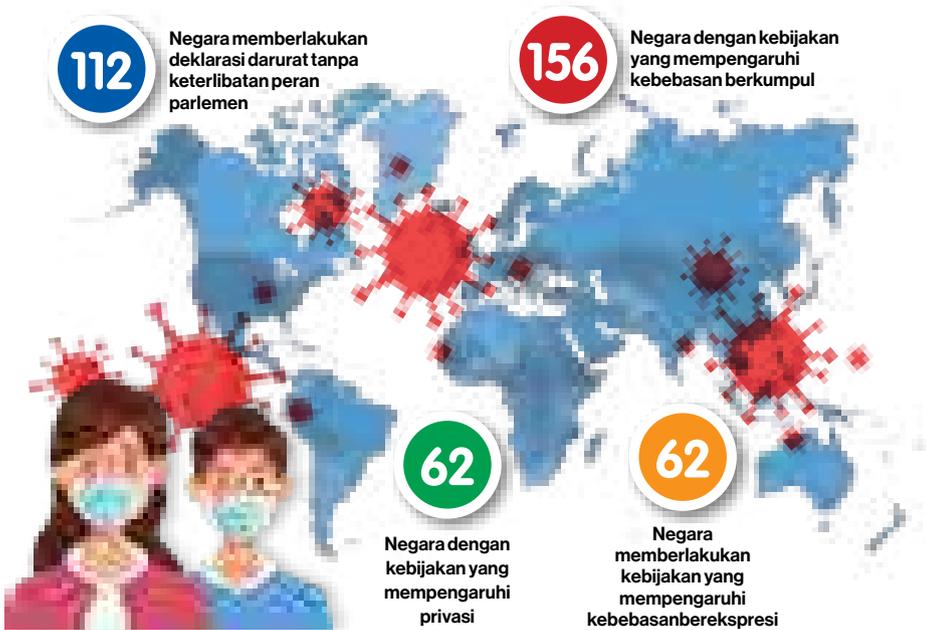
Mengenai pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh kebijakan darurat selama pandemi, telah menjadi catatan beberapa pihak. International Center for Not-for-Profit Law (ICNL), sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, memantau respons pemerintah negara-negara di dunia terhadap pandemi dengan melihat pemberlakuan undang-undang darurat yang memengaruhi kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Alat ukur yang digunakan organisasi ini adalah *Covid-19 Civic Freedom Tracker*, yaitu sebuah sistem pelacak yang dikembangkan

2 Ben Odigbo, Felix Eze, & Rose Odigbo, (2020, 17 Juli), "COVID-19 lockdown controls and human rights abuses: the social marketing implications", *Emerald Open Research*, 2: 45. DOI: 10.35241/emeraldopenres.13810.1.

3 OHCHR, (2020), "COVID-19: Exceptional measures should not be cover for human rights abuses and violations – Bachelet", <https://www.ohchr.org/en/statements/2020/04/covid-19-exceptional-measures-should-not-be-cover-for-human-rights-abuses-and-violations>.

oleh ICNL bersama ECNL (European Center for Not-for-Profit Law Stichting). Berdasarkan *tracker* tersebut, ICNL-ECNL menemukan bahwa setidaknya sebanyak 112 negara memberlakukan deklarasi darurat tanpa keterlibatan peran parlemen, yakni hanya melalui keputusan pemerintah ataupun peraturan pemerintah saja.⁴ *Tracker* itu juga menemukan sedikitnya 62 negara memberlakukan kebijakan yang memengaruhi kebebasan berekspresi, 156 negara dengan kebijakan yang memengaruhi kebebasan berkumpul, dan 62 negara dengan kebijakan yang memengaruhi privasi.⁵

Pengaruh Kebijakan Darurat Selama Pandemi Covid-19 terhadap Perkembangan Demokrasi dan HAM



4 ICNL-ECNL, (n.d.), "COVID-19 Civic Freedom Tracker-Keep Civic Space Healthy", <https://www.icnl.org/covid19tracker/?location=&issue=5&date=&type=2,3,4,5> (untuk melihat jenis deklarasi darurat dapat melalui filter "type").

5 Ibid.

Akibat pandemi pula, berbagai penerapan mekanisme darurat menyebabkan 80 negara dan wilayah pada periode Februari 2020–Februari 2022 memutuskan menunda pemilu.⁶ Ini menunjukkan pandemi Covid-19 memperparah capaian demokrasi global yang cenderung menurun dalam beberapa waktu terakhir.

Tantangan Selama Pandemi

Pandemi juga memengaruhi sistem kerja DPR RI. Beragam aturan yang diberlakukan pemerintah, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membuat pertemuan-pertemuan fisik tidak mungkin dilakukan, membuat DPR RI harus mencari terobosan model pertemuan. Pertemuan yang biasanya tatap muka langsung berubah menjadi pertemuan virtual secara *online*. Bagi BKSAP, yang mitra kerja samanya berasal dari berbagai negara, ini tentu menjadi tantangan tersendiri.

Di tengah tantangan tersebut, BKSAP terus bergerak menjalankan fungsi dan tugasnya dalam penguatan dan pertukaran pikiran terkait isu-isu demokrasi di level internasional. Di antara isu yang menguat di ranah diplomasi selama pandemi adalah soal lingkungan. BKSAP terlibat dalam dialektika demokrasi lingkungan, seiring dengan upaya penguatan parlemen dalam mengarusutamakan ekonomi hijau. Demokrasi lingkungan merupakan mekanisme penyusunan kebijakan-kebijakan lingkungan yang didasarkan

6 International IDEA, (2022), "Global overview of COVID-19: Impact on elections", <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections>.

pada prinsip-prinsip demokratis yang sedikitnya mencakup hak untuk tahu, hak untuk didengar, dan hak untuk mengakses keadilan.

Kegiatan yang dilakukan BKSAP, di antaranya, adalah berpartisipasi dalam diskusi virtual bertajuk “Launch of the Westminster Foundation for Democracy (WFD) Environmental Democracy Initiative” yang diselenggarakan pada akhir Juli 2020. Dalam diskusi virtual yang diselenggarakan bersama Westminster Foundation for Democracy (WFD) itu, BKSAP berbagi inisiatif baru dengan komunitas global. Di antaranya mengenai proses penyusunan legislasi RUU Energi Baru Terbarukan dan keyakinan mengenai aspek demokrasi lingkungan yang sudah diterapkan dalam sejumlah regulasi. Anggota BKSAP Dyah Roro Esti pada kesempatan tersebut menekankan tiga aspek demokrasi lingkungan, yakni akses informasi, partisipasi masyarakat, dan akses terhadap keadilan.⁷

Selain itu, sebagai wujud inisiatif memperkenalkan konsep demokrasi deliberatif pada pembahasan kebijakan hijau, BKSAP meluncurkan Buku Putih Ekonomi Hijau (*Agenda for Green Economy in Indonesia*, 2022).⁸ Buku putih ini menulis tawaran ide dari DPR RI untuk menggali nilai-nilai deliberatif yang sejatinya telah ada dalam kultur sosial-lingkungan masyarakat.

7 DPR RI, (2020), “Dyah Roro bicara tiga faktor fundamental dalam Demokrasi Lingkungan”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29585/t/javascript>.

8 Buku Putih Ekonomi Hijau (*Agenda for Green Economy in Indonesia*), bisa diakses melalui <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/BKSAP-2-4a4031b96536c9785d30f6eb73dc8950.pdf>.

Di luar isu-isu tersebut, BKSAP juga berperan kunci dalam menyoroti tantangan-tantangan terkini terhadap demokrasi. Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam pertemuan Majelis Umum IPU ke-143 di Madrid, Spanyol, November 2021, mengungkapkan, penyebaran berita bohong dapat meningkatkan ketegangan dan polarisasi masyarakat. Untuk mengatasi potret realitas tersebut, DPR RI menawarkan gagasan perlunya memperkuat resiliensi demokrasi. Ini berarti mendorong partisipasi luas dalam pengambilan keputusan dengan memberi kesempatan yang sungguh-sungguh untuk bersuara. Hal yang tidak kalah pentingnya, demokrasi harus menunjukkan hasil, baik dalam penyelesaian pandemi, pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan, maupun dalam penguatan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan.

Aspirasi DPR RI merupakan bagian dari keprihatinan komunitas legislatif global yang pada akhirnya mewujudkan menjadi Deklarasi Madrid. Pernyataan tersebut menjadi kehendak politik antarparlemen dalam mengatasi perpecahan dan membangun komunitas dalam tantangan demokrasi kontemporer. Kehendak ini diurai dalam lima poin besar, yaitu:

1. Pendekatan baru dalam politik sekaligus memperbarui komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi, seperti dialog dan inklusivitas;
2. Menangkal disinformasi dan ujaran kebencian;
3. Mengurangi polarisasi;

4. Menghubungkan masyarakat dengan institusi demokratisnya;
5. Memimpin di saat krisis (*leading in time of crisis*).

Sebagai wujud konkret untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi seperti dialog, Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana, berkesempatan pula menyampaikan langkah-langkah parlemen dalam memajukan dialog antarkeyakinan sebagai panelis pada diskusi panel bertajuk “Good Parliamentary Practices to Promote Interfaith Dialogue“, di IPU ke-143. Ia berbagi praktik terbaik di parlemen di Indonesia dalam upaya membangun dan melindungi hubungan antarkeyakinan seperti adanya legislasi untuk penanganan konflik sosial sebagai payung hukum penanganan konflik horizontal berlatar belakang agama. Selain itu, RUU Kerukunan Umat Beragama tengah menjadi diskusi di legislatif. RUU tersebut juga menggarisbawahi perlindungan terhadap penganut agama minoritas dari berbagai bentuk kekerasan. Hadirnya perangkat legislasi untuk melindungi minoritas, menjamin kebebasan beragama, dan melindungi kebebasan berpendapat menjadi salah satu kesimpulan utama diskusi panel terkait.

Reputasi Demokrasi

Upaya merawat dan memupuk kesadaran berdemokrasi yang dilakukan DPR RI juga mendapatkan reputasinya manakala Kelompok Asia Pasifik di IPU memercayakan keterwakilannya di Biro Komite Demokrasi dan HAM IPU (IPU Bureau of the Standing Committee for Democracy and Human Rights)

kepada Ketua BKSAP Fadli Zon. Fadli didapuk menjadi anggota biro komite tersebut sejak Mei 2021 pada pertemuan Majelis Umum IPU ke-142 dan berakhir pada Oktober 2023. Setelah berakhirnya masa tugas Fadli di biro komite tersebut, Indonesia masih dipercaya dengan terpilihnya Wakil Ketua BKSAP Gilang Dhiela Fararez menjadi anggota Biro Komite Demokrasi dan HAM IPU pada pertemuan Majelis Umum IPU ke-147 di Luanda, Angola, untuk periode 2023 hingga 2025. Kepercayaan penuh komunitas parlemen Asia Pasifik kepada BKSAP untuk menduduki jabatan di Biro Komite Demokrasi dan HAM di IPU tersebut menunjukkan Indonesia dapat berperan sebagai *role model* demokrasi di level global.

Kepercayaan kepada Indonesia sebagai perwakilan negara demokratis makin terasa manakala DPR RI mendapatkan undangan dari sejumlah negara untuk menjadi pengamat internasional atas proses pemilu. Pada April 2023, misalnya, BKSAP DPR RI secara khusus diminta menjadi pemantau proses referendum Konstitusi Uzbekistan. Negara tersebut merencanakan untuk memperbarui sekitar 65% isi konstitusinya dengan sejumlah penambahan, di antaranya, (i) peningkatan masa jabatan presiden dari lima tahun ke tujuh tahun (maksimal dua periode); (ii) penghargaan terhadap guru dengan kewajiban negara untuk melindungi martabat dan kehormatan guru, kesejahteraan materi dan sosial, dan peningkatan kapasitas profesionalnya; (iii) tanah dapat dimiliki oleh pribadi-pribadi; (iv) perlindungan terhadap



Pada April 2023 BKSAP secara khusus diminta menjadi pemantau proses referendum Konstitusi Uzbekistan. Foto: Dok. DPR RI.

media dengan dilarangnya penyensoran dan masuknya upaya pertanggungjawaban hukum apabila melakukan penghalangan kerja media; (v) pelarangan hukuman mati; dan (vi) pelarangan penggunaan bukti kejahatan yang diperoleh dengan cara melanggar hukum.⁹

Tidak hanya dalam proses pemungutan suara untuk perubahan konstitusi, BKSAP kembali dipercaya untuk memonitor proses pemilu dipercepat untuk memilih presiden Uzbekistan pada 9 Juli 2023. Seiring dengan perubahan konstitusi, maka

⁹ Komron Chegaboev, (2023), "The new constitution. 10 key changes", Kun.uz, <https://kun.uz/uz/news/2023/05/02/yangi-konstitutsiya-10-ta-asosiy-ozgarish>.

jabatan presiden negara tersebut direset, dengan pemilu untuk memilih presiden dari sejumlah kandidat, yaitu Shavkat Mirzizoyev (nonpartai dan presiden petahana), Abdulshukur Xamzhayev (Partai Ekologi), Ulugbek Inoyatov (Partai Demokratik Rakyat Uzbekistan), dan Robaxon Maxmudova (Partai Sosial Demokrat). Delegasi BKSAP dipimpin Ketua BKSAP, Fadli Zon, memantau pemilu di Samarkand dan Tashkent dan menilai secara umum pemilu dilakukan secara transparan.

Masih dalam bulan yang sama, BKSAP juga mendapatkan undangan untuk melakukan pemantauan proses pemilu di Kamboja yang berlangsung pada 23 Juli 2023. Pemilu tersebut dilakukan untuk memilih partai yang duduk di 125 kursi parlemen dan diikuti oleh sedikitnya 18 partai. Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana, yang turut memantau jalannya pemilihan, menilai proses pemilu yang terjadi berlangsung damai dan menjadi sarana sukacita warganya.

Sebagai negara yang baru saja melaksanakan transisi kepemimpinan melalui pemilu serentak, DPR RI juga tidak mau ketinggalan untuk turut memperkenalkan sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia melalui Parliamentary Observer Election Program 2024. Program ini, yang telah berlangsung sejak Pemilu 2019 silam, menjadi salah satu upaya lembaga legislatif untuk membuka mata dunia mengenai proses demokrasi dan pemilihan umum yang berpotensi terumit di dunia. Berdasarkan data KPU, Daftar Pemilih

Tetap (DPT) mencapai 204 juta jiwa, yang memilih presiden-wakil presiden, 580 kursi DPR, 152 kursi DPD, 2.372 kursi DPRD Provinsi, dan 17.510 kursi DPRD Kabupaten/Kota dengan peserta pemilu tiga kandidat presiden-wakil presiden, 18 parpol, 668 calon DPD, dan 6 parpol lokal di Aceh. Semua dilaksanakan dalam satu hari pemilu, 14 Februari 2024, menjadikan pemilu kali ini sebagai pemilihan paling rumit dan paling langsung untuk memilih seluruh kandidat jabatan perwakilan dan pemerintahan (*the most direct election*).

Upaya merawat demokrasi tidak hanya berlangsung di arena global ataupun lokal semata. Di tingkat regional, seperti ASEAN, BKSAP aktif bersuara tentang pentingnya penguatan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), termasuk di Myanmar. Pada Sidang Umum AIPA ke-42 di Brunei Darussalam, Agustus 2021, BKSAP mengajukan rancangan resolusi mengenai Myanmar sebagai upaya menggalang dukungan parlemen negara-negara ASEAN untuk mempercepat dialog dalam rangka mengakhiri krisis politik di Myanmar. Namun, resolusi tersebut masih bersifat komitmen dukungan.

Meja diplomasi parlemen di ASEAN makin disorot manakala DPR RI sebagai Presiden Sidang Umum ke-43 AIPA menginisiasi pembentukan mekanisme keparlemenan yang memadai untuk pengawasan pelaksanaan 5PCs (lima poin konsensus ASEAN untuk mengatasi situasi yang terjadi di Myanmar yang disepakati tahun 2021). Menjadi menarik

karena AIPA seolah-olah ingin memperluas peran parlemen di panggung internasional. Terlebih-lebih jika kelak DPR RI/BKSAP dapat menjadi pembangun jembatan dan fasilitator dialog antara CRPH (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw) dan junta militer. BKSAP sejatinya dapat menjadi jembatan tersebut, terlebih ketika BKSAP, atas fasilitas dari sejumlah lembaga seperti WFD, mendapatkan kesempatan berdialog secara virtual dengan CRPH terkait situasi terkini di Myanmar pada 8 Februari 2021. Pertemuan tersebut menjadi pertemuan kali pertama parlemen dari negara-negara ASEAN

“ Ide perluasan dan peningkatan peran diplomasi parlemen tersebut juga digaungkan BKSAP dalam beberapa kesempatan.

dengan CRPH sejak peristiwa politik Myanmar pada tahun 2021. Pertemuan dengan CRPH itu dapat menjadi bekal untuk berdiskusi dari hati ke hati dengan Parlemen Myanmar sehingga dapat membuka peluang ruang-ruang lanjutan untuk dialog antara CRPH dan junta.

Upaya memfasilitasi dialog antarparlemen di tingkat kawasan itu menunjukkan peluang meningkatnya peran parlemen dari sekadar fungsi tradisionalnya. Karenanya, ide memperluas peran parlemen dalam dialektika aktor multilateral menjadi

wacana lanjutan dalam diplomasi parlemen. Ide perluasan dan peningkatan peran diplomasi parlemen tersebut juga digaungkan BKSAP dalam beberapa kesempatan. Pada peluncuran ASEAN Democracy Action Partnership 2023, Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana, selain menekankan komitmen untuk memperluas keterlibatan perempuan dalam politik, juga mendorong keterlibatan parlemen dalam agenda Bali Democracy Forum (BDF). Forum yang menjadi wahana pertukaran pikiran dan praktik terbaik tentang demokrasi, semestinya tidak hanya berhenti pada tataran eksekutif. Parlemen, sebagai inti dari demokrasi, idealnya dapat terlibat dalam dialektika tentang demokrasi itu sendiri.

BDF digagas Pemerintah Indonesia pada tahun 2008. Forum ini merupakan forum utama bagi negara-negara di Asia untuk berbagi pandangan yang membangun, gagasan-gagasan, dan pengalaman tentang demokrasi tanpa penghakiman.



09



FOTO: VEČTĚZY

Gerakan Antikorupsi Global

Aspirasi mengenai pelibatan peran parlemen dalam ragam forum internasional sejatinya bukan hal baru. Pada Februari 2003, Sekretaris Jenderal PBB saat itu, Kofi Annan, membentuk suatu panel yang bernama Panel of Eminent Persons on United Nations–Civil Society Relations. Panel ini terdiri dari tokoh-tokoh terkenal, seperti Bagher Asadi (Iran), Manuel Castells (Spanyol), Birgitta Dahl (Swedia), Peggy Dulany (AS), André Erdős (Hungaria), Juan Mayr (Kolombia), Malini Mehra (India), Kumi Naidoo (Afrika Selatan), Mary Racelis (Filipina), Prakash Ratilal (Mozambik), dan Aminata Traoré (Mali). Panel diketuai oleh mantan Presiden Brasil Fernando Henrique Cardoso.¹

Menurut Annan, ia membentuk panel yang terdiri dari orang-orang terkemuka itu untuk meninjau hubungan antara PBB dan masyarakat sipil. Dalam hal ini, ia mengharapkan agar panel bisa mengidentifikasi praktik terbaik dalam sistem PBB dan organisasi internasional lainnya dengan tujuan untuk

¹ Kofi Annan, (2004), “Note by the Secretary-General”, dalam UN, *We the peoples: civil society, the United Nations and global governance – Report of the Panel of Eminent Persons on UN-Civil Society Relations*, hal. 1, <https://archive.globalpolicy.org/images/pdfs/0611report.pdf>.

menemukan cara-cara baru dan lebih baik menyangkut interaksi PBB dan organisasi internasional dengan organisasi nonpemerintah dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Setelah bekerja satu tahun membahas harapan Sekjen PBB itu, dalam laporannya, Cardoso (2004) menyebutkan, pelibatan anggota parlemen, parlemen nasional, dan otoritas lokal secara lebih sistematis akan memperkuat tata kelola global, mengatasi defisit demokrasi di level antarpemerintah, menopang demokrasi representasional, dan menghubungkan PBB lebih baik dengan opini global.²

PBB sebenarnya saat itu sudah mulai menyelenggarakan forum diskusi dengan kalangan parlemen internasional seperti IPU melalui konferensi-konferensi yang diselenggarakannya. Konferensi pertama PBB-IPU diselenggarakan pada Agustus 2000 dengan tema “The first Conference of Presiding Officers of National Parliaments“. Penyelenggaraan konferensi ini sukses, tentunya diperkuat oleh kesimpulan dari panel orang-orang terkemuka itu, dan hubungan PBB-IPU makin baik. Maka, pada September 2005, diselenggarakan konferensi kedua bertema “Second World Conference of Speakers of Parliament“, yang kemudian diikuti oleh konferensi-konferensi berikutnya.³

Wacana mengenai pelibatan peran lembaga legislatif dalam kerja-kerja internasional dan antarpemerintah juga kerap kali

2 UN, (2004), *We the peoples: civil society, the United Nations and global governance – Report of the Panel of Eminent Persons on UN-Civil Society Relations*, hal. 10, <https://archive.globalpolicy.org/images/pdfs/0611report.pdf>.

3 Inter-Parliamentary Union,(n.d.), “IPU Cooperation with the United Nations”, <http://archive.ipu.org/un-e/un-overview.htm>.

disuarakan oleh berbagai komunitas antarparlemen lainnya. Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC), antara lain menyuarakan hal tersebut pada ajang The 10th Conference of States Parties to the United Nations Convention Against Corruption (CoSP-UNCAC), Desember 2023. Ketua BKSAP, Fadli Zon, sebagai pemengaruh di GOPAC—dalam jabatannya sebagai Wakil Ketua GOPAC—dan juga Presiden South-East Asia Parliamentarians Against Corruption (SEAPAC), menyampaikan aspirasi parlemen global dalam sesi Pleno CoSP untuk melibatkan parlemen yang lebih berarti dalam proses tinjauan internasional UNCAC, termasuk dalam Implementation Review Group (IRG).

Keterlibatan dalam proses tinjauan UNCAC baik nasional maupun internasional merupakan hal penting untuk mengidentifikasi kesenjangan legislasi dan kebijakan, sekaligus *monitoring* kebijakan agar komitmen internasional yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan dan sejalan dengan kepentingan nasional.

Dalam agenda khusus pada 10th CoSP-UNCAC, yakni 10th Forum of Parliamentarians, melalui SEAPAC, BKSAP mendesak konferensi tersebut agar menghasilkan resolusi yang menegaskan kewajiban negara pihak untuk melibatkan parlemen dalam setiap proses tinjauan CoSP-UNCAC. Presiden SEAPAC juga menegaskan pentingnya parlemen berkontribusi pada tingkat *equal level playing field* (lapangan

permainan yang setara), baik pada tataran domestik maupun internasional dan kawasan seperti di ASEAN. Sejauh ini, menurut SEAPAC, ASEAN tidak membuka ruang peran yang setara antara eksekutif dan legislatif. Piagam ASEAN tidak memiliki organ terkait parlemen, sementara AIPA hanya masuk dalam entitas terkait ASEAN.⁴

Di sisi lain, Yayasan ASEAN justru masuk lebih detail dalam Piagam ASEAN. Apabila dikaitkan dengan semangat antikorupsi di ASEAN, maka tidak ada mekanisme kontrol kebijakan regional terkait hal tersebut. Bahkan, isu antikorupsi dalam instrumen dan dokumen ASEAN relatif minim dan malah terintegrasi dalam Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang.⁵

Untuk lebih memformalisasi seruan tersebut, SEAPAC, melalui peran GOPAC, memberikan kontribusi tertulisnya di CoSP-UNCAC dan disirkulasikan ke seluruh mekanisme konferensi oleh Sekretariat UNCAC dengan tema utama “SEAPAC: CoSP should adopt resolution on the inclusion of parliamentarians as the national delegation to the conference”.

Dialektika Anti-Korupsi

Wacana pelibatan peran parlemen sebenarnya sudah mendapatkan momentum—ketika negara pihak UNCAC dalam CoSP-UNCAC ke-8, Desember 2019, mengesahkan

4 Lihat lebih lanjut Pasal 16 dan Annex 2 Piagam ASEAN, <https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf>.

5 Lihat lebih lanjut Pasal 7 dan Pasal 8 Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang. <https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/ACTIP.pdf>.

Resolusi 8/14 tentang *promoting good practices in relation to the role of national parliaments and other legislative bodies in preventing and combating corruption in all its forms* yang mengakui signifikansi peran parlemen dalam mendukung pelaksanaan konvensi. Pengesahan tersebut terjadi beberapa pekan setelah DPR RI, melalui peran pemengaruhnya di GOPAC, mendorong isu terkait hingga akhirnya organisasi tersebut mengesahkan *Doha Declaration* dalam GOPAC 7th Global Conference of Parliamentarians Against Corruption, Desember 2019. Deklarasi Doha juga menekankan pentingnya keterlibatan parlemen dalam UNCAC dan SDG 16.⁶

“ BKSAP, baik melalui GOPAC maupun SEAPAC, aktif dalam dialektika antikorupsi global, termasuk ketika Majelis Umum PBB menggelar sesi khusus antikorupsi pada 2021.

BKSAP, baik melalui GOPAC maupun SEAPAC, aktif dalam dialektika antikorupsi global, termasuk ketika Majelis Umum PBB menggelar sesi khusus antikorupsi pada 2021. Menjelang penyelenggaraan acara tersebut, Presiden SEAPAC, Dr. Fadli Zon, bertukar pikiran dengan komunitas parlemen global dalam IPU-UN Parliamentary Hearing, Februari 2021. Ketika

6 Lihat lebih lanjut Paragraf 7 Doha Declaration, https://www.gopacnetwork.org/wp-content/uploads/2023/02/Doha-Declaration_English.pdf.

didapak berbicara dalam “Key anti-corruption measures: assets disclosure and beneficial ownership, whistleblowers, and financing of political parties/elections”, SEAPAC menyoroti perlunya mempertimbangkan konteks nasional, situasi sosial politik, dan sistem hukum yang berbeda-beda untuk mendorong penerapan ketiga kebijakan terkait. Oleh karena itu, tidak ada penerapan yang seragam dalam upaya memberantas korupsi. Kendati demikian, UNCAC memberikan panduan yang jelas mengenai pengelolaan dan penanganan isu-isu tersebut.



BKSAP, baik melalui GOPAC maupun SEAPAC, aktif dalam dialektika antikorupsi global. Foto: vecteezy

Isu pendanaan politik juga menjadi fokus SEAPAC ketika mengelat Majelis Umum dan Konferensi pada 2023. BKSAP mendorong dua agenda yakni pengawasan pendanaan politik dan juga penanganan korupsi hijau dengan tema “Parliamentary Actions on Political Finance Oversight and Combating Green Corruption in Southeast Asia”. Dalam acara tersebut, selain menjadi platform pertukaran ide, gagasan, dan praktik terbaik di parlemen di kawasan Asia Tenggara, SEAPAC juga menyepakati secara aklamasi untuk menunjuk kembali Ketua BKSAP, Fadli Zon, menjadi Ketua SEAPAC untuk masa jabatan 2023–2025.

Patut menjadi catatan pula, hingga saat ini, BKSAP dan Sekretariat BKSAP menjadi penyedia dukungan kesekretariatan bagi kedua organisasi, GOPAC (hingga pertengahan 2021) dan SEAPAC, meskipun secara formal kepemimpinan GOPAC telah beralih ke Qatar. Dalam peran kunci itulah, BKSAP memperkuat advokasi agar GOPAC dapat lebih bersuara dan berkontribusi dalam proses persiapan UN General Assembly Special Session (UNGASS) 2021.

Secara umum, melalui kontribusi tertulis ke UNGASS 2021, GOPAC menyampaikan sejumlah aspirasi parlemen dalam upaya mewujudkan sistem antikorupsi yang lebih memadai, yakni:⁷

1. Parlemen yang independen dan anggota parlemen yang kuat, representatif, bersih, dan berkeahlian;

⁷ Lihat lebih lanjut GOPAC Submission to the UNGASS 2021, https://ungass2021.unodc.org/uploads/ungass2021/documents/session1/contributions/GOPAC_2nd_UNGASS_2021_SUBMISSION.pdf.

2. Kerangka kerja legislasi yang kuat untuk mencegah dan memerangi korupsi sekaligus dapat menangani dampak dan modus korupsi yang menyebar;
3. Lembaga antikorupsi yang independen dan tata kelola yang lebih baik untuk sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*); dan,
4. Kolaborasi antar-pemangku kepentingan internasional yang makin meningkat.

Urgensi kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi makin relevan apabila dikaitkan dengan upaya pemulihan aset dan berbagi praktik terbaik. Dalam kerangka itulah, BKSAP juga memfasilitasi kolaborasi antara GOPAC dan IPU untuk berdiskusi mengenai pemulihan aset dan kerja sama internasional dalam sesi khusus di Sidang Umum IPU ke-144, Bali, 2022. BKSAP menekankan bahwa korupsi transnasional merupakan salah satu bentuk tindak kriminal yang paling kompleks dan sistemis, dengan kerugian sebesar US\$2,6 triliun atau lebih dari 5% dari PDB global setiap tahunnya.⁸

Karena itulah, kerja sama melalui GOPAC menjadi sangat penting sebagai pemicu gerakan kolektif anggota parlemen untuk memperkuat kembali kerja sama lintas yurisdiksi guna membatasi ruang gerak para koruptor, serta mendorong peningkatan komitmen untuk memfasilitasi proses pemulihan aset yang efektif. Sesi khusus tersebut menunjukkan peran

8 UN, (2018), "Global cost corruption at least 5% of world gross domestic product, Secretary-General tells Security Council, citing WEF data", un.org, <https://press.un.org/en/2018/sc13493.doc.htm>.

BKSAP yang masih menjadi pemengaruh dan penentu agenda dalam dialektika parlemen global tentang isu-isu antikorupsi.

Meningkatkan Kolaborasi

Melalui jejaring internasional, BKSAP juga memfasilitasi dialog dan peluang kolaborasi antara parlemen, pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Salah satunya melalui agenda Pathways of Strengthening Democracy through Open Parliament yang digelar di sela-sela P20, 2022. Di sela-sela Konferensi SEAPAC 2023, upaya membangun kemitraan multipihak juga dilakukan dalam platform Multi-Stakeholder Dialogue: Open Parliament for Participatory Post-Audit and Oversight. Dialog tersebut melibatkan beberapa pemangku kepentingan, mulai dari DPR, WFD, NDI, hingga BPK. Platform membahas penganggaran yang partisipatif dan bagaimana proses audit dapat ditindaklanjuti oleh DPR dalam mekanisme pengawasan.

Sebagai pemangku kepentingan di level global dalam isu keterbukaan, DPR menjadi salah satu pionir dalam mendorong inisiatif Open Parliament. Secara reguler, BKSAP juga menjadi corong antikorupsi dan keterbukaan parlemen di level internasional. Dalam *Open Parliament Day* yang berlangsung di Talinn, Estonia, 2023, Ketua BKSAP Fadli Zon bersama Transparency International Lithuania, Kementerian Hukum Armenia, Kepala National Agency on Corruption Prevention Ukraina, dan perwakilan dari OECD, berbagi paradigma mengenai strategi negara untuk melawan



Pada Sidang Umum IPU ke-144, BKSAP menekankan bahwa korupsi transnasional merupakan salah satu bentuk tindak kriminal yang paling kompleks dan sistemis. Foto: wfd.org

korupsi. BKSAP dalam diskusi dengan tajuk «Breaking the Silos: Whole-of-State Strategies to Fight Corruption» itu menekankan pentingnya anggota parlemen untuk berjejaring dan berkolaborasi sebagai upaya peningkatan kapasitas sekaligus berbagi praktik terbaik. Dalam kesempatan itu, BKSAP memperkenalkan GOPAC sebagai salah satu wadah kolaborasi bagi para anggota parlemen.

BKSAP menyadari diplomasi parlemen untuk antikorupsi tidak akan maksimal apabila institusi legislatif itu sendiri tidak terhubung kepada konstituen dan publik secara mendalam. Oleh karena itu, berangkat dari inisiatif Open

Parliament Indonesia (OPI) pada 2018, DPR melanjutkan upaya lembaganya untuk penguatan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas agar dapat lebih terbuka, akuntabel, dan inklusif. Melalui peran diplomasi parlemen, OPI mendorong terwujudnya inovasi-inovasi dalam mendukung kerja-kerja DPR, seperti Sistem Informasi Legislatif (SILEG). Pembaruan perwajahan dan skema SILEG adalah perwujudan bagaimana BKSAP, sebagai mekanisme internasionalisasi parlemen, mampu membawa nilai-nilai yang bermanfaat dan mengadvokasi perubahan di DPR. Kendati demikian, untuk memperkuat lembaga keparlemen agar aspiratif, sejalan dengan kepentingan masyarakat banyak, hingga transparan dalam seluruh prosesnya, perbaikan berkesinambungan adalah keniscayaan. BKSAP, sebagai garda terdepan jejaring internasional, akan tetap relevan sebagai mekanisme memperkenalkan inovasi-inovasi, praktik terbaik, hingga kemitraan yang bermanfaat bagi penguatan peran parlemen.





COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19

COVID-19



BAGIAN

TW

**MEMPERKUAT
KERJA SAMA
EKONOMI,
MEWUJUDKAN
KESEJAHTERAAN**

FOTO: VECTEZY

10



**Pandemi Covid-19
berdampak negatif
pada pertumbuhan
ekonomi global.**

Foto: freepik

Memperkuat Kerja Sama Ekonomi pada Masa Pandemi

Ketika pertama kali merebak, pandemi Covid-19 merupakan sebuah krisis kesehatan. Namun, pandemi itu kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, sosial, dan akhirnya berdampak pada semua sendi kehidupan. Dalam hal krisis ekonomi, International Monetary Fund (IMF) dalam kajiannya memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada 2020, tahun pertama pandemi, akan tumbuh negatif sebesar $-4,4\%$. Sebelumnya IMF memperkirakan pertumbuhan sebesar $-3,0\%$, lalu dikoreksi menjadi $-4,9\%$.¹ Perubahan perkiraan itu menunjukkan besarnya dampak pandemi pada pertumbuhan ekonomi global sekaligus menunjukkan betapa cepatnya kondisi memburuk yang terjadi.

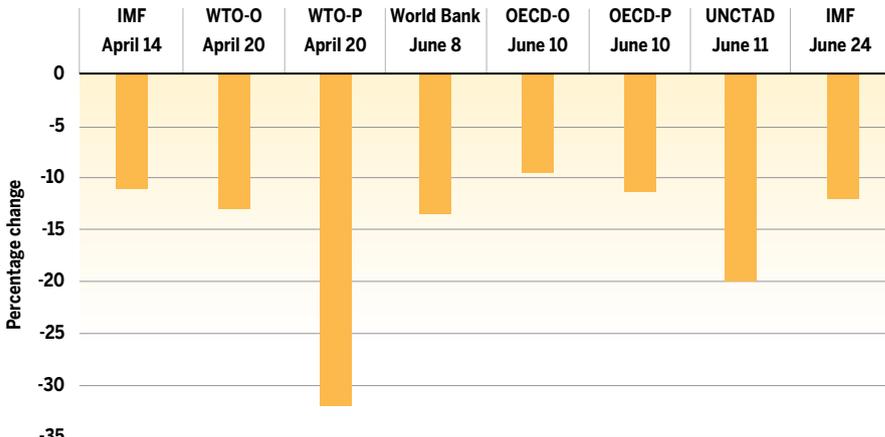
Di sektor perdagangan internasional, terjadi kontraksi yang dalam. Beberapa lembaga dunia sama-sama memperkirakan pertumbuhan perdagangan internasional negatif di tahun 2020.

¹ International Monetary Fund, (2020, Juni), "World Economic Outlook - World Economic Outlook Update, June 2020", <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020>.

Secara rata-rata, IMF, World Trade Organization (WTO), World Bank, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) memperkirakan volume perdagangan internasional pada tahun pertama pandemi akan mengalami pertumbuhan negatif di kisaran -10% hingga -32% .²

Pertumbuhan Perdagangan Internasional di Awal Pandemi 2020

Berdasarkan Perkiraan Sejumlah Lembaga/Organisasi Dunia



Note:
O = Optimistic Scenario
P = Pessimistic Scenario

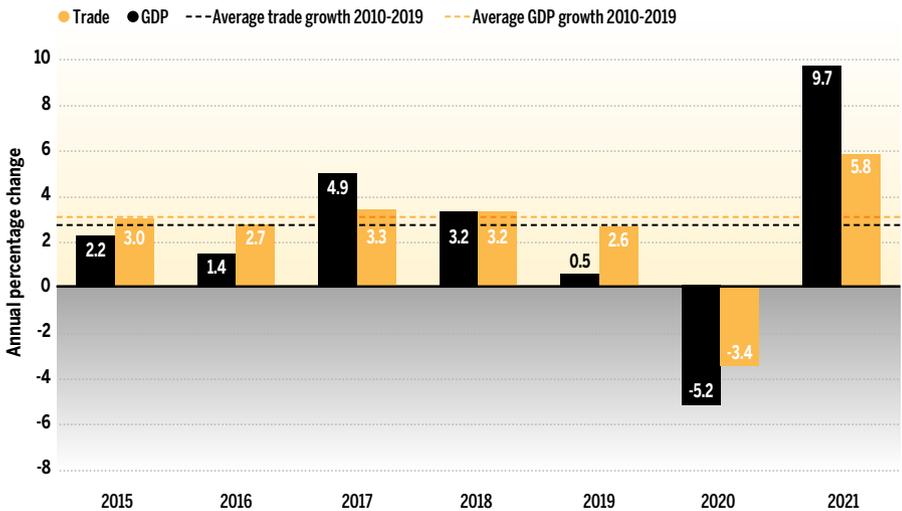
Sumber: CEPR, 2 Oktober 2020

Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 berkontraksi yang tidak terpaut jauh dari perkiraan. Bank Dunia menyebutkan pertumbuhan ekonomi global tahun

2 Gerdien Meijerink, Peter A.G. van Bergeijk, & Bram Hendriks, (2020, 2 Oktober), "Covid-19 and world merchandise trade: Unexpected resilience", CEPR, <https://cepr.org/voxeu/columns/covid-19-and-world-merchandise-trade-unexpected-resilience>.

2020 sebesar $-3,4\%$, sedangkan IMF $-3,1\%$. Sementara itu, volume perdagangan global, menurut WTO, mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar $-5,2\%$ dibanding tahun sebelumnya.³

Pertumbuhan Riil Volume Perdagangan dan Pertumbuhan Ekonomi Global 2015–2021



Sumber: WTO, *World Trade Statistical Review 2022*

Dampak Pandemi di Asia Pasifik

Selama pandemi, kebijakan mengendalikan penyebaran Covid-19 secara serta-merta menurunkan aktivitas ekonomi. Kebijakan *lockdown* dan pembatasan pergerakan masyarakat yang diambil oleh berbagai negara memang membawa dampak yang besar bagi aktivitas ekonomi. Di Indonesia, analisis mengenai dampak pemberlakuan Pembatasan Sosial

3 WTO, (2022), "Chapter III: World trade and economic growth, 2021-22", *World Trade Statistical Review 2022*, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtsr_2022_c3_e.pdf.

Berskala Besar (PSBB), atau yang sering disebut sebagai *social distancing*, pada tahun 2020 menemukan keterkaitan antara resesi ekonomi dan pembatasan pergerakan masyarakat. Beberapa provinsi di Indonesia, seperti Bali, mengalami penurunan pergerakan di bandar udara, terminal, dan hub transportasi lainnya secara signifikan. Bali dan provinsi lain yang umumnya mendapatkan kontribusi ekonomi dari sektor pariwisata, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta, mengalami pertumbuhan negatif sejak kuartal kedua tahun 2020.

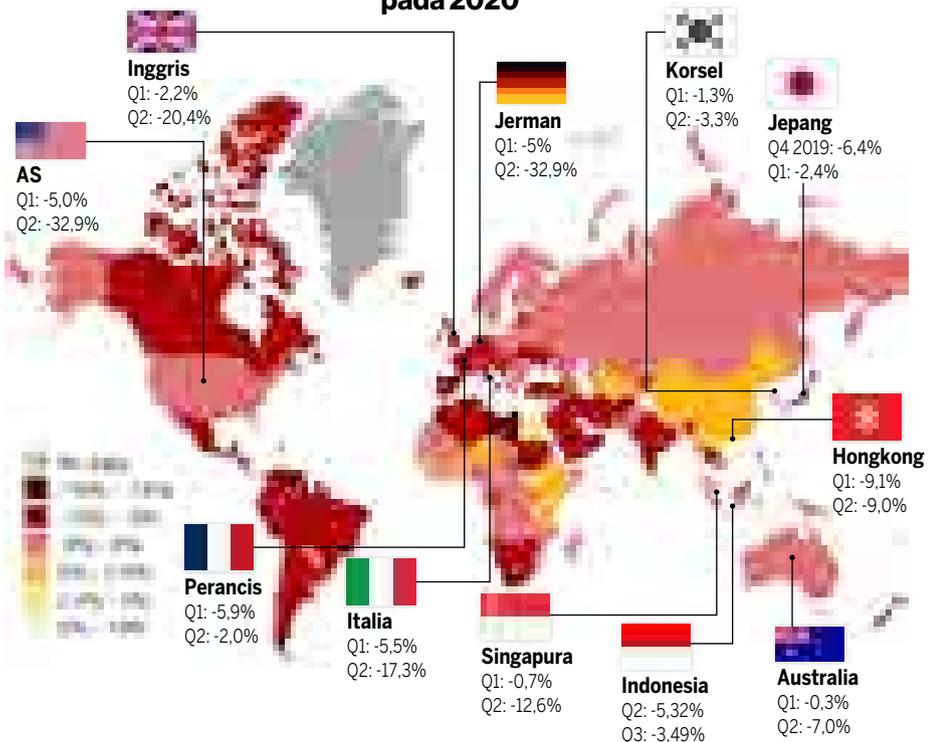
Di tingkat global, wilayah Asia Pasifik merupakan salah satu wilayah paling terdampak atas penurunan pariwisata akibat Covid-19. United Nations World Tourism Organization (UNWTO) memperkirakan kedatangan wisatawan internasional ke Asia Pasifik turun 9% hingga 12% (yoy) pada 2020 (Bank Indonesia, 2020). Secara umum, Covid-19 memengaruhi perekonomian global melalui beberapa jalur, yaitu pariwisata, perdagangan dan *supply chain*, serta pasar keuangan. Penghentian sementara aktivitas produksi perusahaan di Tiongkok juga secara tidak langsung telah mengganggu perdagangan global mengingat tingginya aktivitas perdagangan global yang melibatkan Tiongkok sebagai produsen global.

Di tengah berbagai tantangan ini, krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 menjadi prioritas utama DPR RI dalam pelaksanaan diplomasi parlemen pada periode awal terjadinya pandemi. Diplomasi parlemen selanjutnya diarahkan tidak hanya untuk mengupayakan ketersediaan alat-alat kesehatan

atau vaksin, tetapi juga pada bagaimana negara-negara di dunia dapat saling bekerja sama untuk memulihkan perekonomian mereka mengingat tidak ada satu pun negara di dunia yang tidak terdampak pandemi Covid-19.

Pada tahun 2020 hampir semua negara mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Beberapa di antaranya mengalami resesi ekonomi, termasuk Indonesia. Resesi ditandai, di antaranya, dengan pertumbuhan ekonomi negatif dua kuartal (Q) berturut-turut.

Beberapa Negara yang Mengalami Resesi Ekonomi pada 2020



Sumber: Diolah dari IMF, Kompas.com, BPS, dan CNN



Pada tahun 2020 hampir semua negara mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Foto: vecteezy

Untuk merespons situasi perlambatan ekonomi dan perdagangan global akibat mewabahnya pandemi Covid-19, Indonesia berkomitmen untuk mendorong kerja sama baik di tingkat regional maupun global yang melibatkan berbagai pihak, sektor, dan pemangku kepentingan terkait. Langkanya bahan baku industri dan produk kesehatan, serta adanya penimbunan atas beberapa barang di pasar, membuat kinerja ekspor dan impor Indonesia menjadi tidak efektif dan terhambat. Demikian pula halnya dengan diplomasi ekonomi yang dilaksanakan oleh BKSAP DPR RI melalui partisipasinya dalam berbagai forum antarparlemen, baik di tingkat regional maupun internasional.

Isu-isu yang menjadi fokus diplomasi ekonomi BKSAP DPR RI selama pandemi terbagi menjadi dua kelompok. Isu kelompok pertama berkaitan dengan WTO, yaitu reformasi sistem perdagangan, *rules-based order*, serta kepentingan negara berkembang. Adapun yang kedua berkaitan dengan kelapa sawit dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).



11

17/05/2012



17/05/2012

Secara konsisten, BKSAP juga menyerukan penyelesaian isu-isu yang tertunda di bawah Doha Round. Foto: swissinfo

Menanti Reformasi Sistem Perdagangan WTO

Di tengah situasi yang tidak menentu akibat pandemi Covid-19, BKSAP DPR RI menekankan agar sektor ekonomi dan perdagangan internasional tetap mengedepankan *rules-based order*. Melalui keanggotaan di Steering Committee Parliamentary Conference on WTO (PCWTO), BKSAP duduk mewakili kepentingan parlemen negara-negara berkembang untuk mendukung penuh reformasi WTO dan mendorong agar Appellate Body segera terbentuk sehingga WTO dapat menjalankan fungsi *dispute settlement* dengan maksimal.

Secara konsisten, BKSAP juga menyerukan penyelesaian isu-isu yang tertunda di bawah *Doha Round* yang mayoritas merupakan kepentingan negara berkembang. Sejumlah agenda *Doha Round* yang sudah digulirkan sejak 2001 hingga kini masih menunggu perundingan lanjutan akibat berkali-kali perundingannya gagal menemui kesepakatan,

seperti bidang pertanian. Untuk itu, DPR RI mendorong agar pemerintah mengedepankan pendekatan multilateral, termasuk memastikan WTO dapat berjalan baik sesuai fungsinya sehingga dapat mencapai tujuan ekonomi bersama.

Dalam berbagai kesempatan, terutama pada forum PCWTO, BKSAP DPR RI selalu menyampaikan bahwa tantangan besar lain yang dihadapi dunia pada masa pandemi adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara mendorong pertumbuhan ekonomi agar kembali positif dan mencapai target pembangunan berkelanjutan. Kedua hal ini sama pentingnya dan harus dicapai. Keseimbangan antara pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan pencapaian target pembangunan berkelanjutan dapat terwujud jika perundingan menyangkut isu-isu yang tertunda di bawah *Doha Round* dapat segera diselesaikan dengan mengakomodasi kepentingan terbaik semua anggota WTO, khususnya negara berkembang dan negara kurang berkembang. Dalam hal ini, parlemen berperan menyuarakan pentingnya mempertahankan peran sentral WTO sebagai lembaga utama tata kelola perdagangan internasional untuk menjaga relevansi dan menjawab tantangan yang saat ini dihadapi WTO.

Saat mengikuti Sidang 51st Steering Committee (SC) PCWTO yang diselenggarakan di Brussel, Belgia, 25–30 April 2023, Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon menyampaikan bahwa Sidang SC PCWTO penting dalam upaya diplomasi di bidang perdagangan di WTO. Hal ini karena parlemen merupakan

representasi dari rakyat sehingga suaranya merepresentasikan kepentingan dari masyarakat luas. PCWTO dilaksanakan setiap tahun sebelum berjalannya Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO. *Outcome document* dari PCWTO akan menjadi masukan dari parlemen bagi para menteri negara-negara anggota WTO yang akan berunding.

“ BKSAP DPR RI selalu menyampaikan bahwa tantangan besar lain yang dihadapi dunia pada masa pandemi adalah bagaimana mencapai keseimbangan.

Masalah perdagangan yang dibahas saat itu antara lain tentang *agreement on fisheries subsidies* (FSA), isu sengketa dan penyelesaian banding, dan isu pertanian. Adapun masalah perdagangan yang dibahas dalam PCWTO tahun berikutnya yang diselenggarakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 24–25 Februari 2024, antara lain tentang FSA, *public stockholding*, perdagangan dan lingkungan hidup, serta penghentian moratorium peneanaan pajak bagi perdagangan digital.

Secara umum BKSAP DPR RI berpandangan bahwa prinsip dasar dari keberlanjutan atau *sustainability* adalah kita

meneruskan kepada generasi berikutnya persediaan sumber daya yang setidaknya sama produktifnya dengan persediaan yang kita miliki saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, BKSAP DPR RI mendorong tercapainya kesepakatan di bidang pertanian/agrikultur, khususnya yang berkaitan dengan *public stockholding for food security purposes* dan *special safeguard mechanism*. Negosiasi yang sedang berlangsung dan belum final saat ini sangat diharapkan dapat diselesaikan dengan memperhatikan kepentingan negara berkembang dan negara kurang berkembang.

Tercapainya kesepakatan dalam negosiasi mengenai pertanian dan subsidi perikanan di WTO akan memberikan



Indonesia memiliki kepentingan agar negosiasi subsidi perikanan dan negosiasi pertanian dapat segera selesai. Foto: theguardian.com

ruang kebijakan yang lebih luas bagi pemerintah untuk melaksanakan berbagai kebijakan ketahanan dan kedaulatan pangan serta pengentasan kemiskinan melalui program pemberdayaan bagi petani kecil dan miskin. Di masa krisis seperti saat ini, menjaga keseimbangan antara menghormati sistem perdagangan internasional dan memenuhi kebutuhan stok publik menjadi keharusan bagi negara berkembang dan negara kurang berkembang.

Hal ini karena kita tidak dapat memprediksi krisis atau pandemi seperti apa yang akan terjadi di masa depan. Bagi negara-negara ini, pada saat-saat sulit, menciptakan ketahanan dan kedaulatan pangan berarti juga menyelamatkan nyawa rakyat. Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki kepentingan agar negosiasi subsidi perikanan dan negosiasi pertanian dapat segera selesai dan mencapai kesepakatan dengan tetap memperhatikan kepentingan negara berkembang dan negara kurang berkembang.



12

**BKSAP konsisten
memperjuangkan isu
diskriminasi sawit Indonesia
di berbagai kesempatan.**

Foto: vecteezy

Membela UMKM dan Industri Kelapa Sawit

Di tengah pandemi Covid-19 yang masih merajalela, pada 8–9 September 2020 diselenggarakan Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-41 di Vietnam. Tentu suasananya berbeda karena sidang umum diselenggarakan secara virtual. Sidang itu diikuti oleh 200-an delegasi dari 10 negara ASEAN.

Resolusi yang dihasilkan dari sidang umum tersebut menegaskan kembali desakan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat upaya pemulihan ekonomi pascapandemi, termasuk di dalamnya upaya memperkuat mekanisme jaring pengaman sosial dan ekonomi masyarakat. Karena dampak sosial dan ekonominya begitu kuat, banyak negara yang membantu rakyat mereka dengan kebijakan stimulus fiskal. Namun, bantuan fiskal ini rawan penyalahgunaan. Untuk itu, BKSAP mendukung penguatan mekanisme pengawasan sehingga nantinya distribusi stimulus fiskal dapat dilakukan secara adil, transparan dan akuntabel, serta melalui mekanisme penyampaian yang efektif, efisien,

dan akurat. Itulah, di antaranya, poin pada Sidang Umum AIPA ke-41.

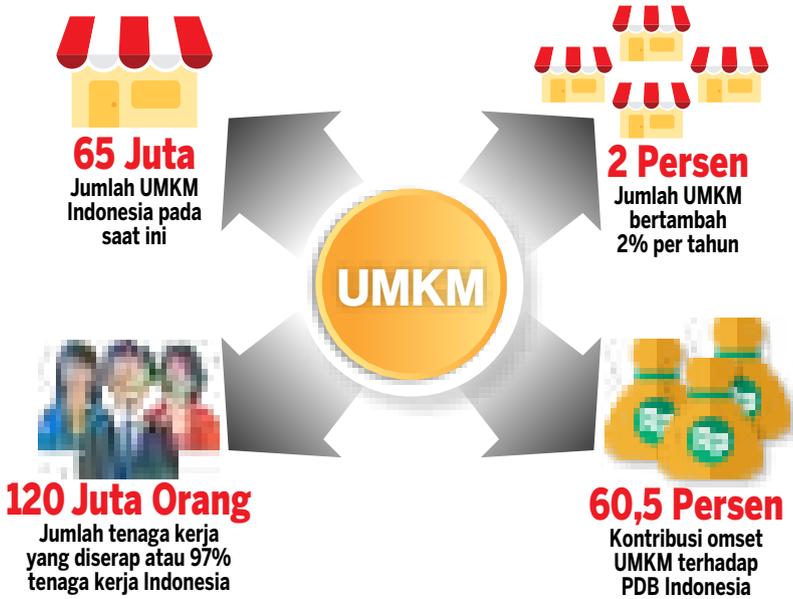
Tahun berikutnya, pada 23–25 Agustus 2021, diselenggarakan Sidang Umum AIPA ke-42 di Brunei Darussalam. Sidang umum menekankan peran krusial negara-negara ASEAN untuk terus berupaya menangani dampak pandemi terhadap ekonomi dan saling mendukung satu sama lain dalam kerangka pemulihan. Sektor pariwisata menjadi salah satu perhatian utama mengingat sektor ini yang paling terpukul dan dampak yang ditimbulkan menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. Salah satu poin utama dari resolusi Sidang Umum AIPA ke-42 untuk sektor pariwisata adalah menekankan pada kebutuhan untuk diversifikasi sektor pariwisata, seperti wisata kesehatan dan penerapan *travel bubble* di antara negara-negara anggota ASEAN.

UMKM

UMKM mendapatkan perhatian tersendiri. Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, UMKM Indonesia menempati posisi yang strategis. Jumlah UMKM secara konsisten terus meningkat dengan perkembangan sekitar 2% per tahun. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 65 juta UMKM yang mempekerjakan 120 juta orang atau menyerap sekitar 97% dari total angkatan kerja Indonesia.

UMKM juga berkontribusi terhadap 60,5% dari PDB nasional dan persentase ini berarti 20 poin di atas rata-

Kontribusi UMKM bagi Indonesia



rata kontribusi UMKM terhadap PDB negara-negara Asia Tenggara. Hal ini menjadikan UMKM Indonesia sebagai bagian integral dari proses pemulihan ekonomi nasional. Bahkan, di tengah pandemi dan di saat kelompok usaha menengah dan besar terganggu operasionalnya dan banyak yang tutup, UMKM Indonesia justru berperan sebagai *backbone* penyangga perekonomian bangsa. Tentu banyak juga UMKM yang terdampak pandemi hingga tutup dan perlu bantuan baik finansial maupun teknis. Penyebabnya, di antaranya, adalah berkurangnya konsumen mereka akibat masyarakat lebih banyak tinggal di rumah untuk mematuhi protokol kesehatan sehingga gerai mereka menjadi sepi. Namun, yang menarik, banyak kalangan UMKM yang justru



UMKM dipaksa beradaptasi dengan transformasi digital agar bisa mengoptimalkan potensi mereka. Foto: mui.or.id

bisa berinovasi dengan mengalihkan layanan fisik mereka menjadi layanan *online*. Terlebih-lebih makin tersedianya jasa layanan antar barang yang praktis karena bisa diakses melalui aplikasi berkat transformasi digital. Ini yang mendorong atau bahkan memaksa UMKM untuk beradaptasi dengan transformasi digital agar bisa mengoptimalkan potensi mereka dalam melayani konsumen dan melakukan strategi pemasaran digital. Hanya saja, beralih ke layanan digital bukan sesuatu yang mudah.

Dalam Sidang Umum AIPA ke-42, resolusi mengenai UMKM menekankan pada upaya parlemen untuk mendorong

UMKM agar meningkatkan daya saing melalui ekonomi digital dan transformasi digital. Parlemen negara-negara ASEAN juga diminta untuk menyiapkan kerangka legislasi yang melindungi UMKM dan memfasilitasi keikutsertaan UMKM di rantai pasok global (*global value chain*).

Kelapa Sawit

Isu lain yang krusial bagi Indonesia adalah tentang perdagangan minyak kelapa sawit. Dalam hal ini, upaya Indonesia untuk mengeksport minyak kelapa sawit ke negara-negara maju, terutama Eropa, terhalang oleh hambatan perdagangan yang diberlakukan oleh Uni Eropa. Bahkan terkesan Indonesia mendapat perlakuan diskriminatif. Padahal, Indonesia menginginkan kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Uni Eropa berlangsung adil, tidak diskriminatif, dan terbuka.

Dalam kaitan minyak kelapa sawit ini, BKSAP menekankan bahwa prinsip perdagangan bebas yang adil harus diterapkan untuk menghindari diskriminasi. Indonesia mendapat banyak tekanan akibat kampanye negatif dan isu deforestasi pada perkebunan kelapa sawit. Selain itu, hambatan juga terjadi karena perubahan arah industri *biofuel* di Eropa. Uni Eropa mengalihkan program *biofuel*-nya dari bahan baku minyak kelapa sawit ke minyak nabati lain atau bahan baku berbasis limbah. Terhadap minyak kelapa sawit, bahkan terdapat pelarangan *biofuel* berbasis sawit. Untuk membantu pemerintah dan industri kelapa sawit, BKSAP konsisten memperjuangkan isu diskriminasi sawit Indonesia di

berbagai kesempatan, baik melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB), dalam pertemuan dengan pihak-pihak Uni Eropa, maupun dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia. Dalam berbagai kesempatan tersebut, BKSAP menekankan komitmen Indonesia untuk membenahi sektor komoditas sawit menuju sawit berkelanjutan.

Di luar itu, Indonesia terus mengembangkan minyak kelapa sawit untuk dijadikan produk lain. Di antaranya, sebagai bahan baku biodiesel. Salah satu program yang memberikan rasa optimistis adalah pengembangan bahan bakar B30. B30 adalah program pemerintah yang mewajibkan pencampuran 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. Biodiesel yang digunakan terutama berasal dari minyak kelapa sawit. Ini adalah salah satu program pengembangan energi yang ramah lingkungan. Negara seperti China juga mengembangkan biodiesel berbahan baku minyak kelapa sawit. Dengan program ini, daya serap pasar minyak kelapa sawit Indonesia bisa diperluas.

Tentu, mengingat luas kebun kelapa sawit dan produksi minyak kelapa sawit Indonesia adalah yang terbesar di dunia dan mendapat sorotan global, maka tata kelola kebun kelapa sawit dan proses produksi minyak kelapa sawit Indonesia harus mengikuti kaidah *sustainable*, yang di Indonesia dilakukan dengan mekanisme *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). ISPO adalah suatu kebijakan dari Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pertanian, dengan tujuan untuk

meningkatkan daya saing minyak kelapa sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. Minyak kelapa sawit di Indonesia harus bersertifikat ISPO untuk menjamin *sustainability*-nya.

“ Sebagai sektor strategis perekonomian nasional, kelapa sawit juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan karena menghidupi lebih dari 10 juta penduduk Indonesia.

Sebagai sektor strategis perekonomian nasional, kelapa sawit juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan karena menghidupi lebih dari 10 juta penduduk Indonesia. Menjadi tugas wakil rakyat untuk menjaga rantai pasok minyak kelapa sawit guna mendukung transisi energi bersih dan menjaga keberlangsungan hidup petani kelapa sawit. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk pihak swasta seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), juga diperlukan untuk memperkuat *positioning* diplomasi RI terkait kelapa sawit, sehingga *output* yang dihasilkan mampu menjawab berbagai pertanyaan dunia global terkait komitmen Indonesia akan industri kelapa sawit yang berkelanjutan.

BKSAP juga mendorong agar negosiasi *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (I-EU CEPA) cepat disepakati. Sebagai sebuah skema kemitraan ekonomi komprehensif, I-EU CEPA akan membuka akses pasar, mendorong investasi perusahaan-perusahaan negara anggota Uni Eropa, dan meningkatkan perdagangan dari Indonesia ke Eropa. Di sisi lain, fasilitasi perdagangan antara Indonesia dan blok ekonomi Eropa tersebut diharapkan dapat diikuti dengan relaksasi kebijakan terkait akses minyak kelapa sawit dan *biofuel* berbasis minyak kelapa sawit dari Indonesia.



UMKM dipaksa beradaptasi dengan transformasi digital agar bisa mengoptimalkan potensi mereka. Foto: palmoilmagazine.com

Diplomasi ekonomi dijalankan selaras dengan diplomasi vaksin. Sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo, vaksinasi adalah *game changer*. Dalam beberapa kesempatan, seperti di forum MIKTA Speaker's Consultation, Februari 2022, Ketua DPR RI menyerukan agar negara-negara menghindari divergensi dalam pemulihan ekonomi. Disadari atau tidak, tingkat kecepatan dan cakupan vaksinasi suatu negara menjadi kunci kecepatan pemulihan ekonomi negara tersebut. Ke depan, sejalan dengan situasi ekonomi global yang telah melalui fase pemulihan, diplomasi ekonomi yang dijalankan DPR RI melalui BKSAP akan diarahkan untuk menjaga pemulihan ekonomi tersebut tetap adil, berkelanjutan, dan inklusif.





BAGIAN



**MENJAGA
BUMI**

FOTO: VECTEEZY



13



Dunia di ambang krisis iklim di mana suhu bumi terus mengalami peningkatan.

Foto: vecteezy

Memperkuat Diplomasi Perubahan Iklim

Dalam satu dekade terakhir, perubahan iklim telah menjadi subjek penting dalam politik internasional dan diplomasi. Terjadinya perubahan iklim merupakan suatu keniscayaan yang tidak hanya terjadi di kawasan tertentu, tetapi juga melanda seluruh belahan dunia. Isu ini telah menjadi agenda politik yang dibicarakan di berbagai forum baik bilateral maupun multilateral, termasuk di level parlemen.

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah RI, DPR juga sangat peduli terhadap isu iklim dan telah mengambil langkah-langkah diplomasi secara konsisten. Diplomasi lingkungan dijalankan dengan spirit menjaga kelestarian Bumi Pertiwi sebagai paru-paru dunia dan, pada saat bersamaan, berjalan menuju arah transformasi.

Diplomasi Perubahan Iklim

Dunia di ambang krisis iklim di mana suhu Bumi terus mengalami peningkatan. Laporan tahunan Organisasi

“Diplomasi lingkungan dijalankan dengan spirit menjaga kelestarian Bumi Pertiwi sebagai paru-paru dunia dan, pada saat bersamaan, berjalan menuju arah transformasi.

Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization/WMO) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 rata-rata suhu Bumi telah mencapai 1,45°C lebih tinggi dibandingkan masa pra-industri pada tahun 1990-an.¹ Bahkan, Laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tahun 2022 menegaskan bahwa dunia tengah bergerak cepat menuju bencana iklim. Jika upaya-upaya menahan laju pemanasan global di bawah 1,5°C hingga tahun 2100 gagal, maka bencana iklim dan kekacauan lingkungan (*environmental chaos*) bisa terjadi dan sangat membahayakan manusia dan ekosistem.² Bencana-bencana global, seperti kekeringan, banjir, badai, naiknya permukaan air laut, mencairnya bongkahan es di kutub, serta kekacauan iklim, tidak bisa dihindari.

Melalui Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Kerangka Perubahan Iklim (United Nations Framework

1 World Meteorological Organization, (2024, 19 Maret), “State of the Global Climate 2023”, <https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate-2023>.

2 H.O. Pörtner, D.C. Roberts, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Tignor, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Lösschke, V. Möller, A. Okem (eds.), (2022), “Summary for Policymakers”, IPCC, dalam Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022, Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.

Convention on Climate Change/UNFCCC) para pemimpin dunia terus berupaya menggalang kekuatan, memperkuat komitmen, dan memobilisasi sumber daya untuk menahan laju pemanasan global. *Kyoto Protocol* telah diadopsi pada tahun 1997 dan diterapkan pada tahun 2005 sebagai perjanjian global pertama yang memberi mandat kepada negara-negara industri untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (*greenhouse gas*).

Pada tahun 2015, *Kyoto Protocol* digantikan oleh *Paris Agreement* (Perjanjian Paris) yang menyerukan seluruh negara di dunia untuk secara sukarela menurunkan emisi gas rumah kaca agar bisa menahan laju pemanasan global di bawah 1,5°C dibanding masa pra-industri. Perjanjian Paris diadopsi dalam forum Konferensi Para Pihak (Conference of Parties/COP) ke-21, suatu forum dalam UNFCCC untuk menentukan upaya-upaya global dalam menahan laju perubahan iklim.

Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan yang berada di *ring of fire* dunia dan dikenal sebagai paru-paru dunia, perubahan iklim tentu merupakan suatu keniscayaan yang harus dihadapi. Diplomasi perubahan iklim bukan lagi sebuah wacana, melainkan suatu keharusan demi mempertahankan kelestarian Ibu Pertiwi. Indonesia menjalankan *total diplomacy* untuk perubahan iklim. Artinya, kerja sama global untuk mengurangi dampak perubahan iklim tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, tetapi oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk parlemen.

Sejalan dengan parlemen negara-negara Para Pihak yang juga turut andil dalam diplomasi perubahan iklim, dalam beberapa tahun terakhir, DPR RI juga terus menggaungkan isu perubahan iklim di kancah regional dan global. Diplomasi perubahan iklim ditujukan pada dua misi besar yang sejalan dengan kepentingan nasional yaitu menggalang kekuatan global untuk mitigasi perubahan iklim.

Di tingkat global, DPR RI menyuarakan upaya mitigasi perubahan iklim atas dasar prinsip *common but differentiated responsibility*. Artinya, negara-negara maju yang telah melalui proses industrialisasi perlu mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar dalam upaya tersebut. Merujuk kepada data World Resources Institute (WRI), lima *emitter* yang menyumbang emisi gas rumah kaca terbesar adalah Tiongkok, Amerika Serikat (AS), India, Uni Eropa, dan Rusia. Tiga *emitter* yang pertama, yakni Tiongkok, AS, dan India, menyumbang 42,6% emisi. Bandingkan dengan 100 negara paling bawah dalam daftar penyumbang emisi yang hanya berkontribusi 2,9% emisi.³

Oleh karena itu, kompensasi atas dampak perubahan iklim di negara-negara berkembang akibat industrialisasi di negara-negara maju selalu menjadi perhatian DPR RI. Prinsip tersebut selalu digaungkan dalam pertemuan-pertemuan parlemen global, terutama dalam rangkaian Sidang COP, Sidang Umum IPU, dan forum-forum SDGs tingkat global.

3 Johannes Friedrich, Mengpin Ge, Andrew Pickens, & Leandro Vigna, (2023, 2 Maret), "This Interactive Chart Shows Changes in the World's Top 10 Emitters", World Resources Institute, <https://www.wri.org/insights/interactive-chart-shows-changes-worlds-top-10-emitters>.

Negara Penyumbang Emisi Gas Rumah Kaca



Sumber: World Resource Institute/Johannes Friedrich, Mengpin Ge, Andrew Pickens, & Leandro Vigna, 2023

Dalam kesempatan Sidang Pre-COP 26 di Italia dan COP 26 di Glasgow, Inggris, pada akhir tahun 2021, BKSAP DPR RI mendesak negara-negara maju untuk memenuhi komitmen pembiayaan iklim sebesar US\$100 miliar per tahun yang dijanjikan pada COP 16 di Cancun, Meksiko. Komitmen tersebut ditargetkan bisa terlaksana hingga tahun 2025.

Mengingat transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan dan ramah iklim membutuhkan investasi besar, maka pendanaan merupakan kebutuhan riil negara-negara berkembang atau industri baru seperti Indonesia. Jika terealisasi, dana itu mestinya bisa digunakan untuk melaksanakan program-program mitigasi perubahan iklim sekaligus adaptasi.

Mitigasi Perubahan Iklim di Tanah Air

Pada Sidang Umum IPU ke-144 di Nusa Dua, Bali, Indonesia berperan penting dalam menggalang dukungan global terkait perubahan iklim. Hasil sidang tersebut tertuang dalam Deklarasi Nusa Dua (*Nusa Dua Declaration*) yang berjudul “Getting to zero: Mobilizing parliaments to act on climate change”.⁴ Ini merupakan bentuk komitmen DPR RI dan Indonesia dalam mendukung target penurunan emisi yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI.

Sejalan dengan Perjanjian Paris, Indonesia telah menargetkan penurunan emisi karbon sebelum tahun 2060, seperti tercantum dalam dokumen *Enhanced National Determined Contribution* (Enhanced NDC), suatu dokumen yang memuat target dan aksi iklim di masing-masing negara. Sebelumnya, Indonesia telah menaikkan target pengurangan emisi menjadi 31,89% pada tahun 2030 dengan kemampuan domestik dan sebesar 43,20% dengan bantuan internasional.⁵ Dokumen

4 Inter-Parliamentary Union, (2022), “144th Assembly and related meetings”, <https://www.ipu.org/event/144th-assembly-and-related-meetings#event-sub-page-25792/>.

5 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, (2022), “Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia”, https://unfccc.int/documents/615084?gclid=EAlalQobChMIzvaQz4H6gwMVxRB7Bx1yxAEwEAAAYASAAEgKfgfD_BwE.

komitmen tersebut diserahkan Pemerintah RI ke UNFCCC pada saat COP 26 di Glasgow, tahun 2022.

Setelah Sidang IPU ke-144, perubahan iklim selalu menjadi topik pembicaraan dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan di Indonesia. Sidang parlemen negara-negara anggota G20 (P20) menjadikan isu perubahan iklim dan

“ DPR RI juga mengajak seluruh Delegasi P20 untuk memasang panel surya di Kompleks DPR RI yang mampu memasok sekitar 25% kebutuhan listrik di DPR.

energi terbarukan (*renewable energy*) sebagai salah satu subtopik bahasan. Sebagai bagian dari komitmen terhadap isu iklim, DPR RI juga mengajak seluruh Delegasi P20 untuk memasang panel surya di Kompleks DPR RI yang mampu memasok sekitar 25% kebutuhan listrik di DPR.

Belakangan ini, diplomasi perubahan iklim yang digaungkan DPR RI makin mengerucut pada tiga aspek krusial, yaitu investasi untuk mitigasi perubahan iklim, transfer teknologi, dan pengembangan SDM, seperti yang disampaikan pada Forum Parlemen Asia-Pasifik atau Asia-Pacific Parliamentary



Upaya untuk menahan laju perubahan iklim bisa ditumbuhkan dengan merujuk kepada local wisdom yang ada. Foto: vecteezy

Forum (APPF) ke-31 di Manila, Filipina, pada tahun 2023 lalu. Untuk mitigasi perubahan iklim, Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp3.779,63 triliun. Tentu angka ini sangat besar, apalagi jika mengandalkan APBN, sehingga membutuhkan partisipasi pihak lain.

Selain itu, DPR RI juga selalu mengangkat prinsip *leading from within* dan menjadikan Indonesia sebagai referensi global dalam upaya pemeliharaan lingkungan dan perubahan iklim. Upaya untuk menahan laju perubahan iklim bisa ditumbuhkan dengan merujuk kepada *local wisdom* yang ada, seperti prinsip Tri Hita Karana di Bali. Pada Sidang First Global Parliamentary Meeting on Achieving SDGs, September 2021, yang bekerja sama dengan IPU, BKSAP menggarisbawahi pentingnya melihat kearifan lokal yang selaras dengan prinsip menjaga alam dan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, selain menjadi pengendali perubahan iklim melalui peran legislasi, penganggaran, dan pengawasan, parlemen juga menjadi pelaksana diplomasi perubahan iklim di tingkat regional dan global. Sebagai wakil rakyat, anggota parlemen memiliki peran untuk mengarusutamakan isu perubahan iklim melalui bentuk pelibatan publik yang inklusif dan deliberatif. Pelibatan publik akan meningkatkan legitimasi isu perubahan iklim di tingkat nasional, sekaligus memperkuat kapasitas perwakilan parlemen.



14



Dunia sedang bergerak ke arah transformasi menuju ekonomi hijau.
Foto: vecteezy

Mewujudkan Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan

Diplomasi perubahan iklim erat kaitannya dengan upaya adaptasi perubahan iklim yang tengah dijalankan. Dunia sedang bergerak ke arah transformasi menuju pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang didasarkan pada sumber daya yang dapat diperbarui dan tidak merusak lingkungan. Ini menggeser paradigma ekonomi tradisional yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi. Transisi menuju ekonomi hijau melingkupi perubahan pada tataran kebijakan dan juga perubahan perilaku ekonomi di berbagai sektor, termasuk energi, industri, transportasi, dan sebagainya.

Dalam hal energi, misalnya, transisi menuju energi bersih membutuhkan pengurangan substansial dalam penggunaan bahan bakar berbasis fosil, perluasan elektrifikasi, peningkatan efisiensi energi, dan penggunaan bahan bakar alternatif. Hal ini memiliki tantangan tersendiri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir telah ditandai dengan adanya transformasi struktural. Terdapat peralihan

mobilisasi sumber daya dari sektor tradisional dan primer ke sektor industri dan tersier. Namun, untuk penerimaan luar negeri, sebagian besar pemasukan berasal dari sektor primer. Batu bara dan *crude palm oil* (CPO) tetap menjadi kontributor paling signifikan.

Pada tahun 2019, Asian Development Bank (ADB) menyoroti bahwa transformasi struktural mengharuskan Indonesia untuk meningkatkan kinerja ekonomi bernilai tambah dan lebih terdiversifikasi. Karena itu, transisi menuju ekonomi hijau telah menjadi agenda kebijakan yang terus digaungkan oleh Pemerintah RI. Agenda ekonomi hijau telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020–2024 dengan prioritas pada kualitas lingkungan, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta pembangunan rendah karbon.

Di level parlemen, pengarusutamaan ekonomi hijau menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian DPR RI. Pada Januari 2022, DPR RI meluncurkan Buku Putih (*White Paper on the Agenda for Green Economy in Indonesia*). Buku ini menggarisbawahi pentingnya rekayasa institusi (*institutional arrangement*) supaya adaptif terhadap agenda ekonomi hijau sehingga pengelolaan ekonomi hijau bisa ditangani oleh lembaga atau institusi yang mumpuni baik dari sisi kewenangan maupun akses terhadap sumber daya. Di sisi lain, menuju transformasi hijau juga membutuhkan dukungan publik sehingga perlu adanya saluran-saluran aspirasi yang

terbuka dalam hal transisi menuju ekonomi hijau, misalnya dengan adanya *citizen assembly*.

Hal tersebut menjadi upaya penting BKSAP DPR RI dalam meningkatkan *awareness* terhadap pentingnya aksi kolektif terhadap ekonomi hijau baik di internal parlemen maupun dalam rangka membangun sinergi dan kohesivitas kebijakan. BKSAP DPR RI juga membentuk Panja SDGs yang di dalamnya memuat mandat untuk memperkuat upaya transisi menuju ekonomi hijau. Buku putih ini tentunya menjadi penanda komitmen DPR RI dalam mendukung transformasi menuju pola pembangunan yang hijau dan berwawasan lingkungan, sejalan dengan upaya mencapai target-target penurunan emisi dalam dokumen *Enhanced NDC* yang disetorkan tiap tahun di Sidang COP.

Di level nasional, BKSAP DPR RI juga mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan

“ Upaya penting BKSAP DPR RI dalam meningkatkan *awareness* terhadap pentingnya aksi kolektif terhadap ekonomi hijau baik di internal parlemen maupun dalam rangka membangun sinergi dan kohesivitas kebijakan.



BKSAP DPR RI juga mendorong penyelesaian Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Foto: vecteezy

Energi Terbarukan (RUU EBET) yang saat ini masih dalam proses. Perangkat legislasi ini tidak hanya dapat memfasilitasi transisi menuju penggunaan energi bersih, tetapi juga menunjukkan adanya *political will* untuk memanfaatkan teknologi dalam mengurangi emisi gas CO₂. Upaya tersebut tentunya juga sejalan dengan berbagai upaya pemerintah untuk menstimulus transisi menuju ekonomi hijau, seperti kebijakan pajak karbon yang terakomodasi dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Implementasi undang-undang ini diharapkan bisa terealisasi setidaknya pada tahun 2025.



Diplomasi ekonomi hijau juga dijalankan oleh DPR RI yang mengarah pada penguatan kerja sama regional untuk mempercepat transisi. Pada Sidang AIPA ke-44 tahun 2023, DPR RI mengusulkan resolusi percepatan transisi hijau dengan judul “Resolution on Accelerating Green Transition for Sustainable and Resilient Economic Growth”. Ini merupakan bentuk komitmen DPR RI dalam mendukung transisi hijau yang diharapkan juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat di Indonesia. Satu pesan yang disampaikan dalam resolusi ini adalah bahwa transisi hijau dan pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan, sesuai dengan tema Ketetuaan Indonesia di ASEAN tahun

2023 yaitu “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” di mana ASEAN harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.

Green Jobs

DPR RI juga sangat *concern* terhadap isu pengembangan sumber daya manusia di sektor ekonomi hijau yaitu melalui promosi tenaga kerja hijau (*green jobs*). Sektor ini diprediksi dapat menghasilkan lebih dari 20 juta lapangan kerja baru di Asia-Pasifik. Sebagai negara yang turut mengupayakan transisi hijau, maka kebutuhan tenaga kerja di sektor ini sangat mendesak.

Pada Sidang Umum AIPA ke-44 juga, DPR RI berhasil menggalang komitmen parlemen negara-negara ASEAN untuk mendukung pengembangan SDM hijau melalui resolusi berjudul “Resolution on Mobilizing Parliamentary Actions on Promoting Green Jobs and Skills to Support Green Economic Transition”. Langkah ini juga merupakan bentuk upaya BKSAP DPR RI dalam mendukung upaya-upaya transisi menuju ekonomi hijau. Langkah tersebut sejalan dengan prioritas ASEAN yang telah menyusun studi *green jobs* di tingkat ASEAN melalui *Regional Study on Green Jobs Policy Readiness in ASEAN* yang diterbitkan pada tahun 2021.

Melalui diplomasi parlemen oleh BKSAP, DPR RI telah menjadi subjek dalam gerakan menuju ekonomi hijau di Indonesia. Pada tataran diskursus, ekonomi hijau dan perubahan iklim telah menjadi narasi yang terus dikembangkan dan



BKSAP mendukung studi *green jobs* di tingkat ASEAN.

Foto: smb.telkomuniversity.ac.id

dibahas di berbagai forum baik di tingkat regional maupun internasional. Tidak hanya persoalan legislasi, DPR RI juga *concern* terhadap isu *budgeting* dengan menggalang dukungan finansial non-APBN di tingkat global. Ini tentu merupakan upaya konkret yang dibangun atas dasar prinsip diplomasi untuk kepentingan nasional.



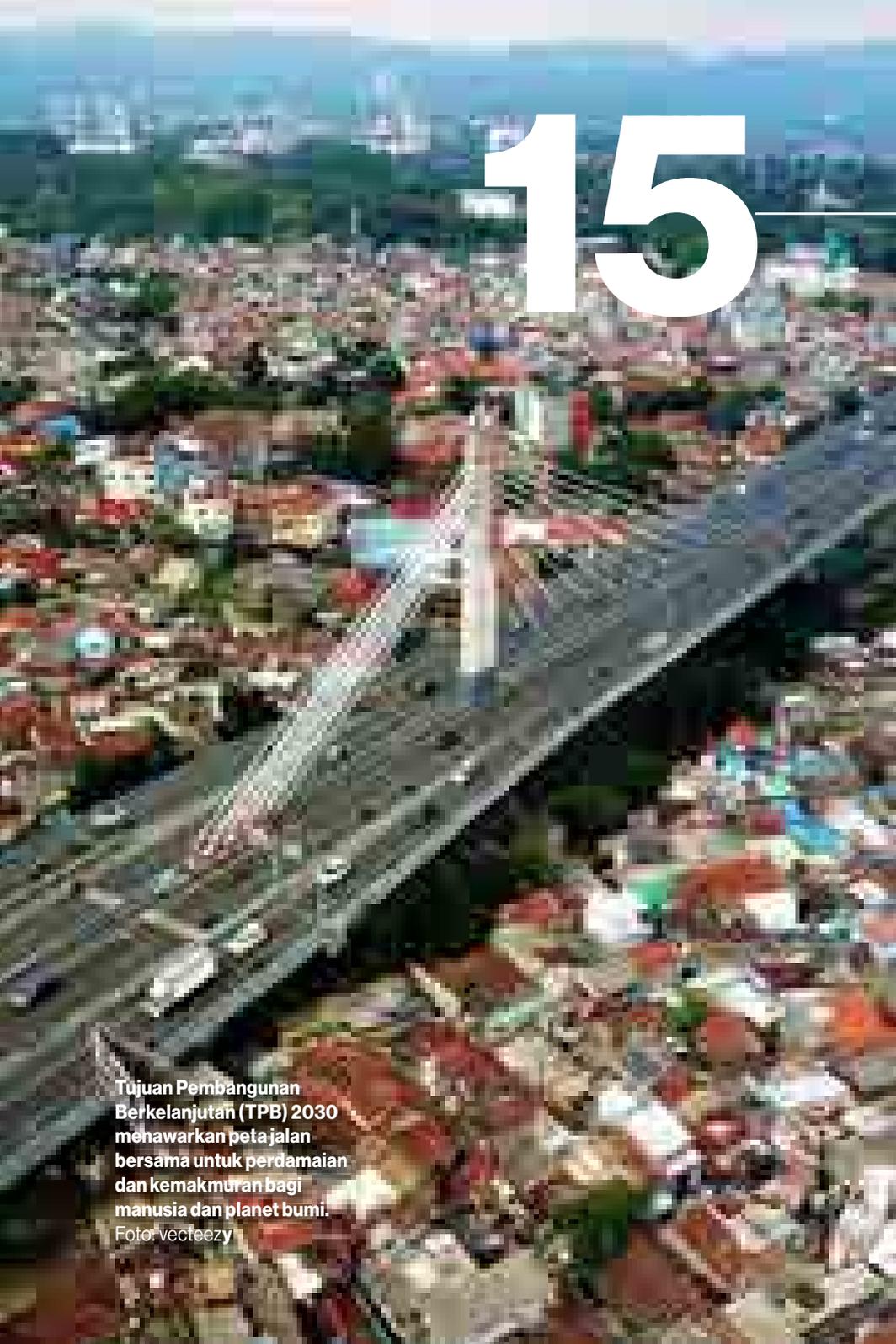




BAGIAN

**PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN**

15

An aerial photograph of a densely populated city, showing a mix of residential buildings and green spaces. A large, white, semi-transparent number '15' is positioned in the upper right quadrant of the image. The city's layout is visible, with roads and clusters of buildings extending towards the horizon under a clear sky.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 menawarkan peta jalan bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet bumi.
Foto: vecteezy

Mengakselerasi Pembangunan Berkelanjutan

Diadopsi oleh seluruh negara anggota PBB pada tahun 2015, agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030 menawarkan peta jalan bersama untuk perdamaian dan kemakmuran bagi manusia dan planet Bumi, baik saat ini maupun di masa depan. Terdapat 17 poin dalam TPB, yang mendesak semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang, untuk bertindak bersama-sama melalui kemitraan global.

Akan tetapi, dalam skala global, pencapaian TPB secara keseluruhan masih sangat tertinggal. Selama ini TPB menjadi sasaran dari pengabaian politik, perencanaan yang buruk, penerapan kebijakan yang tidak koheren, dan kendala kelembagaan di semua tingkat pemerintahan.

Pemerintah menjadi aktor utama dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai TPB dalam skala nasional.

17 Agenda TPB



Sumber: <https://sdgs.bappenas.go.id/>

Namun, kita tidak bisa mengabaikan bahwa parlemen mempunyai peran penting dalam mempercepat ketercapaian TPB. Di tingkat internasional, Majelis Umum PBB kembali mengakui hal ini pada Desember 2022, ketika mengadopsi resolusi bertajuk “Enhancing the Role of Parliaments in Accelerating the Implementation of the Sustainable Development Goals” (Meningkatkan Peran Parlemen dalam Mempercepat Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan).

Resolusi tersebut mengakui akan perlunya kolaborasi dan kerja sama yang lebih erat antara lembaga-lembaga utama seperti pemerintah dan parlemen untuk melaksanakan TPB. Sementara pemerintah memimpin TPB, parlemen memiliki peran penting untuk memainkan fungsi pembuat undang-undang, pengawasan, anggaran, dan perwakilan

mereka. Bersama-sama mereka dapat meningkatkan proses pembangunan dalam semua dimensinya –ekonomi, sosial, dan lingkungan– dengan cara yang koheren dan efisien, tanpa menyinggalkan siapa pun.¹

Deklarasi Agenda TPB 2030 mengakui peran strategis parlemen nasional melalui penetapan undang-undang dan penerapan anggaran, dan peran mereka dalam memastikan akuntabilitas implementasi yang efektif serta membawa kemitraan global antarparlemen demi keberhasilan TPB. Hal ini karena mereka mewakili masyarakatnya di seluruh dunia, dalam rangka memastikan perwujudan TPB berada pada jalur yang benar. Anggota parlemen mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mewakili konstituen dan memberikan layanan bagi solusi berkelanjutan di tingkat akar rumput.

Dalam kerangka tersebut, BKSAP DPR RI telah membentuk kelompok kerja parlemen mengenai TPB. Anggotanya berasal dari komisi yang berbeda-beda yang memungkinkan mereka menjalankan fungsi parlemen dengan lebih baik di komisi masing-masing dalam kaitannya dengan TPB. Kelompok ini secara unik dirancang untuk bertindak dalam dua fungsi: sebagai titik fokus parlemen mengenai TPB di arena internasional dan sebagai katalis TPB dalam semua aspek kerja parlemen. Dalam melakukan hal tersebut, BKSAP terlibat aktif dalam seluruh agenda multilateral TPB, termasuk dalam

1 Inter-Parliamentary Union (IPU), the United Nations Economic Commission for Europe (ECE) and the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), (2023, 19 Juni), “Enhancing the role of parliaments in accelerating the achievement of the SDGs: Taking forward the UNGA resolution”. Concept Note.



BKSAP menghimpun praktik-praktik terbaik mengenai kebijakan pembangunan berkelanjutan dari seluruh penjuror dunia serta praktik-praktik lokal sebagai sumber inspirasi dan inovasi. Foto: Dok. DPR RI.

rangkaian *high-level thematic debate meeting* di PBB yang diselenggarakan oleh IPU.

BKSAP juga mendorong partisipasi inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan akademisi. Hal ini juga berfungsi untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pemantauan melalui penilaian terhadap program dan kebijakan terkait TPB. BKSAP menghimpun praktik-praktik terbaik mengenai kebijakan pembangunan berkelanjutan dari seluruh penjuror dunia serta praktik-praktik lokal sebagai

sumber inspirasi dan inovasi, yang dapat berguna untuk mempromosikan kebijakan TPB dalam konteks nasional.

Jargon terkait TPB, *leave no one behind*, yang selalu digaungkan oleh PBB, mencerminkan komitmen tegas seluruh negara anggota PBB untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuk, mengakhiri diskriminasi dan pengucilan, serta mengurangi kesenjangan dan kerentanan yang meninggalkan banyak orang serta melemahkan potensi individu dan kemanusiaan secara keseluruhan. Dengan semangat tersebut, BKSAP, sebagai ujung tombak diplomasi parlemen, turut memperjuangkan kebijakan yang lebih inklusif, seperti pada bidang kesetaraan gender, keterlibatan pemuda, transformasi digital, pelestarian budaya, dan terbukanya akses terhadap fasilitas kesehatan.



16

A photograph of a parliament chamber, likely the DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) in Indonesia. The image shows rows of wooden desks and chairs, viewed from behind a person in the foreground. The lighting is warm and the scene is slightly blurred, suggesting a candid or documentary style. The number '16' is overlaid in large white font in the upper right corner.

**Kontribusi parlemen (DPR)
sangat krusial dalam
melahirkan banyak instrumen
hukum dalam kerangka
kesetaraan gender.**

Foto: vecteezy

Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

Di tengah tantangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk pemulihan pascapandemi, perubahan dinamika geopolitik, dan kesenjangan sosial-ekonomi yang beragam, terdapat kebutuhan mendesak bagi para pembuat kebijakan, pemerintah, dan masyarakat untuk membangun ketahanan masyarakat yang berkelanjutan. Pandemi Covid-19 yang melanda dunia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa rentannya masyarakat kita. Ancaman penyakit-penyakit tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada sistem pelayanan kesehatan, kondisi perekonomian, dan aspek pendidikan masyarakat.

Pandemi ini telah membuka dampak yang tidak proporsional terhadap kelompok rentan. Pandemi menyingkap dampak yang berbeda terhadap perempuan dan laki-laki, dan makin menekankan kenyataan yang memprihatinkan bahwa

perempuan memiliki kesempatan yang terbatas untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan kebijakan terkait dengan respons dan pemulihan pandemi jika dibandingkan dengan laki-laki. Berdasarkan data UN-Women, Covid-19 mendorong sekitar 47 juta perempuan dan anak perempuan ke dalam kemiskinan ekstrem dan makin memperlebar kesenjangan kemiskinan gender. Akibat pandemi ini, perempuan berisiko mengalami berbagai masalah seperti pengangguran dan bahkan kekerasan berbasis gender.¹

Ketika PBB menetapkan kesetaraan gender sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (tercantum dalam Tujuan 5: Kesetaraan Gender), hal ini seharusnya menjadi angin segar bagi perempuan dan anak perempuan untuk memiliki akses dan peluang yang setara dalam seluruh aspek kehidupan sosial. Namun, studi terbaru menyatakan bahwa dibutuhkan waktu 286 tahun untuk mencapai kesetaraan gender dan menghapus diskriminasi berbasis gender; 140 tahun untuk keterwakilan perempuan yang setara dalam posisi berkuasa; dan setidaknya 40 tahun untuk mencapai kesetaraan gender di parlemen nasional.²

Potensi Perempuan

Penting juga untuk mengakui dan memperkuat potensi kepemimpinan perempuan dalam kegiatan sosial, termasuk

1 UN Women, (2020, 2 September), "Press release: COVID-19 will widen poverty gap between women and men, new UN Women and UNDP data shows", <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/8/press-release-covid-19-will-widen-poverty-gap-between-women-and-men>.

2 United Nations, (2022), "Gender equality can't wait – we must achieve it now for current and future generations", <https://www.un.org/en/desa/we-must-achieve-it-now-current-and-future-generations>.

Hasil Studi Kesetaraan Gender

5^{Gender}
Equality



Dibutuhkan waktu 286 tahun untuk mencapai kesetaraan gender dan menghapus diskriminasi berbasis gender.



140 tahun untuk keterwakilan perempuan yang setara dalam posisi berkuasa.



Setidaknya 40 tahun untuk mencapai kesetaraan gender di parlemen nasional.

Sumber: Diolah dari United Nations, 2022

dalam aspek ekonomi, karena perempuan bisa berpartisipasi dengan tangguh meskipun menghadapi banyak tantangan. Di Asia Tenggara diperkirakan 78 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dimiliki dan dijalankan oleh perempuan, dan berperan sebagai pendorong utama inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Peran ini sangat nyata dalam mendukung perekonomian negara di masa pandemi.

Parlemen merupakan institusi paling strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender. Hal itu karena parlemen, khususnya negara-negara yang menganut sistem politik

demokrasi, merupakan institusi yang paling menentukan dalam perumusan kebijakan publik melalui mandat konstitusional yang dipegangnya: legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kontribusi parlemen (DPR) sangat krusial dalam melahirkan banyak instrumen hukum dalam kerangka kesetaraan gender.

“ DPR RI melalui BKSAP secara konsisten bekerja memperjuangkan kesetaraan gender melalui diplomasi parlemen, baik secara bilateral maupun multilateral.

Sangat penting bagi negara-negara untuk mengarusutamakan perspektif gender dan penilaian risiko berbasis gender (*gender risks assessment*) dalam proses pengambilan keputusan mereka. Parlemen harus segera mengambil tindakan untuk mengadvokasi kebijakan responsif gender guna membekali perempuan menghadapi tantangan dalam berbagai aspek kehidupan. Masyarakat dengan keterwakilan politik dan kepemimpinan perempuan yang lebih besar cenderung menunjukkan tata kelola yang lebih baik, fokus yang lebih besar pada isu-isu sosial, dan peningkatan hasil kebijakan yang mengatasi kesenjangan berbasis gender. Pemberdayaan anggota parlemen perempuan dan peningkatan posisi kepemimpinan

politik perempuan akan menghasilkan kerangka legislatif yang lebih komprehensif, struktur pemerintahan yang responsif, dan proses pengambilan keputusan yang adil.

DPR RI melalui BKSAP secara konsisten bekerja memperjuangkan kesetaraan gender melalui diplomasi parlemen, baik secara bilateral maupun multilateral, baik di tingkat kawasan maupun global. Di berbagai forum antarparlemen, seperti di IPU, AIPA, APA, dan Women Political Leaders (WPL) Summit, Delegasi BKSAP secara konsisten menyampaikan pandangan untuk mengupayakan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Pada tahun 2021, Puteri Anetta Komarudin, yang merupakan anggota BKSAP, terpilih menjadi anggota Biro Parlemen Perempuan IPU (Bureau of Women Parliamentarians) untuk periode 2021–2025. Mandat dan kepercayaan yang diberikan DPR RI serta dukungan penuh dari 36 parlemen negara yang tergabung dalam biro ini menunjukkan keberpihakan dan perhatian yang serius dari parlemen terhadap peran dan kesejahteraan perempuan.

Pada Sidang Biro Parlemen Perempuan IPU ke-33 di Bali, 20–24 Maret 2022, Irine Yusiana Roba Putri, anggota BKSAP, ditunjuk sebagai ketua panel diskusi di forum tersebut yang berhasil mengadopsi dua resolusi. Kedua resolusi itu pada intinya adalah, *pertama*, desakan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual saat konflik dan pemenuhan hak-



BKSAP mendorong lebih banyak perempuan terlibat dalam bidang politik dan pengambilan keputusan serta ekonomi produktif.

hak para korban. *Kedua*, urgensi penanganan ketidaksetaraan terhadap akses internet dan optimalisasi TIK (teknologi informasi dan komunikasi) untuk pemberdayaan perempuan.

Selain dalam forum IPU, BKSAP juga bekerja sama dengan WPL mengelat *roundtable discussion* dalam format hibrida dengan tema “Generating Commitments to Build Forward“, pada 8 Juni 2021. Diskusi tersebut menghasilkan sejumlah pernyataan komitmen DPR untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, sebagai kontribusi

pemikiran DPR di forum WPL G20 di Roma, Italia, pada 29 Oktober 2021. Irine Yusiana Roba Putri juga mendapatkan mandat untuk menjadi WPL Country Ambassador yang bertugas sebagai kontak utama dalam kerja sama, konferensi, dan berbagai inisiatif WPL di negara asalnya, Indonesia.

Adapun pernyataan komitmen itu adalah, *pertama*, DPR bertekad memikul tanggung jawab konstitusional dalam merumuskan dan meningkatkan peraturan perundang-undangan dan APBN agar lebih pro kesetaraan gender serta melakukan pengawasan yang ketat dalam implementasinya. *Kedua*, mendukung penuh upaya global untuk mewujudkan kesetaraan gender, termasuk melalui Deklarasi dan Platform Aksi Beijing, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2030, dan Forum Kesetaraan Generasi.

Ketiga, secara aktif melakukan kerja sama dan kolaborasi yang erat dan berkelanjutan dengan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh media, dan lembaga-lembaga lain untuk bersama-sama mewujudkan kesetaraan gender dan upaya mengatasi diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan pada lingkup nasional, regional, dan global. *Keempat*, mengarusutamakan kesetaraan gender dalam legislasi dan anggaran nasional, masyarakat, konstituen, dan akar rumput, yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran publik bahwa partisipasi penuh kaum perempuan sangat penting untuk mendorong perdamaian yang berkelanjutan, kemakmuran, dan kesejahteraan.

Kelima, mendorong lebih banyak perempuan terlibat dalam bidang politik dan pengambilan keputusan serta ekonomi produktif, karena keterlibatan mereka dalam bidang-bidang tersebut akan menciptakan dampak yang lebih positif pada kesetaraan gender, sebab mereka memperjuangkan pemenuhan hak-hak dasarnya sendiri. *Keenam*, menyelaraskan penanganan pandemi dengan wawasan kesetaraan gender.

Ketujuh, membangun dan melanjutkan kemitraan dengan organisasi internasional terkait, termasuk badan-badan PBB dan LSM pada tingkat nasional dan global, dengan menekankan pada pemberdayaan perempuan dalam politik dan ekonomi untuk mendorong suatu pendekatan yang holistik dalam mendukung inklusi gender dan pemberdayaan perempuan.

Perlu dicatat juga partisipasi BKSAP untuk pertama kali di The Third Eurasian Women Forum (EAWF) 2021, di Kota St. Petersburg, Rusia, pada 13–15 Oktober 2021. Di forum tersebut, Delegasi BKSAP yang dipimpin oleh Dyah Roro Esti menekankan urgensi keterlibatan perempuan dalam pencapaian TPB, khususnya dalam mencapai Tujuan Nomor 5 mengenai Kesetaraan Gender.

Keterwakilan dalam Parlemen

Pada masa kepemimpinan DPR RI dalam AIPA pada tahun 2023, BKSAP secara berkesinambungan menyampaikan komitmennya untuk mendukung keterwakilan dan

kepemimpinan perempuan dalam parlemen dan ranah publik. Hal ini dapat dilihat dari usulan resolusi dan resolusi terkait pemberdayaan perempuan yang berhasil diadopsi pada Sidang AIPA ke-44 di Jakarta. Resolusi usulan Indonesia menyatakan pentingnya keterwakilan substantif perempuan dalam parlemen, sehingga pengarusutamaan isu kesetaraan gender dapat menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan, perencanaan anggaran, dan pengawasan kebijakan di level nasional.

Delegasi BKSAP juga mendesak agar lebih banyak peserta anggota parlemen laki-laki, atau yang lebih dikenal dengan istilah *male allies*, terlibat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Pelibatan laki-laki sebagai mitra merupakan langkah penting menuju kemajuan sejati. BKSAP menegaskan bahwa anggota parlemen laki-laki tidak hanya harus dilibatkan, tetapi mereka juga harus berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pemenuhan hak perempuan karena manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat. Delegasi BKSAP melihat urgensi penerapan upaya yang lebih kuat dari seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat nasional, regional, maupun global dengan peran sentral parlemen, terutama melalui peran parlemen perempuan.



17

Generasi muda memiliki potensi luar biasa untuk berkontribusi di dunia. Foto: vecteezy

Pemuda, Politik, dan Kebijakan Publik

Populasi generasi muda yang berusia antara 15 tahun dan 24 tahun secara global mencapai 1,2 miliar orang atau seperempat jumlah penduduk dunia saat ini.¹ Meskipun demikian, anggota parlemen yang berusia di bawah 30 tahun hanya mencapai 2,86% dan jumlah anggota parlemen berusia di bawah 45 tahun hanya mencapai 31,77% dari total populasi dunia.²

Generasi muda memiliki potensi luar biasa untuk berkontribusi di dunia dan mereka juga memiliki komitmen kuat terhadap kesetaraan, aksi iklim, dan hak asasi manusia. Mereka sangat peduli dengan perubahan transformasional yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara, adil, dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda adalah

1 UN, (2023), "Global Issues: Youth", <https://www.un.org/en/global-issues/youth#:~:text=Today%2C%20there%20are%201.2%20billion,cent%2C%20to%20nearly%201.3%20billion.>

2 IPU, (2024), "Youth participation", [https://www.ipu.org/impact/youth-participation.](https://www.ipu.org/impact/youth-participation)

warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Menurut data hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui bahwa total populasi pemuda Indonesia mencapai 23,18% atau sekitar 64,16 juta jiwa.³

Ada benang merah yang sejatinya menjadi perhatian bersama, bahwa hampir seperempat penduduk Indonesia adalah kelompok muda atau produktif. Namun, unggul secara kuantitas tidak bermakna apa pun manakala tidak memberikan kontribusi positif bagi transformasi dan kemajuan masyarakat. Alih-alih menjadi pembawa perubahan (*agent of change*), kelompok muda malah menjadi beban masyarakat. Terkait hal tersebut, DPR RI melalui BKSAP terus mendorong *engagement* kelompok muda dalam politik dan perumusan kebijakan publik.

Saat perhelatan Sidang Umum ke-144 IPU di Bali, 20–24 Maret 2022, ketika memimpin sidang Forum of Young Parliamentarians, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan bahwa suara pemuda harus didengar dan diberi kesempatan membawa perubahan pada dunia, termasuk terkait perubahan iklim. Bahkan, penanganan perubahan iklim itu sendiri, menurut Puan, merupakan upaya untuk mewariskan dunia yang lebih baik bagi generasi penerus.

3 Badan Pusat Statistik, (2023), “Statistik Pemuda Indonesia 2023”, <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/29/18781f394974f2cae5241318/statistik-pemuda-indonesia-2023.html>.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemuda G20 atau Y20 Summit 2021 di Italia, yang diselenggarakan pada 19–23 Juli 2021 secara daring, Delegasi BKSAP yang dipimpin legislator muda Puteri Anetta Komarudin berhasil meloloskan tiga proposal prioritas Indonesia untuk topik “Inklusi dan Kesetaraan Kesempatan bagi Kelompok Muda“. Tiga proposal prioritas yang diusung BKSAP dan telah menjadi bagian dari rekomendasi KTT tersebut adalah, *pertama*, untuk isu inklusi finansial, menekankan urgensi literasi finansial dan pengadopsian agenda *fintech* untuk memastikan ekosistem keuangan yang aman dan adil bagi masyarakat.

Kedua, untuk isu inklusi di bidang pendidikan, mendorong tercapainya kesetaraan untuk memperoleh pendidikan digital yang berkualitas melalui penguatan infrastruktur, pelatihan bagi tenaga pendidik, serta kurikulum pembelajaran jarak jauh. *Ketiga*, untuk isu inklusi di bidang politik, mendorong negara G20 untuk menerapkan kebijakan yang bertujuan mendukung partisipasi pemuda di bidang politik dan mencalonkan diri dalam pemilihan umum, terutama dengan ditetapkannya suatu kuota bagi pemuda.

Parlemen Remaja dan Pendidikan Politik

Delegasi BKSAP juga mendukung penuh poin-poin strategis lain yang ditetapkan Y20 Summit 2021. Di antaranya, jaminan terpenuhinya akses pemuda dalam bidang ketenagakerjaan dengan menyediakan berbagai infrastruktur pendukung karier di sekolah dan komunitas, kesetaraan bagi pemuda

golongan rentan dalam berkarier, kesetaraan dalam pelayanan dasar, termasuk dengan mengatasi kesenjangan digital antara komunitas perkotaan dan komunitas perdesaan, pengalokasian anggaran senilai 0,7% dari PDB untuk memperkuat masyarakat sipil, kerangka HAM, dan inklusivitas pada tahun 2030.

Sebelumnya, pada pertemuan yang menjadi bagian dari rangkaian proses negosiasi *pre-summit*, Puteri menjelaskan isu-isu prioritas dari delegasi Indonesia untuk dimuat dalam kesepakatan akhir, terutama terkait hal inklusi pemuda di bidang politik. Ketika itu BKSAP mendesak pemerintah negara-negara anggota G20 agar berinisiatif mengarusutamakan perwakilan pemuda di dunia politik, terutama melalui suatu kuota tertentu, baik di parlemen maupun keanggotaan partai.

Pada kesempatan lain, Puteri menyampaikan dukungannya atas inisiasi pembentukan Young Parliamentarians of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) atau Parlemen Muda AIPA sebagai platform representasi dan keterlibatan aktif pemuda parlemen untuk membangun masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Dukungan itu diungkapkan Puteri, yang menjadi anggota Delegasi DPR RI, saat mengikuti Sidang Umum ke-41 AIPA, 8–10 September 2020, yang diselenggarakan dari Vietnam secara virtual.

Pada pertemuan tersebut disampaikan bahwa, sejak 2008, DPR RI telah meluncurkan Program Parlemen Remaja yang bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada

generasi muda. Selain itu, pada DPR RI periode 2019–2024 tercatat anggota DPR RI yang berusia 21–40 tahun dari delapan partai politik telah sepakat untuk bersama-sama membentuk Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPi) yang jumlahnya mencapai 16,52% dari total 575 anggota DPR RI.

“ BKSAP mendesak pemerintah negara-negara anggota G20 agar berinisiatif mengarusutamakan perwakilan pemuda di dunia politik, terutama melalui suatu kuota tertentu, baik di parlemen maupun keanggotaan partai.

Lebih lanjut, untuk mendukung pembentukan Forum Parlemen Muda AIPA, Puteri mendorong AIPA agar membentuk kelompok kerja yang bertugas menyiapkan pembentukan kelembagaan forum dan menyelenggarakan studi kelayakan terkait hal tersebut. Puteri menegaskan, agar pemuda parlemen dapat menciptakan resolusi yang lebih berdaya guna, maka keberadaannya perlu segera dilembagakan dan disahkan. Menurut Puteri, keberadaan parlemen muda merepresentasikan hampir 220 juta pemuda ASEAN, dan oleh karena itu, sudah seharusnya mereka menyuarakan aspirasi serta berkontribusi aktif untuk membangun masyarakat ASEAN.

Penting dicatat, delegasi Indonesia pada kesempatan tersebut berhasil memasukkan klausul pembentukan *ASEAN Youth Development Index* sebagai bagian dari resolusi keterlibatan parlemen muda AIPA dalam membangun masyarakat ASEAN, yang diadopsi pada akhir Sidang Umum, 10 September 2020. Indeks itu sendiri sangat penting sebagai instrumen untuk mengukur perkembangan pembangunan pemuda di ASEAN. Dengan disetujuinya indeks ini, maka negara anggota ASEAN kini dapat menunjukkan komitmennya untuk melibatkan pemuda dalam pembangunan, baik domestik maupun regional.

Sebagai lanjutan perjuangan pemuda di forum parlemen ASEAN, akhirnya pada Sidang Umum AIPA ke-44, tahun 2023, di Jakarta, di bawah keketuaan Indonesia, forum secara resmi mengukuhkan terbentuknya Komite Khusus Parlemen Muda ASEAN. Dalam sidang perdana, Komite Pemuda juga berhasil mengadopsi sejumlah resolusi yang menitikberatkan pada peran pemuda dalam pembangunan, ekonomi, dan partisipasi demokratis. Selain itu, ada resolusi yang memperkuat representasi dan peranan pemuda dalam pembuatan kebijakan di parlemen. Hal ini dapat menjadi titik tolak bagi peningkatan kapasitas pemuda dan juga akses dalam keterwakilan pemuda di kancah politik di Kawasan Asia Tenggara pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya.

Sementara itu, anggota muda BKSAP lainnya, Dyah Roro Esti, didapuk menjadi moderator dalam rapat virtual The 3rd

Global Young MP Initiative Meeting “Innovations to Eliminate Learning Poverty”, yang diselenggarakan oleh World Bank pada 14 April 2022. Dyah didampingi anggota muda lainnya, yaitu Gilang Dhielafararez dan Irine Yusiana Roba Putri. Forum yang disponsori Bank Dunia itu dimaksudkan untuk menghimpun anggota parlemen berusia 40 tahun ke bawah dari seluruh dunia untuk belajar tentang tantangan pembangunan yang paling mendesak dan berbagi strategi untuk mengatasinya. Mereka diundang World Bank untuk berpartisipasi dalam diskusi yang membahas mengenai kemiskinan dan sektor pendidikan, terutama di tengah pandemi, yang di beberapa negara akses pendidikannya sangat terbatas.

Sebagai tambahan, Dyah Roro Esti juga terpilih menjadi anggota Forum of Young Parliamentarians IPU untuk periode 2021–2025 mewakili Indonesia dan juga Kawasan Asia Pasifik. Forum ini bertugas untuk memastikan suara kaum muda didengar dalam pengambilan keputusan politik global melalui partisipasi yang lebih besar dari anggota parlemen muda dan melalui masukan formal terhadap hasil-hasilnya. Hal ini juga memastikan adanya perspektif pemuda dalam semua pekerjaan parlemen dan membangun jembatan dengan organisasi luar.



18

A person in a dark suit is shown from the chest down, holding a glowing blue digital interface or screen. The background is a blurred cityscape at night with lights and buildings. The number '18' is prominently displayed in the upper right corner.

Dunia digital terus bertransformasi sangat cepat dengan memunculkan *machine learning*, *nonfungible token (NFT)*, *blockchain*, *crypto*, dan *metaverse*. Foto: vecteezy

Transformasi Digital

Sebelum membicarakan perihal transformasi digital, perlu dijelaskan sekilas latar belakang yang mendasari kemunculan digitalisasi. Digitalisasi merupakan pencapaian yang dihasilkan dari proses industrialisasi yang berkembang tahap demi tahap, mulai dari revolusi industri pertama, kedua, ketiga, hingga keempat. Pada revolusi industri keempat inilah, teknologi digital berkembang dengan pesat.

Revolusi industri pertama dimulai di Inggris pada abad ke-18, yang didorong mekanisasi peralatan manufaktur. Mesin bertenaga air dan uap memungkinkan lompatan produktivitas pada industri tekstil dan industri lainnya. Revolusi industri kedua dimulai menjelang memasuki abad ke-20, yang ditandai produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Produsen beralih ke tenaga listrik yang dihasilkan bahan bakar fosil dan pabrik menjadi jauh lebih besar. Revolusi industri kedua ini dicontohkan oleh produksi mobil Ford Motor Company.

Revolusi Digital

Revolusi industri ketiga dimulai pada 1970-an yang melibatkan teknologi elektronik. Pada tahap ini, produsen menggunakan

teknologi robot untuk mengotomatisasi beberapa proses manufaktur. Dampaknya adalah lompatan yang signifikan dalam produktivitas. Selama waktu inilah manufaktur Jepang menjadi terkenal di seluruh dunia. Adapun revolusi industri keempat (4.0) ditandai dengan aktivitas menciptakan siklus data, informasi, dan pengetahuan, dengan semua jenis data dikumpulkan dan dibagikan di antara berbagai bidang dan organisasi. Industri 4.0 menggunakan data dengan cara yang melampaui kerangka kerja manufaktur tradisional.

Di tahap industri 4.0 ini, produsen mengumpulkan data setelah produk dijual. Praktik ini memungkinkan produsen untuk mengidentifikasi kebutuhan laten dari Big Data klien dan memperkuat jaringan nilai mereka, sehingga menciptakan peluang bisnis baru. Selain itu, dalam era industri 4.0 ini, nilai tambah diciptakan melalui kustomisasi massal dengan bantuan *artificial intelligence* (AI). Di tahap ini pula, kemudian muncullah apa yang kita kenal dengan revolusi digital.

Revolusi digital didorong oleh empat jenis teknologi yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan dampaknya terhadap ekonomi, yaitu, *pertama*, internet seluler. Di seluruh dunia, sekarang 60% dari semua trafik *online* berasal dari perangkat seluler. *Kedua*, teknologi *cloud*, yaitu koneksi yang lebih murah dan lebih cepat melalui internet yang telah memungkinkan lebih banyak daya komputasi untuk diakses dari jarak jauh. Pada tahun 2014, untuk pertama kalinya, lebih banyak beban kerja informasi

Revolusi Industri dari Era 1.0 hingga 4.0



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

diproses melalui *cloud* daripada di ruang TI tradisional. *Ketiga*, *internet of things* (IoT). Pada tahun 2015, tercatat 18,2 miliar perangkat terhubung ke internet. Pada tahun 2020, jumlah tersebut diperkirakan meningkat tiga kali lipat menjadi 50 miliar¹.

Perkembangan IoT, dan perangkat yang digunakan makin beragam, membutuhkan akses koneksi yang bisa mengakomodasi berbagai teknologi. Pada tahap inilah *broadband access aggregation* dibutuhkan. *Broadband access aggregation* adalah cara untuk membuat koneksi di antara berbagai teknologi yang meliputi ISDN, DSL, kabel, Ethernet, dan perangkat nirkabel bisa dilakukan terhadap *virtual private networks* (VPN) perusahaan, aplikasi pihak ketiga, dan

¹ McKinsey & Company, (2016), "Unlocking Indonesia's Digital Opportunity", https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Locations/Asia/Indonesia/Our%20Insights/Unlocking%20Indonesias%20digital%20opportunity/Unlocking_Indonesias_digital_opportunity.ashx.

internet. Dengan begitu, permintaan pelanggan akan layanan berkecepatan tinggi, termasuk *game* multipemain, *video-on-demand*, sistem keamanan rumah, audio digital, *video streaming*, dan banyak aplikasi lainnya yang membutuhkan IP untuk mengaksesnya bisa terlayani, apa pun media aksesnya.² Karena itu, sistem akses agregasi makin berkembang.

Menurut International Telecommunication Union (ITU), pada tahun 2022 trafik internet yang digunakan *end user* melalui seluler dan *fixed broadband* telah memungkinkan untuk melakukan komputasi agregasi global dan regional. Antara tahun 2019 dan 2023, trafik seluler dan *fixed broadband* diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 30%, dengan tingkat pertumbuhan puncak pada awal pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pertumbuhan trafik pascapandemi melambat antara tahun 2021 dan 2022. Trafik *mobile broadband* meningkat sebesar 22%, sedangkan *fixed broadband* meningkat sebesar 10%.³

Kesenjangan Digital

Hingga akhir 2023, sekitar 67% populasi dunia, atau 5,4 miliar orang, bisa *online*. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,7% dibanding tahun 2022. Adapun pada tahun 2022 pertumbuhannya 3,5% dibanding pada tahun 2021.⁴ Berdasarkan riset Bain, Google, and Temasec

2 Cisco.com, (n.d.), "Chapter: Understanding Broadband Access Aggregation", <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/bbds/configuration/15-mt/ir-15-mt-book/bba-understanding.html>.

3 International Telecommunication Union, (2023), "Facts and Figures 2023: Internet Traffic", <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2023/10/10/ff23-internet-traffic/>.

4 International Telecommunication Union, (2023), "Facts and Figures 2023: Internet Use", <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2023/10/10/ff23-internet-use/>.

dalam *e-Conomy SEA 2021*, di Asia Tenggara, 30% pengguna digital saat ini baru bergabung selama pandemi Covid-19. Sebanyak 90% di antaranya menyatakan keinginan untuk terus menggunakan platform digital, bahkan setelah pandemi mereda. Dunia digital juga terus bertransformasi sangat cepat dengan kemunculan, antara lain, *machine learning*, *non-fungible token* (NFT), *blockchain*, *crypto*, dan *metaverse*.⁵

Di satu sisi, pandemi berdampak sangat positif dalam mengakselerasi transformasi digital dan diharapkan mengurangi kesenjangan digital. Namun, di sisi lain, tatanan global menghadapi tantangan yang kian meruncing karena kesenjangan digital sebagai dampak akselerasi digital yang tidak inklusif. Padahal, transformasi digital dipercaya sebagai salah satu kunci dalam upaya pemulihan bersama pascapandemi Covid-19. Pada masa pandemi, digitalisasi perekonomian berkembang sangat pesat. Mereka yang beradaptasi dengan memanfaatkan digitalisasi terbukti mampu bertahan di masa pandemi dan dalam persaingan global.

Ketersediaan akses internet yang dapat diandalkan dan terjangkau adalah landasan bagi terciptanya transformasi digital. Literasi digital dan keamanan dalam menggunakan platform internet memainkan peran penting untuk mendukung transformasi digital. Oleh karena itu, pembuat kebijakan, pemerintah, dan operator sistem elektronik bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan *online* yang aman, sementara

5 Google, Temasek and Bain, (2021), "e-Conomy SEA 2021", <https://www.bain.com/insights/e-conomy-sea-2021/>.

pengguna harus memiliki kemampuan untuk menavigasi lingkungan *online* tersebut dengan bijak. Namun, ada sekitar 73,7 juta orang di Indonesia, atau 26,3% dari total penduduk, tidak menggunakan internet. Lebih dari 12.500 desa dan 104.000 sekolah di seluruh Indonesia masih belum memiliki akses internet pada tahun 2022.⁶ Kesenjangan literasi digital yang cukup menonjol ini disebabkan oleh variabel seperti tingkat penghasilan, tingkat pendidikan, gender, dan usia.

Inklusi Digital

Menyoroti kesenjangan digital baik di level nasional maupun global, BKSAP di berbagai forum antarpallemen terus menyuarakan urgensi mengatasi kesenjangan tersebut. Pada pertemuan The 29th Annual Meeting of The Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF) yang diselenggarakan di Seoul, Korea Selatan, pada 13–15 Desember 2021, Ketua Delegasi BKSAP DPR RI Yohanis Fransiskus Lema mendukung penguatan kerja sama internasional untuk ketahanan ekonomi yang lebih besar dan pemulihan ekonomi yang inklusif serta percepatan ekonomi digital dan peningkatan konektivitas. Ditekankan bahwa dukungan untuk kerja sama yang lebih luas, advokasi kesadaran tentang manfaat masyarakat digital, serta pendidikan dan inklusi digital diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan literasi digital.

Pada Sidang Umum IPU ke-144 di Bali, 20–24 Maret 2022, delegasi Indonesia menekankan perlunya inklusi digital dalam

6 Felippa Amanta, (2022, 15 Juli), "Unpacking Indonesia's Digital Accessibility", CIPS, <https://www.cips-indonesia.org/post/opinion-unpacking-indonesia-s-digital-accessibility>.



Pemanfaatan teknologi digital dapat bertindak sebagai katalis untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Foto: knstek.com

kaitannya dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya sektor pendidikan. Menurut Wakil Ketua BKSAP DPR RI Achmad Hafisz Tohir, Delegasi DPR RI saat mengikuti sidang Standing Committee on Sustainable Development mengusulkan sebuah draf resolusi ihwal pemanfaatan TIK sebagai pendorong di sektor pendidikan, termasuk pada masa pandemi, sebagai bagian dari resolusi pembangunan berkelanjutan. Beberapa usulan lain yang diajukan adalah mengenai prioritas dalam aspek ketersediaan, aksesibilitas, dan keterjangkauan infrastruktur digital, serta bagaimana memastikan lingkungan daring yang aman, kondusif, dan tidak diskriminatif.

Selain penekanan di sektor pendidikan, BKSAP juga menyuarakan urgensi inklusi digital di sektor ekonomi dan keuangan dalam kerangka gender. Pada sesi Women Parliamentarians of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (WAIPA) yang dihelat secara virtual pada 23 Agustus 2021, Anggota BKSAP DPR RI Arzeti Bilbina menilai pentingnya pemberdayaan ekonomi perempuan melalui inklusi digital dan keuangan pascapandemi. Menurut Arzeti, pemanfaatan teknologi digital dapat bertindak sebagai katalis untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, digitalisasi diharapkan menjadi solusi efektif untuk pemberdayaan perempuan. Pada sesi tersebut, Delegasi DPR RI juga menyerukan penguatan inklusi digital secara aktif bagi UMKM untuk diadopsi sebagai bagian dari resolusi AIPA.

Pada Keketuaan Indonesia dalam AIPA tahun 2023, melalui Sidang Umum AIPA ke-44, DPR RI ikut mendukung terciptanya transformasi digital yang setara untuk setiap elemen masyarakat seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat rentan. Parlemen, dengan fungsi legislasinya, didorong untuk menyediakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi transformasi digital, inovasi, dan alih teknologi yang memberikan kebermanfaatn bagi pembangunan nasional.

Transformasi Digital di DPR

Delegasi BKSAP DPR RI berpartisipasi mencari solusi bersama parlemen dunia yang tergabung dalam IPU pada KTT

Komite Masa Depan Dunia (Summit of the Committees of the Future) di Montevideo, Uruguay, pada 25–27 September 2023. Ketua BKSAP DPR RI Dr. Fadli Zon, yang menjadi salah satu panelis utama dalam pleno bertema “Challenges in Parliamentary Work in an Era of Change”, berbagi pandangannya terkait strategi parlemen untuk merangkul masa depan dan mengatasi tantangan teknologi baru melalui kerja sama internasional.

“ Digitalisasi diharapkan menjadi solusi efektif untuk pemberdayaan perempuan. Pada sesi tersebut, Delegasi DPR RI juga menyerukan penguatan inklusi digital secara aktif bagi UMKM untuk diadopsi sebagai bagian dari resolusi AIPA.

Menyoroti tantangan utama dalam mengintegrasikan teknologi dalam kerja-kerja parlemen, Fadli Zon menekankan pentingnya memupuk budaya integritas dan perubahan struktural di dalam lembaga legislatif untuk memfasilitasi adopsi sistem baru dan inovasi teknologi. Menggarisbawahi pentingnya pengembangan kapasitas, ia juga memaparkan bahwa masih ada kekurangan dalam keterampilan digital, pengetahuan teknis, dan literasi informasi dalam parlemen. Oleh karena itu, penting bagi parlemen untuk memanfaatkan

potensi teknologi secara efektif melalui dukungan sumber daya dan pengetahuan teknis.

Untuk terus mendukung keterbukaan kelembagaan di ranah digital, BKSAP bersama Sekretariat Open Parliament Indonesia (OPI) telah melakukan berbagai upaya penguatan transformasi digital dalam lembaga DPR. Beberapa area perubahan ini, di antaranya, mendukung modernisasi proses penyusunan legislasi, publikasi informasi publik, partisipasi publik, dan juga menyosialisasikan isu-isu teknologi terkini parlemen dunia. Dalam mendukung upaya transformasi ini, BKSAP, melalui Sekretariat OPI bersama Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) DPR RI, telah membangun kemitraan bersama berbagai organisasi internasional yang memiliki fokus pada bidang teknologi informasi.

Salah satu mitra utama dalam bidang teknologi parlemen adalah Bússola Tech. Bússola Tech adalah organisasi global yang berupaya mempromosikan modernisasi kelembagaan dan transformasi digital dalam ekosistem legislatif, melalui diplomasi dan kerja sama parlemen. Organisasi yang juga merupakan mitra IPU dalam bidang transformasi digital ini menyediakan platform kerja sama antar-lembaga legislatif dan kolaborasi antar-pegawai negeri di legislatif, staf parlemen, dan anggota parlemen, dengan partisipasi organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta.

Sejak 2022, Indonesia telah aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, khususnya LegisTech Forum yang menyediakan ruang bagi seluruh pemangku kepentingan parlemen untuk berbagi praktik terbaik, membentuk gagasan pengembangan teknologi legislasi dan data, dan sosialisasi inovasi teknologi termutakhir. LegisTech Forum dihadiri oleh berbagai penggerak teknologi dan informasi instansi parlemen di seluruh dunia, beserta akademisi, ahli, dan sektor swasta yang bekerja dalam bidang teknologi legislasi, hukum, dan data.

Dalam LegisTech Forum tahun 2022, topiknya berfokus pada standardisasi data legislasi. Sementara itu, pada tahun 2023, topik LegisTech Forum berfokus pada potensi pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam teknologi parlemen. Partisipasi Indonesia diwakili oleh Kepala Pustekinfo.



19

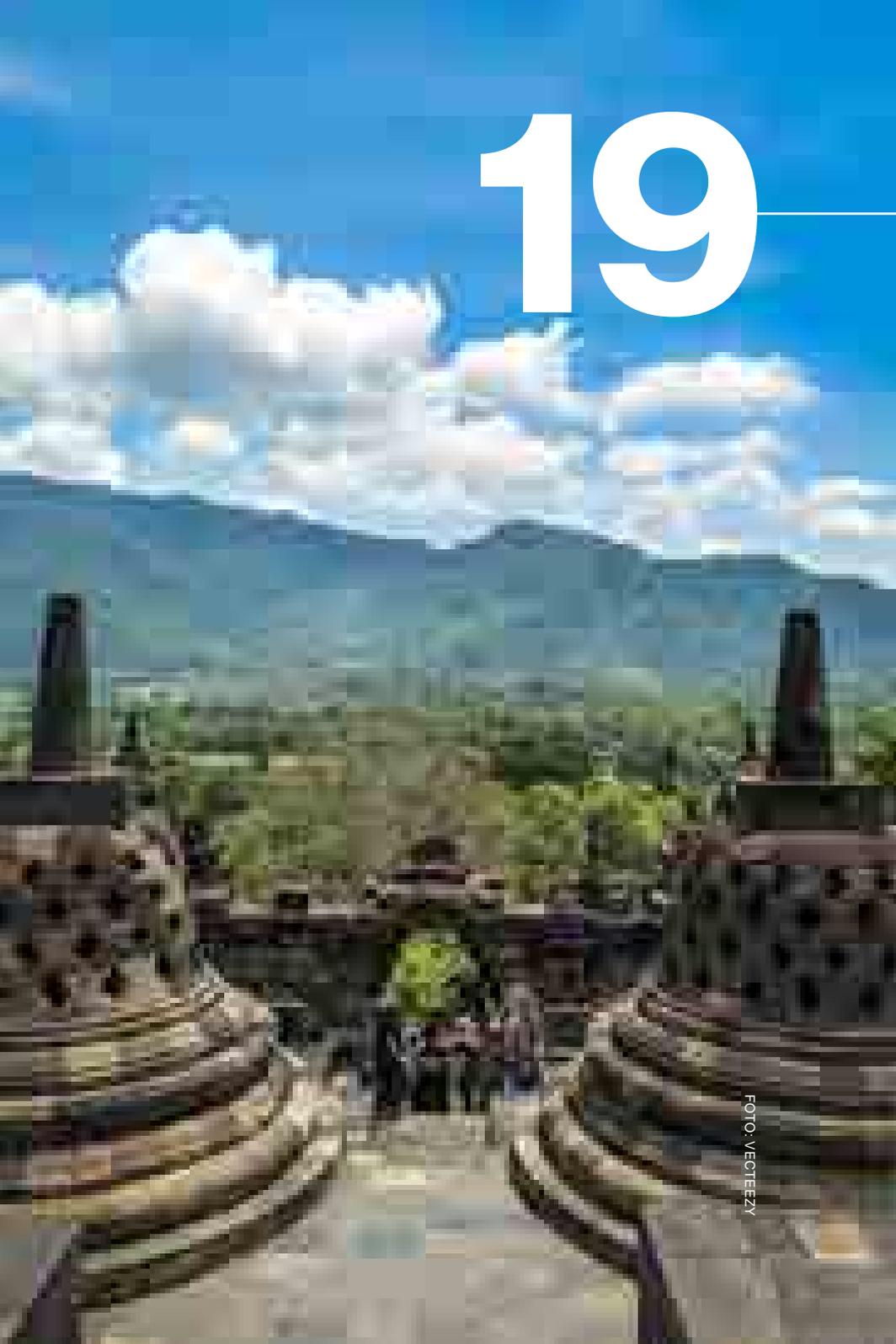


FOTO: VECETEZY

Pelestarian Budaya

Diplomasi budaya merupakan bentuk diplomasi publik dan *soft power*. Ia meliputi pertukaran ide, informasi, seni, bahasa, dan aspek lain dari budaya antarbangsa. Tujuannya, menghadirkan rasa saling pengertian. Diplomasi budaya juga sebagai identitas untuk mempererat hubungan, meningkatkan kerja sama sosial-budaya, serta mempromosikan kepentingan nasional. Indonesia sendiri, dengan keanekaragaman suku bangsa, memiliki seni budaya yang unik dan cenderung berbeda satu sama lain. Hal tersebut menjadi kekuatan Indonesia dalam pergaulan antarbangsa di panggung internasional.

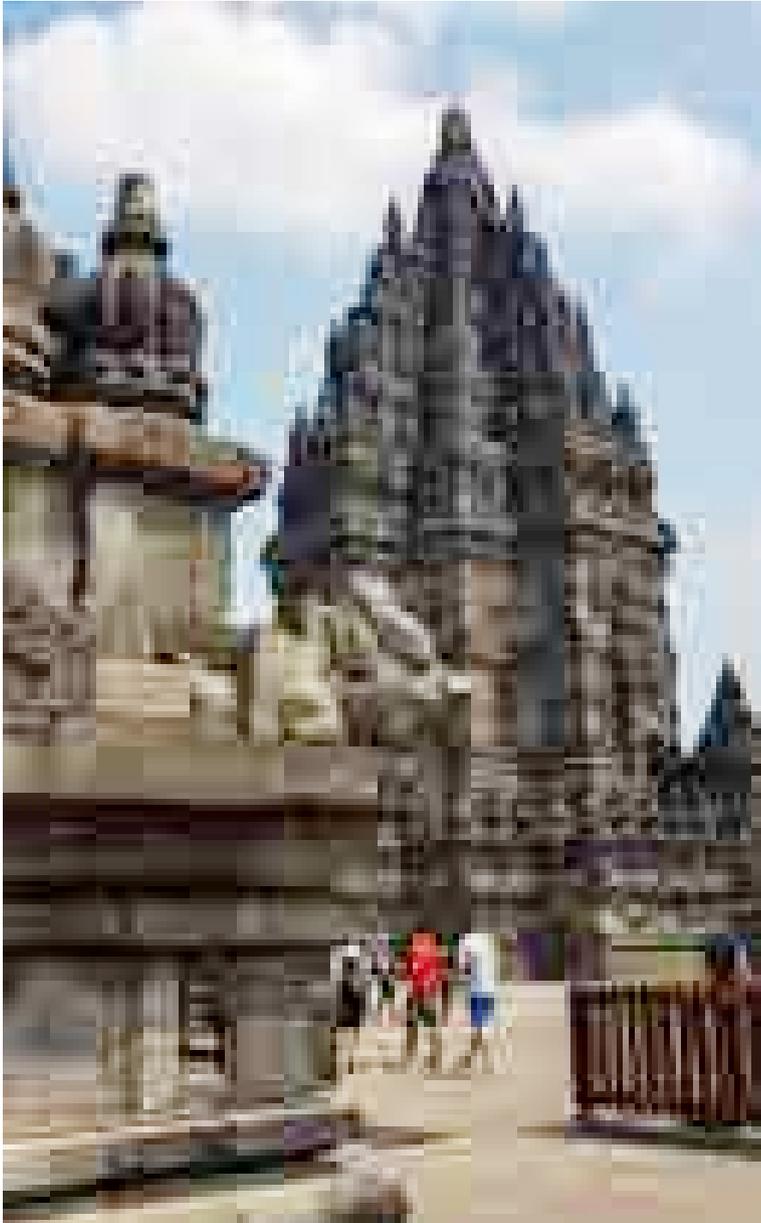
UNESCO telah mencatat sejumlah warisan budaya asli bangsa Indonesia yang sudah secara resmi diakui oleh dunia. Warisan budaya Indonesia yang diakui dunia, di antaranya, pencak silat, angklung, Perahu Pinisi, Tari Saman, noken, keris, Tari Bali, batik, wayang kulit, gamelan, subak, sekaten, pantun, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Situs Manusia Purba Sangiran, dan Taman Nasional Lorentz.

Indonesia, melalui BKSAP DPR RI, memandang bahwa memopulerkan bahasa Indonesia-Melayu di kancah internasional adalah sesuatu yang patut diperjuangkan. Sebagai upaya bersama untuk mendorong penguatan identitas kawasan, langkah politik untuk memasyarakatkan penggunaan bahasa Indonesia-Melayu diperlukan. Inisiatif politik itu dapat didorong dengan membentuk Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu (Parliamentary Association of Indonesia-Malay Speaking People).

Asosiasi parlemen tersebut dapat beranggotakan parlemen dari negara-negara yang menggunakan bahasa Melayu (dan variasinya) sebagai bahasa resmi, dan negara-negara yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Melayu (dan variasinya) sebagai bahasa pergaulan. Asosiasi ini juga dapat membuka hubungan pengamat dan dialog dengan parlemen-parlemen yang memiliki catatan sejarah perkembangan geografis dari bahasa Indonesia-Melayu.

Bahasa Melayu sendiri telah berkembang sebagai bahasa pengantar atau *lingua franca* di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-15. Jumlah penutur bahasa Melayu dan variasinya (termasuk bahasa Indonesia) kini diperkirakan mencapai lebih dari 300 juta orang¹ yang tersebar di beberapa negara, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, Thailand bagian selatan, dan sebagian kecil Filipina. Saat ini bahasa Indonesia (yang berakar dari bahasa Melayu) berada

1 Setiono Sugiharto, (2013, 18 September), "M. Sharifudin Yusop: Reviving Malay As a lingua franca", The Jakarta Post, <https://www.thejakartapost.com/news/2013/09/18/m-sharifudin-yusop-reviving-malay-a-lingua-franca.html>.



Candi Prambanan, salah satu warisan budaya Indonesia yang diakui dunia.

Foto: vecteezy

di posisi ke-10 sebagai bahasa dengan penutur terbanyak di dunia, sedangkan yang menduduki lima besar adalah Inggris (1,132 miliar), Mandarin China (1,117 miliar), Hindi (615 juta), Spanyol (534 juta), dan Prancis (280 juta).

Pada 20 November 2023, UNESCO secara resmi mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang dijadikan sebagai bahasa resmi Sidang Umum UNESCO bersama dengan bahasa Inggris, Prancis, Arab, China, Rusia, Spanyol, Hindi, Italia, dan Portugis. Keberhasilan Indonesia ini dapat dijadikan acuan atau tolok ukur bagi pengenalan dan penggunaan bahasa Indonesia-Melayu di forum-forum internasional.

Melalui asosiasi ini diharapkan tidak hanya melestarikan bahasa Indonesia-Melayu sebagai bagian dari sejarah, budaya, dan identitas bangsa, tetapi juga dapat mempromosikan bahasa Indonesia-Melayu di dunia internasional. Ke depannya, bahasa Indonesia-Melayu diharapkan dapat dijadikan sebagai bahasa kerja atau *working language* bagi ASEAN selain bahasa Inggris. Dalam kerangka asosiasi tersebut, BKSAP menghimpun masukan melalui diskusi bersama atau FGD (*focus group discussion*) dengan pihak-pihak terkait.

Sepanjang tahun 2023, Ketua BKSAP Fadli Zon melakukan upaya untuk mendapatkan dukungan dari parlemen negara-negara sahabat. Bahasa Indonesia sendiri mendapatkan posisi

strategis dalam pemerintahan dan Parlemen Timor Leste sebagai bahasa kerja. Pada pertemuan dengan Ramos Horta, Presiden Timor Leste itu menyampaikan bahwa Timor Leste mendukung usulan DPR RI untuk membentuk asosiasi ini.

Di lain kesempatan, Fadli Zon juga melakukan pertemuan dengan Ketua Dewan Rakyat Malaysia, Tan Sri Dato' Johari bin Abdul untuk membahas pembentukan Asosiasi Parlemen Berbahasa Indonesia-Melayu ini. DPR RI dan Dewan Rakyat Malaysia sepakat mengusulkan bahasa Indonesia-Melayu sebagai bahasa kerja di lingkungan ASEAN dan AIPA melalui pengajuan resolusi yang akan diujjahi pada Sidang Umum AIPA ke-45 di Laos, Oktober 2024. Ke depan, BKSAP DPR RI akan terus melanjutkan upaya menginternasionalisasi bahasa Indonesia di forum-forum internasional dan mengajak parlemen serta anggota parlemen negara-negara sahabat, seperti Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, Thailand, Australia, dan Inggris, untuk mendukung dan bergabung dalam upaya ini.



20

The background is a blurred photograph of a laboratory or medical environment. In the foreground, a person wearing a white lab coat and a stethoscope is partially visible. The background shows various pieces of equipment, including what appears to be a computer monitor or a control panel with a grid of buttons, and some glowing lights, possibly from a microscope or other diagnostic equipment. The overall color palette is dominated by cool blues and greys, with some warmer tones from the lights in the background.

FOTO: NETSCRIBES.COM

Keterbukaan Akses Kesehatan

Tidak dapat dimungkiri bahwa, setidaknya di level global, sejak tahun 2020 sektor kesehatan menjadi isu yang paling banyak mendapatkan perhatian. Hal itu terjadi karena merebaknya penyakit Covid-19 yang disebabkan virus corona baru SARS-CoV-2. Penyebarannya yang cepat dan mematikan menyebabkan WHO menetapkannya sebagai pandemi sejak Maret 2020. Setelah itu, seruan “*War against COVID-19 Pandemic*” digaungkan di seantero dunia. Berbagai kebijakan seperti *lockdown*, *social distancing*, *physical distancing*, dan *mobility restriction* pun diterapkan di hampir semua negara. Inti dari kebijakan tersebut adalah membatasi mobilitas masyarakat untuk mencegah penularan lebih lanjut.

Akan tetapi, hal itu justru menyulut implikasi yang sangat masif yang belum pernah terjadi sebelumnya (*unprecedented*) di era modern ini. Pandemi telah menjadi pukulan berat tidak hanya bagi sektor kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi serta memicu krisis multidimensi. Pandemi memberikan dampak besar pada kemiskinan dan kesenjangan global. Kemiskinan global meningkat secara drastis untuk pertama kalinya

dalam satu generasi, dan hilangnya pendapatan yang tidak proporsional di antara kelompok masyarakat yang kurang beruntung menyebabkan peningkatan kesenjangan yang dramatis di dalam dan antarnegara.

Menurut Bank Dunia, pada tahun 2020, pengangguran sementara meningkat di 70% negara di dunia bagi pekerja yang hanya lulusan pendidikan dasar. Hilangnya pendapatan juga lebih besar di kalangan pemuda, perempuan, wiraswasta, dan pekerja lepas dengan tingkat pendidikan lebih rendah. Perempuan, khususnya, terkena dampak hilangnya pendapatan dan pekerjaan karena mereka cenderung bekerja di sektor-sektor yang lebih mudah terkena dampak *lockdown* dan pembatasan sosial.¹

Angka kemiskinan yang tinggi karena pandemi memperbesar kesenjangan akses layanan kesehatan, termasuk vaksinasi. Lebih lanjut, pandemi menyingkap kekurangan aspek-aspek lain dari sektor kesehatan, seperti alokasi anggaran yang belum memadai, tindakan promotif dan preventif yang belum maksimal, sektor industri farmasi yang masih lemah, sektor fasilitas kesehatan yang masih minimalis, sistem jaminan kesehatan yang belum maksimal, dan SDM sektor kesehatan yang masih rendah.

Diplomasi Parlemen untuk Pandemi

Di banyak forum pertemuan antarparlemen kawasan dan global, Delegasi DPR RI secara konsisten menilai bahwa pandemi harus dilihat sebagai kesempatan dan momentum untuk mereformasi sektor kesehatan, baik di level nasional

1 World Bank, (2022), "Chapter 1. The economic impacts of the COVID-19 crisis", <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022/brief/chapter-1-introduction-the-economic-impacts-of-the-covid-19-crisis>.

maupun global. Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon, saat menghadiri Asia Pacific Parliamentary Forum on Global Health (APPPGH) secara virtual, pada 29 September 2020, mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan alarm bagi pentingnya pemenuhan Cakupan Kesehatan Universal atau UHC (Universal Health Coverage) sebagai bagian dari komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara global, yakni menuju seluruh penduduk dunia yang lebih sehat pada tahun 2030. Guna mewujudkan hal tersebut, kerja sama multilateral menjadi sangat penting untuk merealisasikan UHC di tengah pandemi Covid-19.

Pada sisi lain, Fadli Zon juga menegaskan bahwa UHC sudah menjadi keputusan politik. Oleh sebab itu, DPR RI dipastikan menjadi garda terdepan dalam upaya pencapaian UHC melalui keputusan politik. Diungkapkan juga bahwa pandemi Covid-19 merupakan momentum tepat untuk lebih fokus berinvestasi pada kesehatan. Lebih jauh Fadli menegaskan kembali urgensi kerja sama regional dan global dalam penanganan pandemi termasuk ketersediaan vaksin Covid-19 di masa mendatang. Ia menilai bahwa WHO harus mampu mengelola ketersediaan vaksin sehingga tidak boleh ada satu negara pun yang tertinggal.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti peran WHO dalam mengatasi kesenjangan antarnegara terkait pelayanan kesehatan termasuk penanganan pandemi Covid-19. Mardani juga mendorong WHO agar lebih proaktif mengorganisasi kerja sama multilateral dalam penanganan pandemi Covid-19.



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan global adalah seluruh penduduk dunia lebih sehat pada 2030. Foto: freepik

Pada kesempatan lain, tepatnya satu bulan setelah WHO menetapkan Covid-19 sebagai pandemi, BKSAP mengambil inisiatif menggelar webinar bertajuk “The Role of Parliament for International Cooperation to Defeat COVID-19” pada 21 April 2020. Pada perhelatan yang diikuti 130 peserta secara virtual dari berbagai kalangan itu, termasuk perwakilan dari negara-negara sahabat, Wakil Ketua BKSAP Charles Honoris menegaskan peran strategis diplomasi parlemen dalam menyiapkan kebijakan, informasi, dan praktik cerdas untuk menangani pandemi. Disampaikan juga, fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran parlemen yang sangat menentukan penanganan pandemi oleh pemerintah.

Sementara itu, Ketua DPR RI dalam sambutan pembuka di webinar itu mengingatkan bahwa pandemi hanya dapat

diselesaikan melalui kerja sama global. Di sisi lain, Fadli Zon, salah satu pembicara kunci di webinar itu, menyampaikan bahwa sejumlah anggaran di Indonesia telah dikucurkan dalam kerangka penanganan pandemi. Terkait hal tersebut, Fadli mengingatkan peran parlemen yang sangat penting dalam melakukan pengawasan dan menegaskan bahwa kebijakan apa pun untuk menangani pandemi harus dipastikan tidak melanggar hukum.

Hal lain yang juga menjadi komitmen DPR RI adalah pentingnya pemerataan vaksin secara global. Dalam kaitan itu, Ketua DPR RI menyampaikan pandangannya tentang urgensi pemerataan vaksin Covid-19 saat memimpin sesi *general debate* pada Sidang Umum IPU ke-143 di Madrid, Spanyol, 27 November 2021. Menurut Ketua DPR RI, distribusi vaksin saat itu masih belum merata di seluruh negara sehingga perlu diperhatikan. Pasalnya, pandemi tidak hanya memicu permasalahan sosial ekonomi, tetapi juga krisis kesehatan. Dunia, lanjut dia, harus bekerja sama untuk mencapai kesetaraan vaksin bagi semua orang dan di mana saja.

Urgensi pemerataan vaksin kembali disampaikan Ketua DPR RI pada Sidang Umum IPU ke-144 di Bali, 20–24 Maret 2022. Ia menilai vaksinasi adalah kunci bagi pemulihan ekonomi yang lebih cepat. Ia juga mengajak negara-negara di dunia agar mendorong akselerasi pemerataan vaksin global dengan harapan target vaksinasi 70% populasi dunia pada pertengahan 2022 tercapai.







BAGIAN

VITI

**BERSAHABAT,
BEKERJA SAMA, DAN
MENJANGKAU PUBLIK**

21



DPR RI periode 2019-2024
telah menetapkan misi
bilateral dengan 102 negara
sahabat. Foto: freepik

Peran Nyata GKSB

Misi diplomasi DPR RI yang dijalankan BKSAP tidak sekadar partisipasi aktif di forum-forum multilateral parlemen seperti IPU, PUIC, dan AIPA. Misi juga dijalankan secara aktif dengan merajut persahabatan secara bilateral dengan parlemen-parlemen negara lain. Jika di forum multilateral menghimpun banyak pihak, maka melalui mekanisme bilateral interaksi hubungan luar negeri terfokus kepada dua entitas negara saja. Dalam kaitan ini, dapat dipastikan bahwa mekanisme bilateral memiliki beberapa kelebihan, terutama dalam hal, *pertama*, eksplorasi potensi kerja sama dan, *kedua*, merumuskan titik kepentingan bersama yang termanifestasikan dalam bentuk kerja sama konkret.

Secara sederhana, kerja sama bilateral adalah hubungan antara dua negara dengan tujuan saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam konteks parlemen, kerja sama bilateral tersebut terwujud dalam pembentukan sebuah grup persahabatan antara dua parlemen, yang dalam terminologi DPR disebut dengan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB).

Misi 102 GKSB

Memanfaatkan ciri khas diplomasi parlemen yang lebih lentur dan longgar plus prinsip bebas aktif, DPR RI periode 2019–2024 telah menetapkan misi bilateral dengan 102 negara sahabat yang merupakan jumlah misi bilateral terbanyak sepanjang sejarah DPR. Namun, sebenarnya angka tersebut hanya separuh lebih sedikit dari total negara di dunia yang berjumlah 200 atau total anggota IPU yang mencapai 180 negara. Memang terdapat beberapa negara yang Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik lantaran prinsip konstitusi dan pertimbangan kepentingan nasional Indonesia yang lebih besar. Negara-negara itu adalah Israel, Taiwan, dan Kosovo. Namun, kesempatan DPR RI menjajaki dialog terbuka dengan ketiga negara tersebut terbuka lebar, terutama di sela-sela forum multilateral.

Risiko dari diplomasi DPR yang inklusif tersebut dinilai lebih rendah karena diplomasi parlemen tidak harus dimaknai diplomasi eksekutif. Diplomasi parlemen lebih menekankan representasi *people to people relations*. Level inklusivitas diplomasi DPR dapat dikatakan berada di posisi sangat cair setelah DPR juga menetapkan kebebasan misi diplomasi bagi 575 individu anggota DPR.

Daya jangkau dan jelajah diplomasi bilateral DPR dalam konteks ini telah jauh melampaui total negara di dunia. Inilah misi bilateral DPR yang sangat potensial. Tujuan

utamanya adalah lebih banyak merangkul sahabat daripada melihatnya sebagai musuh. Seribu kawan terlalu sedikit dan satu musuh terlalu banyak. *A thousand friends are too few, one enemy is too many.*

Alasan lain misi diplomasi bilateral DPR yang terlihat jumbo tersebut, seperti disampaikan Ketua BKSAP saat peresmian 102 GKSB di Gedung DPR pada 26 Februari 2020, adalah hasrat DPR menjalin kerja sama yang lebih luas dengan lebih banyak parlemen. DPR juga berharap “lebih banyak ruang dan waktu” untuk berdialog dan berbagi pengalaman terbaik secara lebih mendalam untuk berkontribusi lebih jauh dalam mewujudkan ketertiban, perdamaian, dan stabilitas dunia.

Menapaki awal bulan di tahun terakhir durasi kerja lima tahunan BKSAP, realisasi jangkauan 102 misi diplomasi bilateral DPR memang laksana jauh panggang dari api. Per Januari 2024, pencapaiannya hanya 26 ekspedisi misi diplomasi bilateral DPR dari 102 yang dicanangkan, atau sekitar 25%. Banyak faktor penghambat, terutama tentu saja karena era hibernasi sekitar dua tahun sebagai dampak dari pandemi. Kendatipun akan sulit menuntaskan misi tersebut, setidaknya rancangan misi diplomasi bilateral DPR ini telah menyampaikan pesan utamanya yaitu agar terus memperluas cakrawala relasi hubungan bilateral dalam kerangka merajut persahabatan dan bergandeng tangan dalam bekerja untuk membangun dunia yang lebih tertib, damai, adil, dan sejahtera.

Tiga Perspektif Bilateral

Setidaknya ada tiga perspektif yang menonjol dari puluhan ekspedisi¹ misi diplomasi bilateral DPR yang sudah terealisasi. *Pertama*, menyegarkan kembali dan memperkuat hubungan bilateral dengan negara mitra melalui kanal parlemen. Misalnya, hubungan bilateral dengan Suriah. Sejak konflik tahun 2011, tidak tercatat satu pun kunjungan resmi Indonesia ke Suriah sampai kemudian delegasi BKSAP DPR berhasil melakukan kunjungan ke Damaskus pada 16–17 Mei 2023. Parlemen Suriah sangat mengapresiasi kunjungan tersebut.

Pada kesempatan kunjungan bersejarah itu dibahas upaya peningkatan kembali kerja sama kedua negara yang mengalami penurunan. Terungkap pula dari kunjungan itu, sejumlah hal positif bagi kedua negara yaitu potensi Suriah sebagai destinasi religi bagi jamaah umrah Indonesia, harapan partisipasi Indonesia dalam rekonstruksi Suriah, sambutan sangat positif pasar Suriah terhadap produk Indonesia, dan harapan menghidupkan kembali Sidang Komisi Bersama antara Indonesia dan Suriah.

Kedua, tentu saja diplomasi bilateral DPR juga mengemban misi mengawal kepentingan nasional Indonesia di sektor-sektor vital yaitu politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ketika BKSAP menerima kunjungan Parlemen Uni Eropa di Gedung DPR, 21 Februari 2023, disampaikan kembali keberatan Indonesia mengenai pembatasan Uni Eropa terhadap produk kelapa sawit Indonesia dengan dalih deforestasi. Sebelumnya,

1 Ini mencakup kunjungan GKSB, diplomasi individu, dan pimpinan BKSAP.

pada 20 Juni 2023, BKSAP menerima Delegasi European Parliament's Committee on International Trade (INTA) di DPR. BKSAP saat itu menyampaikan butir-butir krusial, di antaranya, kegelisahan Indonesia terkait *European Green Deal*, terutama regulasi Uni Eropa mengenai deforestasi (EUDR). Regulasi tersebut dinilai akan berdampak pada biaya produksi dan secara tidak langsung akan merugikan pelaku UMKM, terutama petani dan *smallholder* lainnya.

Dijelaskan pula bahwa regulasi deforestasi Uni Eropa dapat menciptakan disrupsi rantai pasok sehingga akan merusak prinsip sistem perdagangan internasional yang berlandaskan keterbukaan, adil, dan anti-diskriminasi. Pada sisi lain, diterangkan bahwa kebijakan Uni Eropa terkait



Delegasi BKSAP dalam satu kunjungan diplomatik. Foto: freepik

mekanisme penyesuaian batas karbon perlu sejalan dengan aturan perdagangan internasional, terutama memastikan pemberlakuan yang sangat *fair* untuk mencegah hambatan perdagangan.

Sementara itu, ketika Delegasi GKSB DPR RI melakukan pertemuan dengan Majelis Syuro Arab Saudi, 2 Februari 2023, disampaikan bahwa selain sektor haji dan umrah sebagai prioritas kerja sama, sektor ekonomi juga harus diperhatikan. Delegasi DPR RI mengundang investor Arab Saudi untuk ikut membangun peternakan di Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mengingat potensi peternakan di NTB yang sangat menjanjikan karena daya dukung alam, sosial budaya, dan kearifan lokal. Lebih jauh dijelaskan bahwa diperlukan kesepahaman kedua negara untuk memudahkan kerja sama investasi dan ekspor-impor bagi produk-produk di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan untuk dapat masuk ke pasar Arab Saudi dengan jaminan kualitas produk halal.

Ketiga, misi ikut melaksanakan ketertiban dan perdamaian dunia juga merupakan misi penting yang dipikul delegasi bilateral DPR. Misi ini merupakan pengejawantahan peran *leading the others*. Di antara relasi bilateral yang dapat dijadikan torehan penting dalam konteks ini adalah tawaran Delegasi GKSB Palestina saat berdialog dengan Ketua Parlemen Palestina di Amman, Yordania, pada 24 Mei 2022. Disampaikan kepada Rawhi Ahmed Mohammed Fattou,

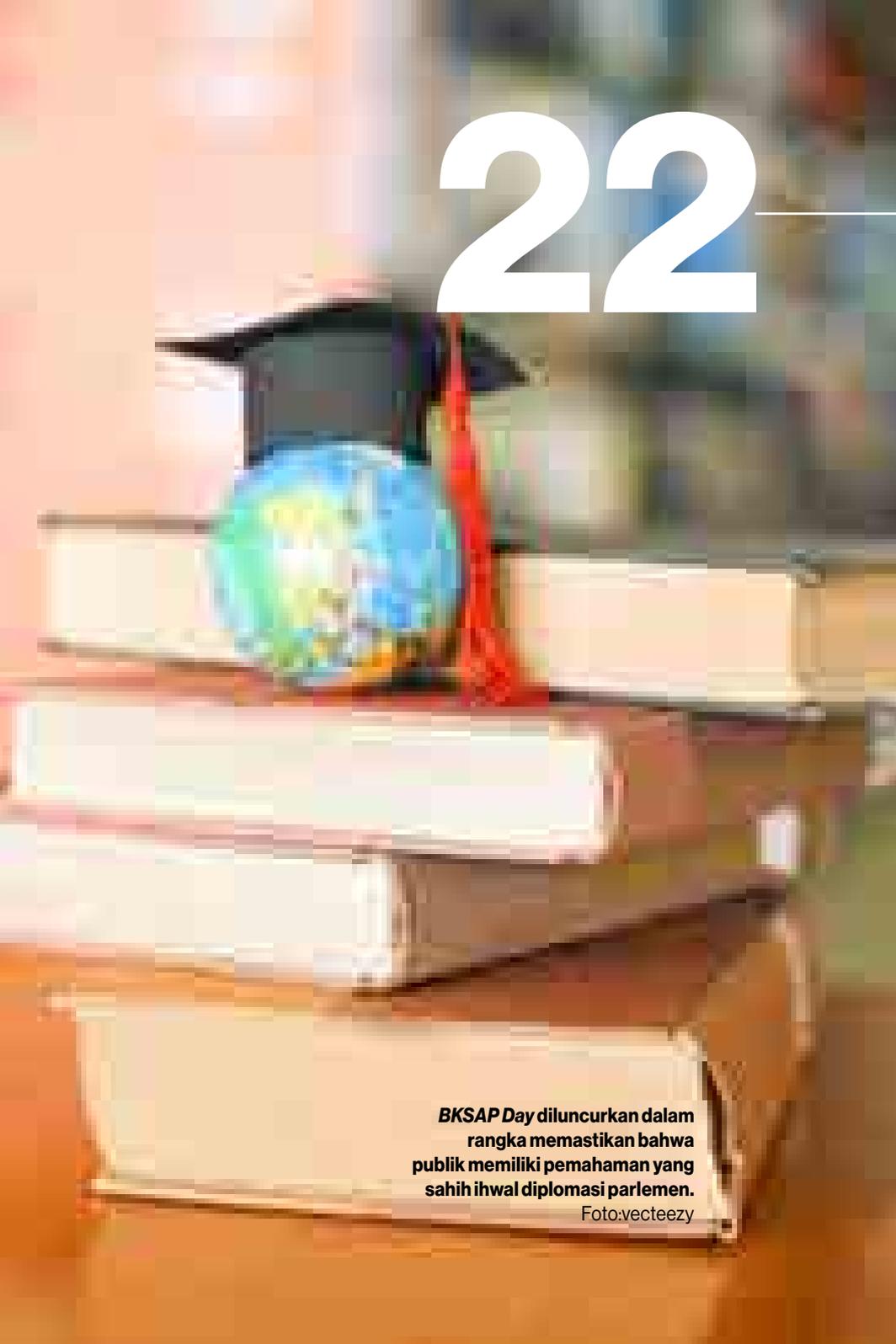
Ketua Parlemen Palestina, bahwa DPR RI siap mengundang faksi-faksi pejuang Palestina untuk berdialog di Jakarta dalam kerangka rekonsiliasi di bawah sponsor Mesir. Terkait hal tersebut, Fattou sangat menyambut baik dan mengapresiasi.

Layak dicatat pula penyampaian apresiasi kepada Indonesia dari Ketua Delegasi Komisi Transportasi, Infrastruktur dan Agraria Parlemen Korea Selatan, Hong Kee Won, saat melakukan *courtesy call* kepada Pimpinan BKSAP DPR RI di Gedung DPR, 3 Januari 2023. Ia mengapresiasi peranan Indonesia dalam perdamaian di Semenanjung Korea, terutama potensi DPR RI yang dapat menjadi penengah dua Korea mengingat DPR RI memiliki GKSB dengan Parlemen Korea Selatan dan Parlemen Korea Utara. Tidak boleh dilupakan pula bagaimana kepala misi diplomasi Rusia dan Ukraina, Azerbaijan, dan Armenia yang silih berganti melakukan pertemuan dengan BKSAP DPR RI untuk menyampaikan beragam pandangan terkait konflik yang mendera mereka. Hal itu menunjukkan bahwa diplomasi bilateral DPR RI sudah dipercaya, setidaknya menjadi forum dialog yang kondusif.

Menilik peran-peran yang sudah dimainkan misi diplomasi bilateral DPR, tidak diragukan lagi bahwa agenda diplomasi bilateral DPR dapat memainkan peranan yang sangat strategis dalam memperteguh peran diplomasi Indonesia secara keseluruhan.



22

A stack of several books is shown, with a small globe of the Earth resting on top. A black graduation cap with a red tassel is also placed on the stack. The background is a blurred indoor setting, possibly a library or study area.

BKSAP Day diluncurkan dalam
rangka memastikan bahwa
publik memiliki pemahaman yang
sahih ihwal diplomasi parlemen.

Foto:vecteezy

Edukasi, Transparansi, dan Partisipasi

Lebih dari separuh dekade program *BKSAP Day* sudah menjadi agenda rutin BKSAP DPR RI. Program ini bermula dari banyak faktor, terutama kegelisahan BKSAP akan adanya sentimen negatif publik terhadap berbagai kunjungan kerja delegasi DPR ke luar negeri. Banyak pihak yang melontarkan kritikan sangat pedas atas agenda DPR ke luar negeri tersebut.

Stigma negatif bahwa kunjungan DPR ke luar negeri sekadar “jalan-jalan” atau “plesiran” masih bersemayam di pikiran publik. Stigma tersebut sudah sangat lama melekat di kalangan masyarakat, termasuk kelompok terpelajar dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Lantaran derasnya kritikan tersebut, Pimpinan DPR pernah menerbitkan surat edaran pada 30 Mei 2011 yang isinya pembatasan kunjungan kerja ke luar negeri anggota DPR.¹

1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (2011, 7 Juni), “DPR Resmi Batasi Kunjungan Luar Negeri”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/2817/t/DPR%20RESMI%20BATASI%20KUNJUNGAN%20LUAR%20NEGERI>. Diakses pada 28 Januari 2024.

Harus diakui bahwa kritikan-kritikan pedas tersebut menyoar pada beberapa kasus kunjungan kerja luar negeri DPR yang tidak terlalu substantif. Namun, kritikan juga dapat disulut oleh defisit informasi yang dimiliki publik terkait kunjungan tersebut. Setidaknya mereka membutuhkan jawaban atau informasi yang memadai tentang agenda kunjungan tersebut. Seberapa pentingkah kunjungan itu? Tujuan dan target apakah yang ingin dicapai dari kunjungan tersebut? Manfaat-manfaat apakah yang diperoleh dari kunjungan itu? Tentu saja, masih tersisa rentetan pertanyaan lain terkait kunjungan kerja DPR ke luar negeri.

Merujuk kepada rentetan pertanyaan terkait kunjungan kerja DPR ke luar negeri itu, jelas bahwa akar masalahnya adalah karena terjadinya defisit informasi. Hal tersebut muaranya adalah sosialisasi, transparansi, dan akuntabilitas yang tidak tersedia secara memadai. Dalam konteks ini, pihak DPR-lah yang memikul tanggung jawab untuk mengatasi defisit informasi tersebut. Bahkan, ketersediaan informasi yang memadai itu tidak sebatas terkait kunjungan kerja ke luar negeri, tetapi juga meliputi agenda DPR secara keseluruhan. Dalam kaitan ini, DPR terus berbenah dan beradaptasi serta menata diri menuju parlemen yang modern dengan menetapkan DPR sebagai parlemen yang terbuka.

Open Parliament

Penting untuk dicatat bahwa DPR telah mendeklarasikan diri sebagai *open parliament* pertama di kawasan Asia Pasifik pada

Agustus 2018. Konsep *open parliament* sendiri merupakan inisiatif untuk mendukung proses kerja lembaga legislatif menjadi terbuka, transparan, inklusif, dan akuntabel, sehingga perumusan kebijakan dan kinerja anggota dewan dapat diakses dan menjawab kebutuhan khalayak umum. Lebih lanjut, *open parliament* juga mendorong adanya ruang dialog publik dengan meningkatkan aksesibilitas yang memungkinkan masyarakat lebih terlibat dalam berbagai fungsi DPR.

Segaris dengan prinsip *open parliament*, BKSAP kemudian meluncurkan *BKSAP Day*. Kegiatan ini mengemban misi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKSAP sebagai penjurur diplomasi DPR.

Secara singkat, misi yang diusung *BKSAP Day* adalah:

1. Memperkenalkan dan menyosialisasikan serta memperkaya konsep diplomasi parlemen yang dilakukan oleh BKSAP secara khusus dan DPR secara umum;
2. Memperkenalkan dan mendialogkan kerja-kerja diplomasi parlemen DPR;
3. Membangun jaringan, sinergi, dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan kalangan akademisi, khususnya yang terkait dengan isu-isu luar negeri;
4. Aksi konkret akuntabilitas dan transparansi kerja-kerja diplomasi parlemen.

Sejak *BKSAP Day* diluncurkan lebih dari separuh dasawarsa lalu, berbagai institusi berhasil disambangi BKSAP DPR dalam rangka memastikan bahwa publik memiliki pemahaman yang sah ihwal diplomasi parlemen, termasuk agenda-agenda kunjungan kerja DPR ke luar negeri. Diharapkan, publik tidak lagi *menggebyah uyah* atau memukul rata kunjungan kerja luar negeri DPR sebagai “jalan-jalan” atau “plesiran”. Secara umum, publik diharapkan mendapatkan deskripsi utuh terkait konsep diplomasi parlemen.

Sejak awal peluncurannya, tercatat puluhan universitas, kampus, dan pemerintahan tingkat kota/kabupaten dan provinsi di seantero Nusantara telah berkolaborasi dengan BKSAP menyelenggarakan *BKSAP Day*. Berbagai topik telah menjadi pembahasan selama agenda-agenda *BKSAP Day*. Di antaranya, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), eksplorasi potensi ekonomi daerah dalam konteks global, pendidikan, dan topik lainnya yang relevan.

Sejumlah catatan penting mencuat dari rangkaian perhelatan *BKSAP Day*. Di antaranya, *pertama*, adalah fakta bahwa publik masih memandang praktik diplomasi sebagai domain pemerintah atau Kementerian Luar Negeri. Diplomasi parlemen ternyata masih terdengar asing di telinga publik. Bahkan, yang cukup mencengangkan, terkuak fakta bahwa sejumlah tenaga pengajar jurusan Hubungan Internasional di universitas negeri masih belum mengetahui ihwal diplomasi parlemen sebagai sebuah konsep yang distingtif. Kerja sama

konkret dari fakta tersebut adalah praktik magang mahasiswa Hubungan Internasional di BKSAP dan beberapa bahkan menuliskan tugas akhir perkuliahan dengan tema berkaitan diplomasi parlemen.

Kedua, adalah fakta bahwa isu-isu global masih belum begitu ramah di ranah lokal. Beberapa pemerintah daerah dinilai masih gagap ketika dihadapkan pada tantangan-tantangan global seperti TPB, perubahan iklim, dan transformasi energi berkelanjutan. Isu-isu tersebut dinilai masih bercokol di kalangan pusat atau elite atau insan akademik jurusan Hubungan Internasional. *BKSAP Day* terus berupaya membuka cakrawala global bagi publik lokal dengan konsep *think globally, act locally*, yaitu bahwa daerah berpikir dalam kerangka global yang lantas dimanifestasikan dalam aksi lokal.

Ketiga, adalah fakta bahwa diplomasi parlemen berpotensi besar dalam upaya mengakselerasi pembangunan daerah di seluruh sektor. Sekadar contoh, melalui skema diplomasi bilateral, terdapat 102 misi kunjungan ke luar negeri. Ini bermakna bahwa para pelaku bisnis di daerah dapat bersinergi dengan 102 misi tersebut untuk meluaskan jaringan menuju pasar global. Alhasil, *BKSAP Day* adalah kunci untuk memastikan bahwa publik teredukasi tentang DPR yang lebih terbuka dan bertanggung jawab.







BAGIAN

**DPR RI DI KANCAH
INTERNASIONAL**

23



Kepentingan nasional tidak hanya bergantung pada diplomasi pemerintah, tetapi juga melibatkan diplomasi parlemen. Foto: freepik

Memperkuat Diplomasi Parlemen

Berakhirnya Perang Dingin, yang mengakibatkan runtuhnya tatanan dunia bipolar, intensifikasi globalisasi dalam bidang ekonomi, keuangan, politik, dan keamanan, Tragedi 9/11, dan perang melawan teror, serta tantangan terbaru yakni krisis multidimensi yang terjadi dalam skala global akibat pandemi Covid-19, merupakan sebuah proses dinamis dan tanpa henti yang mengubah secara dramatis hubungan internasional. Sebagai konsekuensinya, diplomasi tradisional yang selama ini dilakukan antarpemerintah tidak lagi menjadi tumpuan utama dalam upaya negara mencapai kepentingan nasional. Makin kompleksnya dinamika isu-isu global yang mengemuka akhir-akhir ini, mengharuskan aktor diplomasi untuk mampu mengembangkan keahlian di bidang kebijakan khusus, seperti yang berkaitan dengan tata kelola ekonomi global, penanganan perubahan iklim, kejahatan lintas batas, dan isu terorisme.

Panggung diplomasi internasional pun makin ramai dengan kehadiran dan aktivitas aktor-aktor internasional baru,

seperti organisasi nonpemerintah, kelompok lobi, parlemen, masyarakat sipil, akademisi, media, pemerintah kota atau negara bagian, yayasan, lembaga *think-tank*, dan bahkan selebritas serta pemengaruh (*influencer*). Akibatnya, muncul berbagai bentuk diplomasi baru. Stelios Stavridis dan Davor Jancic, dalam bukunya *Parliamentary Diplomacy in European and Global Governance*, mencatat ragam bentuk diplomasi, antara lain diplomasi ekonomi, diplomasi budaya, diplomasi publik, paradiplomasi, diplomasi olahraga, diplomasi selebritas, dan diplomasi parlemen.¹ Di antara berbagai bentuk diplomasi tersebut, diplomasi parlemen menjadi makin penting dan mengemuka, seiring dengan makin relevan serta strategisnya peran parlemen dalam berbagai upaya untuk menangani isu-isu global yang muncul dan berkembang saat ini.

Diplomasi Parlemen

Banyak negara di dunia, termasuk negara-negara maju seperti Jerman dan mayoritas anggota Uni Eropa, menganut sistem politik parlementer. Fakta ini diperkuat dengan keanggotaan 178 parlemen negara di dunia dalam organisasi parlemen internasional Inter-Parliamentary Union (IPU). Hal ini turut menegaskan makin signifikannya diplomasi parlemen dalam pencapaian kepentingan nasional, yang tidak hanya bergantung pada diplomasi pemerintah, tetapi juga melibatkan diplomasi parlemen.

1 Stelios Stavridis & Davor Jancic (Eds.), (2017), *Parliamentary Diplomacy in European and Global Governance*. Leiden: Brill Nijhoff.

Parlemen, terlepas dari sistem politik negaranya, umumnya memiliki fungsi-fungsi utama seperti legislasi, penganggaran, pengawasan, representasi, dan diplomasi. Dalam pertemuan-pertemuan internasional, regional, atau bilateral, parlemen tidak hanya membahas isu-isu global melalui pertukaran pandangan atau praktik terbaik, tetapi juga fokus pada solusi dan penanganan isu-isu tersebut melalui fungsi parlemen. Pertemuan-pertemuan parlemen ini juga cenderung lebih



Dalam pertemuan-pertemuan internasional, regional, atau bilateral, parlemen tidak hanya membahas isu-isu global tetapi juga pada solusi dan penanganan sesuai fungsi parlemen. Foto: Dok. DPR RI.

fleksibel dibandingkan dengan pertemuan diplomatik yang mewakili pemerintah. Fleksibilitas tersebut sering kali berhasil memecah kebuntuan dalam diplomasi, membuka jalan bagi berbagai kebijakan dan solusi baru.

“ Melalui karakteristik khas yang dimiliki ketika berdiplomasi, parlemen diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mencari solusi atas berbagai masalah global.

Melalui karakteristik khas yang dimiliki ketika berdiplomasi, parlemen diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mencari solusi atas berbagai masalah global. Pertemuan antarparlemen, baik di tingkat regional maupun internasional, diharapkan dapat memberikan masukan penting bagi proses penyusunan legislasi. Dengan demikian, legislasi yang dihasilkan diharapkan dapat lebih responsif sebagai payung hukum bagi berbagai kebijakan pemerintah dalam menyikapi tantangan-tantangan global yang terus berkembang. Jadi, peran parlemen tidak hanya terbatas pada pembentukan hukum domestik, tetapi juga memengaruhi bagaimana suatu negara merespons isu-isu global yang makin kompleks, menegaskan pentingnya diplomasi parlemen dalam arsitektur global saat ini.

Di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, DPR RI melalui BKSAP memiliki kewenangan untuk melakukan diplomasi parlemen. Sesuai dengan amanat undang-undang, diplomasi parlemen yang dijalankan oleh BKSAP bertujuan untuk memperkuat diplomasi pemerintah Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional. Isu-isu yang dibahas dalam forum antarparlemen sejatinya juga merupakan topik yang tidak hanya menjadi perhatian internasional, tetapi juga isu-isu yang relevan dengan kepentingan nasional Indonesia, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, diplomasi parlemen berperan penting tidak hanya dalam menggaungkan perspektif dan kepentingan Indonesia ke panggung global, tetapi juga turut memastikan bahwa legislasi dalam negeri selaras dengan dinamika internasional, sekaligus menerjemahkan komitmen global dalam berbagai kebijakan nasional.



24



Isu kedaerahan memiliki keterkaitan erat dengan beragam tantangan global, seperti pembangunan berkelanjutan, pariwisata, ekonomi kreatif dan pendidikan. Foto: vecteezy

Membangun Sinergi, Menuai Partisipasi

Pelaksanaan mandat fungsi diplomasi DPR akan berjalan efektif jika mampu menjembatani kepentingan lokal dan tuntutan global. Memahami dan merespons kondisi global dengan bijak dan efektif sangat penting untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Oleh karena itu, membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah menjadi penting.

Berbagai persoalan dan isu kedaerahan memiliki keterkaitan erat dengan beragam tantangan global, seperti pembangunan berkelanjutan, pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM, digitalisasi, dan pendidikan. Pada tahun 2020, menurut data Bank Dunia, sekitar 97 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem akibat pandemi, sekaligus mengakibatkan penurunan ekonomi global yang tumbuh $-3,4\%$ pada 2020.¹ Hal ini berdampak signifikan ke tingkat lokal dengan penurunan

1 Daniel Gerson, Mahler Nishant, Yonzan Christoph, Lakner, R. Andres Castaneda Aguilar, & Haoyu Wu, (2021, 1 Juni), "Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty: Turning the corner on the pandemic in 2021?", World Bank Blog, <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-turning-corner-pandemic-2021>.

pendapatan, hilangnya lapangan kerja, dan meningkatnya ketimpangan akibat perkembangan ekonomi yang memburuk.

Adanya stagnasi ekonomi global selama pandemi dan normalisasi ekonomi pascapandemi memengaruhi aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Perubahan itu harus dihadapi oleh semua lapisan masyarakat, termasuk di tingkat lokal (daerah). Melalui kegiatan *BKSAP Day*, BKSAP berupaya memahami dinamika dan persoalan di akar rumput dengan menyelenggarakan kegiatan itu di daerah. Kegiatan tersebut juga menjadi media bagi BKSAP dalam menyerap aspirasi untuk pencarian solusi dalam forum-forum internasional, sekaligus mendiseminasikan capaian-capaian peran diplomasi parlemen di kancah global. *BKSAP Day* juga berperan sebagai sarana untuk membangun sinergi antara BKSAP dan berbagai pihak di daerah, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, hingga pihak swasta, termasuk mengajak mahasiswa dan pemuda untuk berpartisipasi dan tertarik pada politik dan kinerja parlemen.

Sepanjang 2019–2024, BKSAP telah melaksanakan sejumlah kegiatan *BKSAP Day* ke berbagai daerah di Indonesia dengan mengangkat berbagai tema. Di antaranya, terkait percepatan dan pencapaian TPB, pemulihan ekonomi berbasis keunggulan daerah dan revitalisasi industri pariwisata di masa pandemi, diplomasi *soft power* melalui dunia pendidikan dan pertukaran budaya, serta ragam topik lainnya yang terkait secara spesifik dengan karakteristik wilayah atau daerah

yang dikunjungi. Melalui kegiatan *BKSAP Day*, parlemen mendapatkan gambaran secara lebih dekat mengenai implementasi filosofi dan nilai-nilai kearifan lokal yang berkontribusi pada pelestarian alam, konservasi energi, serta pembangunan lingkungan sosial. Beragam nilai kearifan lokal tersebut menjadi kekuatan yang dapat ditawarkan Parlemen Indonesia sebagai solusi permasalahan global dan memperkuat posisi Indonesia di forum internasional.

Di samping itu, untuk mendorong efektivitas keberhasilan pencapaian agenda global, sebagai *output* dari kerja-kerja diplomasi parlemen, komitmen global dan sejumlah rencana aksi seperti TPB, selain dituangkan dalam kebijakan nasional, penting juga untuk diimplementasikan di tingkat akar rumput. Melalui kegiatan ini, BKSAP tidak hanya mendiseminasikan capaian diplomasi dan perkembangan agenda global, tetapi juga dapat memastikan implementasinya di daerah sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat, pemerintah daerah, sivitas akademika, dan pihak swasta dalam realisasinya.

Melibatkan Akademisi

Dialog dan aspirasi yang dihasilkan dari kegiatan *BKSAP Day* menjadi dukungan tersendiri yang menopang fungsi diplomasi BKSAP dalam merespons dinamika dan tantangan global. Dalam sejumlah konferensi internasional, seperti Sidang Inter-Parliamentary Union (IPU), Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), Parliamentary Hearing at the United Nations, dan sidang-sidang lainnya,



Pelibatan pemangku kepentingan terkait, termasuk sivitas akademika, sangat penting dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan dan pengembangan diplomasi parlemen. Foto: Dok. DPR RI.

BKSAP telah berhasil memperkenalkan implementasi kearifan lokal sebagai pengalaman terbaik dalam menangani isu global dan menjadikan Indonesia sebagai percontohan yang meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia.

Selain itu, pelibatan pemangku kepentingan terkait, termasuk sivitas akademika, juga sangat penting dalam memberikan masukan terhadap pelaksanaan dan pengembangan serta optimalisasi diplomasi parlemen. BKSAP pada periode 2019–2024 ini telah secara aktif melibatkan akademisi dan berbagai pemangku kepentingan terkait dalam mendiskusikan isu-

isu krusial, di antaranya diplomasi kedaulatan melalui penyelenggaraan Indonesia–Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) untuk menjembatani komunikasi parlemen dengan negara-negara Pasifik, hingga konsultasi dengan akademisi dan institusi terkait posisi dan kepentingan Indonesia dalam persiapan pelaksanaan sidang AIPA, MIKTA, dan IPU. Diplomasi kedaulatan dan berbagai upaya yang dijalankan BKSAP dalam menggalang dukungan politik dalam negeri merupakan ikhtiar DPR RI untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. DPR RI turut mengambil peran dalam menampung, menjembatani, dan menyuarakan aspirasi serta kepentingan rakyat Indonesia di forum internasional.

Kiprah diplomasi parlemen yang dijalankan oleh DPR RI periode 2019–2024 juga telah memperoleh apresiasi dan kepercayaan yang baik dari komunitas internasional dan jaringan parlemen lintas negara. Salah satunya melalui penyelenggaraan berbagai pertemuan parlemen, baik tingkat global maupun tingkat regional, yang juga memberikan peluang bagi DPR RI untuk memimpin dan menentukan arah diskusi agenda-agenda strategis global.



25



**Pada Sidang Umum IPU ke-144 BKSAP
berhasil memberikan kontribusi aktif dalam
mendukung DPR RI sebagai tuan rumah.**

Kontribusi Penting Indonesia di IPU

BKSAP memiliki banyak peran di Inter-Parliamentary Union (IPU). Selain menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Umum IPU, beberapa pimpinan dan anggota BKSAP terpilih menjadi anggota komite tertentu di IPU. Selain itu, secara umum, banyak kontribusi yang bisa diberikan BKSAP kepada IPU.

Pada 20–24 Maret 2022, DPR RI menjadi tuan rumah Sidang Umum IPU ke-144 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali. Pada kesempatan itu, BKSAP berhasil memberikan kontribusi aktif dalam mendukung DPR RI sebagai tuan rumah. Sidang Umum yang dihadiri oleh 778 delegasi dari 101 parlemen seluruh dunia serta sebanyak 17 organisasi internasional itu mengusung tema “Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change”. Melalui pelaksanaan sidang ini, DPR RI berupaya mengambil peran dalam pembahasan masalah lingkungan dan perubahan iklim, yang merupakan amanat konstitusi. Melalui fungsi diplomasi parlemen, DPR RI mengajak seluruh elemen untuk peduli terhadap isu perubahan iklim, memperkuat peran parlemen untuk

melakukan upaya lebih dalam mengurangi emisi berdasarkan prinsip *common but differentiated responsibility* (CBDR).¹

Sidang Umum IPU di Bali tersebut sukses menghasilkan *outcome document* berupa Deklarasi Nusa Dua, yang memuat sejumlah komitmen dari parlemen yang hadir untuk bersama-sama berupaya mengatasi dampak perubahan iklim yang kian nyata. Melalui Sidang Umum IPU di Bali ini, DPR RI telah berupaya menggalang solidaritas internasional dan mendorong negara-negara maju untuk mewujudkan komitmen pembiayaan dan transfer teknologi dalam kerangka penanganan perubahan iklim. Melalui Sidang Umum IPU di Bali ini juga, DPR RI berupaya menjembatani kerangka kebijakan negara-negara di dunia dalam penanganan perubahan iklim dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai di tataran internasional, antara lain *Paris Agreement*, COP26, dan *Glasgow Climate Pact*.

Penting juga untuk dicatat, melalui Sidang Umum IPU di Bali, BKSAP berhasil memosisikan DPR RI sebagai pemimpin parlemen seluruh dunia melalui inisiatif pembentukan Satuan Tugas (*Task Force*) IPU untuk menemukan solusi damai bagi konflik Rusia–Ukraina. Inisiatif pembentukan Satuan Tugas IPU tersebut merupakan solusi konkret sekaligus berhasil menjembatani perbedaan pendapat yang cukup tajam antara parlemen yang berupaya menggalang dukungan bagi Ukraina dan parlemen yang menginginkan agar Sidang Umum IPU

1 Common but differentiated responsibility (CBDR), atau “tanggung jawab bersama tetapi berbeda”, adalah prinsip dalam isu lingkungan internasional terkait keadilan iklim yang diformalisasikan pada Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan di Rio de Janeiro tahun 1992. Prinsip ini menetapkan tanggung jawab moral bersama di antara berbagai kelompok negara untuk menangani perubahan iklim global, tetapi proporsi tanggung jawabnya berbeda.

ke-144 tetap konsisten dengan landasan pembentukan IPU, yaitu untuk mempromosikan demokrasi dan perdamaian dunia, serta tidak lebih jauh dimanfaatkan sebagai forum yang menunjukkan keberpihakan hanya kepada salah satu pihak tertentu.

BKSAP DPR RI berpartisipasi aktif di berbagai forum internasional dalam menjalankan fungsi diplomasi parlemennya, termasuk di IPU. Dalam hal ini, BKSAP DPR RI menempati posisi atau jabatan strategis di forum tersebut, yaitu:

- Member of Executive Committee – Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (hingga Oktober 2027);
- Member of Committee on Sustainable Development – Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (hingga Maret 2025);
- Member of Committee of Human Rights – Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Gilang Dhielafararez (hingga Oktober 2025);
- Member of Committee of Middle East Question – Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Sukamta (hingga Oktober 2027);
- Member of Committee on Int. Peace and Security – Anggota BKSAP DPR RI, Ratih Megasari Singkarru (hingga Maret 2025);
- Bureau of Women Parliamentarians – Anggota BKSAP DPR RI, Puteri Anetta Komarudin (hingga Maret 2025);
- Forum of Young Parliamentarians – Anggota BKSAP DPR RI, Dyah Roro Esti Widya Putri (hingga Maret 2025).

Task Force Rusia-Ukraina

DPR RI juga terus menegaskan dan memperkuat kontribusinya dalam resolusi konflik global. Salah satunya, melalui keterlibatan dalam pembentukan dan keanggotaan Satuan Tugas (*Task Force*) IPU untuk menemukan solusi damai bagi konflik Rusia–Ukraina. Konflik ini menjadi ancaman serius bagi perdamaian dan stabilitas global, termasuk dampak yang dirasakan oleh Indonesia, khususnya dalam aspek energi dan pangan pada tahun 2022. Sebagai wujud komitmen terhadap amanat Konstitusi, DPR RI memiliki sikap yang tegas dalam mendukung kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara. Prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional diutamakan dan dipertahankan. Selaras dengan itu, upaya-upaya resolusi konflik yang dilakukan DPR RI bertumpu pada diplomasi, mediasi, fasilitasi dialog dan negosiasi damai, dengan prioritas menjaga stabilitas global dan regional, membina hubungan kerja sama, serta demokrasi yang menjunjung *rules-based order*.

Sebagai tuan rumah Sidang Umum IPU ke-144 di Bali pada 2022, DPR RI mensponsori *emergency item* terkait peran parlemen dalam mendukung resolusi damai bagi konflik Rusia–Ukraina. Pada sidang IPU tersebut, diadopsi resolusi yang mengamankan pembentukan Satuan Tugas IPU untuk Ukraina (*Task Force on Ukraine*).² Ketua BKSAP Fadli Zon terpilih sebagai anggota satuan tugas tersebut mewakili Asia Pacific Group, bersama enam anggota parlemen lainnya yang masing-masing mewakili tiap grup geopolitik di IPU.

2 144th IPU Assembly Resolution, (Maret 2022), “Peaceful resolution of the war in Ukraine, respecting international law, the Charter of the United Nations and territorial integrity”, <https://www.ipu.org/file/13992/download>.



Delegasi IPU - Task Force on Ukraine saat mengunjungi Ukraina. Foto: Dok. BKSAP.

Satuan tugas ini telah melakukan upaya diplomasi parlemen yang signifikan, termasuk kunjungan ke parlemen kedua negara di Kyiv dan Moskow. Melalui komunikasi yang konsisten dengan kedua parlemen, upaya satuan tugas ini terfokus pada memfasilitasi parlemen kedua negara untuk mendorong dialog dan resolusi konflik secara damai. Satuan tugas ini juga menekankan tiga hal utama, yakni gencatan senjata, dialog trilateral, dan mengakhiri konflik secara total. Melalui satuan tugas ini, DPR RI mendorong solusi jangka panjang untuk perdamaian yang berkelanjutan. Pihak-pihak yang berkonflik harus kembali ke meja perundingan. Dialog harus dilakukan dengan saling menghormati, dan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.



26



**DPR RI mendorong
parlemen negara-negara
Asia Tenggara untuk
berkontribusi dalam
mendorong penguatan
sentralitas ASEAN.**

Foto: Dok. DPR RI.

Kepemimpinan DPR RI di Forum Internasional dan Regional

Sejalan dengan presidensi Indonesia pada Group of 20 (G20), DPR RI juga menjadi tuan rumah untuk pertemuan ketua parlemen negara-negara G20, The 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20) pada tahun 2022. Melalui KTT P20 yang dilaksanakan pada 6–7 Oktober 2022, DPR RI mengulang kesuksesan pelaksanaan Sidang Umum IPU ke-144 dan tampil sebagai pemimpin di kancah internasional, khususnya dalam konteks diplomasi parlemen. Melalui tema “Stronger Parliament for Sustainable Recovery”, di bawah presidensi Indonesia, para ketua parlemen negara anggota G20 membahas sejumlah isu prioritas terkait kerangka pemulihan ekonomi global pascapandemi, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dan upaya mengatasi berbagai tantangan global.

Hasil KTT P20

Meski KTT P20 ini tidak mengeluarkan *joint statement*, presidensi Indonesia pada P20 telah menghasilkan sejumlah

pesan yang menjadi pijakan dunia dalam mengatasi berbagai persoalan global. Hal itu tertuang dalam *outcome document* berupa *chair's summary*, berisi pesan-pesan hasil diskusi P20, yang juga turut disampaikan kepada para pemimpin negara-negara G20 dalam KTT G20. *Chair's summary* juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi parlemen negara-negara G20 dalam menyusun legislasi, sekaligus menjadi referensi bagi pelaksanaan pertemuan P20 tahun 2023 yang diketuai oleh Parlemen India.

Melalui *chair's summary*, P20 menegaskan:

- Bahwa multilateralisme merupakan kanal paling efektif untuk mengatasi ragam tantangan global bersama;
- Mendesak negara-negara G20 untuk melipatgandakan upaya dalam mengatasi perbedaan, mempromosikan perdamaian, dan memperkuat pemulihan ekonomi;
- Urgensi kesetaraan gender yang dapat mewujudkan kemakmuran yang lebih besar dan pembangunan berkelanjutan untuk semua;
- Parlemen yang kuat adalah kunci bagi demokrasi yang kuat dan untuk memastikan bahwa kesejahteraan warga negara berada di pusat kebijakan dan legislasi.

Para peserta mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di KTT P20, karena semua pihak dapat duduk bersama, terbuka, dan berdialog memecahkan masalah global. Kerja sama tidak hanya antarpemerintah, tetapi juga antarparlemen, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.

Presidensi Indonesia di Sidang Umum AIPA Ke-44

Sebagai pendiri ASEAN, Indonesia berperan penting dalam mendorong perdamaian dan stabilitas di kawasan serta pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan bagi warga negara. Pada perkembangannya, sejalan dengan kepemimpinan Indonesia di ASEAN, DPR RI juga memegang presidensi AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly) pada 2023. Melalui tema “Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN”, DPR RI mendorong parlemen negara-negara di kawasan untuk berkontribusi dalam mendorong penguatan sentralitas ASEAN, mewujudkan ASEAN yang lebih responsif dalam menanggapi tantangan dan dinamika kawasan, serta merealisasikan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi.

Pada 5–11 Agustus 2023, DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang Umum AIPA ke-44. Melalui kesempatan tersebut, DPR RI juga mengupayakan berbagai kepentingan nasional, seperti realisasi pendanaan perubahan iklim, transisi ekonomi hijau, ketahanan pangan dan energi, kesetaraan gender, dan partisipasi pemuda dalam proses pengambilan kebijakan.

Keseluruhan sidang tersebut telah menghasilkan 30 resolusi dari enam komisi sebagai bentuk kesepakatan parlemen negara-negara AIPA dalam menyikapi berbagai persoalan kawasan dan isu regional. DPR RI mensponsori enam resolusi, yaitu:

1. Akselerasi transisi hijau untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dalam Komite Ekonomi;¹
2. Perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan melalui dialog dan kolaborasi dalam Komite Politik-Keamanan;²
3. Kerja sama dan kontribusi parlemen bagi perdamaian jangka panjang di Myanmar dalam Komite Politik-Keamanan;³
4. Aksi parlemen dalam mempromosikan pekerjaan ramah lingkungan (*green jobs*) untuk mendukung transisi ekonomi hijau dalam Komite Sosial-Budaya;⁴
5. Peningkatan keterlibatan pemuda untuk pembangunan inklusif, transformasi ekonomi, dan partisipasi demokrasi dalam Komite Parlemen Muda (YPA);⁵
6. Peningkatan ketahanan ASEAN melalui kepemimpinan perempuan dan parlemen yang responsif gender dalam Komite Perempuan (WAIPA).⁶

Keketuaan DPR RI di forum parlemen Asia Tenggara ini tidak

- 1 44th AIPA General Assembly RES.44GA/2023/Eco/01, (2023, Agustus), "Accelerating Green Transition for Sustainable and Resilient Economic Growth", <https://cms.aipasecretariat-dms.org/storage/2023/Economic/resolution-on-accelerating-green-transition-for-sustainable-and-resilient-economic-growth.pdf>.
- 2 44th AIPA General Assembly RES.44GA/2023/Pol/03, (2023, Agustus), "Maintaining Regional Peace, Security, and Stability through Dialogue and Collaboration", <https://cms.aipasecretariat-dms.org/storage/2023/Political-Security/resolution-on-maintaining-regional-peace-security-and-stability-through-dialogue-and-collaboration.pdf>.
- 3 44th AIPA General Assembly RES.44GA/2023/Pol/06, (2023, Agustus), "Parliamentary Cooperation in Contributing to Long-Lasting Peace in Myanmar", <https://cms.aipasecretariat-dms.org/storage/2023/Political-Security/resolution-on-parliamentary-cooperation-in-contributing-to-long-lasting-peace-in-myanmar.pdf>.
- 4 44th AIPA General Assembly RES.44GA/2023/Soc/02, (2023, Agustus), "Mobilizing Parliamentary Actions on Promoting Green Jobs and Skills to Support Green Economic Transition", <https://cms.aipasecretariat-dms.org/storage/2023/Socio-Cultural/resolution-on-mobilizing-parliamentary-actions-on-promoting-green-jobs-and-skills-to-support-green-economic-transition.pdf>.
- 5 44th AIPA General Assembly RES.44GA/2023/YPA/01, (2023, Agustus), "Advancing Youth Engagement for Inclusive Development, Economic Transformation, and Democratic Participation", <https://cms.aipasecretariat-dms.org/storage/2023/Young%20Parliamentarians%20of%20AIPA/resolution-on-advancing-youth-engagement-for-inclusive-development-economic-transformation-and-democratic-participation.pdf>.
- 6 44th AIPA General Assembly RES.44GA/2023/WAIPA/02, (2023, Agustus), "Enhancing ASEAN Resilience through Women Leadership and Gender-Responsive Parliaments", <https://cms.aipasecretariat-dms.org/storage/2023/WAIPA/resolution-on-enhancing-asean-resilience-through-women-leadership-and-gender-responsive-parliaments.pdf>.



Sidang Umum AIPA ke-44 telah menghasilkan 30 resolusi dari enam komisi.

Foto: Dok. DPR RI.

hanya menegaskan komitmen terhadap stabilitas regional, tetapi juga menyoroti pentingnya tindakan kolektif dalam mendorong solusi damai dan resolusi konflik di Myanmar. Pada pertemuan tersebut, parlemen AIPA menyetujui usulan DPR RI untuk menjajaki pembentukan mekanisme baru, misalnya dalam bentuk Komite Ad-Hoc Parlemen, untuk membantu mengawasi penerapan *Five-Point Consensus* (5PC) yang selama ini digunakan sebagai dasar untuk mengembalikan situasi aman dan damai di Myanmar.

DPR RI juga menyerukan keterlibatan yang lebih besar tidak hanya antarparlemen AIPA, tetapi juga dengan parlemen-parlemen peninjau,⁷ dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan

⁷ Hingga Januari 2024, AIPA memiliki 23 parlemen peninjau (observer parliaments) yang diatur

bagi rakyat Myanmar. Selain itu, dalam memberikan tekanan internasional terhadap Myanmar untuk menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bantuan kemanusiaan yang aman dan efektif, serta memfasilitasi transisi pemerintahan yang demokratis.

Sementara itu, pada tingkat pengembangan institusi, melalui presidensi DPR RI, AIPA memperluas jaringan dan kerja sama dengan penambahan tiga parlemen peninjau, yakni Parlemen Armenia, Parlemen Kuba, dan Parlemen Turki. Langkah ini menunjukkan pengaruh penting DPR RI dalam memperluas cakupan dan kerja sama dengan mitra di luar kawasan, sekaligus menegaskan peran DPR RI dalam mendorong sentralitas ASEAN serta meningkatkan dialog dan kolaborasi antarparlemen pada skala global. Keberhasilan ini juga mencerminkan komitmen DPR RI untuk membangun hubungan yang lebih inklusif dan luas, melibatkan lebih banyak negara dalam diskusi isu-isu penting yang menjadi kepentingan bersama, sejalan dengan prinsip dan mekanisme kerja AIPA.

The 9th MIKTA Speakers' Consultation

Sebagai wujud komitmen untuk terus mendukung kontribusi parlemen dalam upaya penyelesaian berbagai permasalahan global, khususnya dalam menghadapi masa depan yang penuh volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas (VUCA), DPR RI mendorong penguatan aksi kolektif

dalam Statuta AIPA Bag. IV(8), yakni parlemen Amerika Serikat, Armenia, Australia, Azerbaijan, Belarusia, Georgia, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Kuba, Maroko, Nepal, Selandia Baru, Norwegia, Pakistan, Papua Nugini, Rusia, Timor Leste, Tiongkok, Turki, Ukraina, dan Uni Eropa.

parlemen negara-negara MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia). Upaya itu dilakukan saat Indonesia menjadi tuan rumah dan pimpinan sidang The 9th MIKTA Speakers' Consultation yang diselenggarakan di Jakarta, 19–21 November 2023. Melalui tema “Strengthening Multilateralism, Addressing Intergenerational Challenge”, sidang ini berhasil mendiskusikan tiga isu utama yang menjadi perhatian kolektif bagi kelima negara, yakni terkait penguatan partisipasi parlemen dalam reformasi tata kelola global, isu perubahan iklim, serta pelibatan pemuda dalam upaya-upaya penyelesaian permasalahan global.



DPR RI menyerukan kepada MIKTA dan komunitas internasional untuk memperkuat multilateralisme dan kerja sama dalam mengatasi berbagai tantangan global. Foto: Dok. DPR RI.

Hasil diskusi ketua parlemen-parlemen MIKTA ini kemudian dituangkan dalam *chair's statement*, yang isinya DPR RI menyerukan kepada MIKTA dan komunitas internasional untuk memperkuat multilateralisme dan kerja sama sebagai kunci dalam mengatasi berbagai tantangan global. Melalui kepemimpinan dalam forum ini, DPR RI juga menekankan bahwa MIKTA harus berinisiatif memajukan reformasi dalam tata kelola global, yang sesuai dengan kebutuhan negara-negara berkekuatan menengah dan negara berkembang, serta relevan dengan kondisi dan dinamika abad ke-21.

Parlemen-parlemen MIKTA juga berkomitmen untuk berperan aktif dalam menghadapi krisis iklim, memperkuat fungsi parlemen dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan peluang kolaborasi yang lebih besar bagi berbagai elemen masyarakat. DPR RI juga secara aktif mendorong agenda penguatan partisipasi generasi muda dalam merancang solusi penanganan isu-isu global dalam forum ini. Hal tersebut menunjukkan komitmen DPR RI dalam memastikan keberlanjutan dan inklusivitas dalam mengatasi tantangan global.

The League of Parliamentarians for AI Quds

DPR RI selalu konsisten menyuarakan sikap Indonesia dan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina, sekaligus mengancam tindakan Israel yang melanggar berbagai hukum internasional, di berbagai forum antarparlemen, termasuk di Liga Parlemen untuk Palestina atau The League of

Parliamentarians for Al Quds—organisasi parlemen global yang fokus pada upaya-upaya mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon memegang peran penting sebagai Wakil Presiden sekaligus Anggota Executive Committee Liga Parlemen Palestina. Dengan peran itu, DPR RI dapat memaksimalkan peran diplomasi parlemen untuk menggalang dukungan parlemen global dan upaya solidaritas, serta advokasi parlemen internasional untuk Palestina. Salah satu langkah terkini yang dilakukan ialah dengan menggalang suara dan dukungan anggota parlemen dunia yang vokal dan berkomitmen terhadap kemerdekaan Palestina.



Para peserta Konferensi The League of Parliamentarians for Al-Quds and Palestine kelima di Turki. Sumber: Press Release Parliamentarians for al-Quds and Palestine.

Pada 21 November 2023, dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden forum ini, Fadli Zon bertemu dengan anggota Parlemen Inggris (House of Commons), Jeremy Corbyn, mantan Ketua Partai Buruh dan Pemimpin Oposisi periode 2015–2020 yang juga aktif dalam *Palestine Solidarity Campaign* di Inggris dan Wales. Suara dari sesama legislator dengan kepedulian yang sama (*like-minded peers*) ini sangat penting, memanfaatkan peran dan jangkauan parlemen tidak hanya di panggung internasional, tetapi juga dalam diskursus nasional masing-masing negara.

Pada konferensi Liga Parlemen Al Quds ke-5, April 2024, Ketua BKSAP DPR RI dengan tegas menyuarakan pentingnya diplomasi total untuk menghentikan penjajahan terhadap warga Gaza dan Palestina, merealisasikan keanggotaan Palestina di PBB, serta mewujudkan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Upaya diplomasi ini tentu sejalan dengan sikap pemerintah yang konsisten mendukung upaya kemerdekaan Palestina, sesuai dengan amanat UUD 1945.

World Water Forum (WWF)

Pada tahun 2024, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Water Forum ke-10. Pada saat yang sama, DPR RI juga menjadi penyelenggara Parliamentary Meeting on the Occasion of the 10th World Water Forum (WWF) bekerja sama dengan Inter-Parliamentary Union (IPU). Tema yang diusung adalah “Mobilizing parliamentary action on water for shared prosperity”. Melalui tema tersebut,

penyelenggaraan forum ini oleh DPR RI dimaksudkan untuk menggalang kerja sama global guna mengatasi kelangkaan air dan krisis air.

Dunia dihadapkan pada krisis multidimensi yang berkaitan dengan air, pangan, dan energi, sehingga baru-baru ini muncul istilah *water-food-energy nexus*. Istilah tersebut menggambarkan ancaman krisis air, krisis pangan, dan krisis energi yang saling berhubungan. Pada saat yang sama, dampak perubahan iklim dalam berbagai kejadian bencana alam, seperti kekeringan, banjir, El Nino, kebakaran, dan gelombang panas, terus memperburuk kondisi lingkungan.



World Water Forum telah memberikan ruang diskusi dan berbagi pengetahuan antara anggota parlemen dunia dengan pakar, organisasi internasional, dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara. Foto: Dok. DPR RI.

Pada akhirnya, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak menjadi terganggu. Pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) ke-6 yaitu tentang akses air bersih dan sanitasi yang layak makin sulit diraih pada tahun 2030.

Atas dasar itulah maka DPR RI mengambil peran penting untuk menggalang kerja sama global melalui peran diplomasi parlemen. Sebagai penyelenggara forum parlemen dunia untuk air, DPR RI mendorong pembahasan pada empat isu utama yang menjadi konsen global, dan tentunya sejalan dengan kepentingan nasional, yaitu:

1. Akses kepada air dan sanitasi sebagai penentu capaian pembangunan berkelanjutan;
2. Praktik-praktik inovatif untuk manajemen air yang inklusif;
3. Air sebagai inti dari aksi iklim;
4. Diplomasi air, kerja sama, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk perdamaian.

Dari pembahasan pada tema tersebut, DPR RI berhasil memainkan peran sebagai tempat untuk *commitment building* parlemen dalam menjadikan isu air sebagai prioritas politik. Pertemuan tersebut telah memberikan ruang diskusi dan berbagi pengetahuan antara anggota parlemen dunia dengan pakar, organisasi internasional, dan organisasi masyarakat sipil dari berbagai negara.

Pada bagian akhir acara, pertemuan parlemen menghasilkan suatu komunikasi yang secara garis besar menitikberatkan pada pentingnya *political will* untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas air serta sanitasi yang layak. Secara konkret, para delegasi parlemen sepakat untuk:

1. Menjadikan upaya mengatasi krisis air sebagai bagian dari percepatan pencapaian SDGs;
2. Mendorong pengelolaan air yang mengedepankan pemenuhan hak asasi manusia;
3. Memaksimalkan peran pengawasan parlemen dan partisipasi publik untuk menyelesaikan berbagai hambatan terhadap akses air;
4. Meningkatkan inklusivitas perumusan kebijakan tentang air;
5. Memastikan air menjadi bagian yang terintegrasi dengan strategi nasional adaptasi perubahan iklim;
6. Mendorong pembiayaan yang inovatif untuk tata kelola air.

ASEAN-RAI

Pada 24 Juli 2024, BKSAP menyelenggarakan pertemuan multipihak kedua (*second joint event*) antara AIPA, Badan Pangan Dunia (Food and Agricultural Organization/FAO), dan International Institute for Sustainable Development (IISD), di Ubud, Bali. Pertemuan tersebut diprakarsai oleh AIPA dalam mengawal ASEAN-RAI. ASEAN-RAI merupakan sebuah panduan dalam mendorong investasi yang berkelanjutan berkaitan dengan tiga hal, yaitu pangan,



BKSAP menyelenggarakan pertemuan multipihak dengan FAO dan IISD.

Foto: Dok. DPR RI.

pertanian, dan kehutanan. ASEAN-RAI ini menjadi peta jalan (*road map*) agar baik investor maupun pemerintah bisa memastikan investasi yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN dapat berkelanjutan dan inklusif, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana menyebutkan bahwa yang terpenting adalah investasi yang bertanggung jawab dan memiliki komitmen menjaga lingkungan, agar di masyarakat juga secara inklusif melibatkan para petani

sehingga mereka mendapatkan manfaat yang cukup besar. Sementara itu, Ketua BKSAP Fadli Zon yang juga Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menekankan pentingnya anggota parlemen di ASEAN untuk lebih fokus pada isu pertanian agar para petani dapat lebih berdaya. Menurut Fadli Zon, kesejahteraan petani belum terjamin sepenuhnya. Di Indonesia saat ini petani skala kecil penghasilannya hanya Rp5,23 juta per tahun, sedangkan petani lainnya sekitar Rp22,9 juta per tahun. Angka itu terlalu kecil dibanding profesi lain, sehingga petani perlu didorong agar bisa lebih berdaya.



27



Indonesia–Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)

Sekalipun diplomasi negara yang menekankan pada pendekatan *government-to-government* telah banyak dilakukan, pendekatan *parliament-to-parliament* sangat diperlukan sebagai penguatan terhadap upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan. Hal itu terutama dengan mempertimbangkan fakta bahwa kebanyakan dari negara-negara yang akan didekati menganut sistem demokrasi parlementer. Pertimbangan inilah yang kemudian menjadi alasan kuat DPR RI menyelenggarakan pertemuan dengan parlemen dari negara-negara Pasifik, melalui kegiatan yang dinamakan Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP).

Pada tahun 2018, tepatnya 23–24 Juli, DPR RI, dengan BKSAP sebagai penjurur, menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan IPPP yang pertama di Jakarta. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan parlemen dari 15 negara di Pasifik, yaitu Republik Fiji, Kepulauan Cook, Federasi Mikronesia,

Republik Kiribati, Republik Nauru, Niue, Republik Palau, Papua Nugini, Republik Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Solomon, Kerajaan Tongga, Tuvalu, Polinesia Prancis, dan Kaledonia Baru. Satu negara tidak mengirimkan perwakilan parlemennya yakni Vanuatu. Mengusung tema “Human Development and Maritime Sustainability”, penyelenggaraan pertemuan IPPP yang pertama itu berhasil menggalang semangat untuk persahabatan, meningkatkan kerja sama, serta membangun kemitraan antar-parlemen negara-negara Pasifik dengan DPR RI.

Di sisi lain, tujuan inti dari diselenggarakannya pertemuan IPPP yang pertama itu adalah sebagai bentuk realisasi dari diplomasi total untuk menghadapi isu—internasionalisasi Papua oleh kelompok separatis dengan meningkatkan *awareness* dari negara-negara di Pasifik terhadap kedaulatan NKRI. Semua negara yang hadir menanggapi dengan sangat positif pelaksanaan pertemuan tersebut dan mayoritas dari mereka menyampaikan secara terbuka penghormatannya terhadap kedaulatan Indonesia dan berkeinginan untuk meningkatkan hubungan bilateral serta memperkuat dialog dengan Indonesia.

IPPP Kedua

Kesuksesan penyelenggaraan IPPP yang pertama pada tahun 2018 tersebut menginspirasi BKSAP untuk mengadakan gelaran IPPP yang kedua. Pertemuan IPPP kedua itu diselenggarakan pada 25–26 Juli 2024, di Jakarta.

Pada tatanan konsep, pertemuan yang kedua dirasa perlu untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan bahwa di tengah berbagai tantangan global dan regional, mulai dari pemulihan pascapandemi, ekonomi, dan lingkungan, sangat penting bagi negara-negara untuk mengutamakan dialog yang terbuka dan inklusif serta memperkuat kerja sama guna menjaga stabilitas sekaligus berkontribusi pada kemajuan dan kemakmuran kawasan. Dalam hal ini, Pasifik, kawasan dengan potensi yang melimpah, memiliki peran krusial dalam membentuk arsitektur regional dan global mengingat keberagamannya. Belum lagi, komitmen negara-negara di kawasan ini untuk bekerja sama dalam rangka mendorong konektivitas regional dan pembangunan yang inklusif bagi semua orang, dengan tetap menghormati kedaulatan masing-masing.

Adapun pada tatanan diplomasi praksis, urgensi penyelenggaraan IPPP kedua adalah untuk menguatkan kembali fondasi hubungan baik antar-parlemen negara-negara Pasifik dengan DPR RI yang telah berhasil dibangun pada IPPP yang pertama. Hal itu terutama dengan mengingat bahwa selama kurun waktu pelaksanaan IPPP yang pertama pada 2018, ke pelaksanaan IPPP yang kedua pada 2024, terdapat masa vakum yang cukup lama akibat pandemi yang menghalangi terlaksananya diplomasi fisik. Padahal, dalam masa vakum tersebut, dinamika yang berkembang di Pasifik cukup pesat. Oleh karena itu, kevakuman diplomasi dengan negara-negara Pasifik yang diakibatkan pandemi Covid-19 harus segera diisi kembali melalui pelaksanaan IPPP yang kedua.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia dan negara-negara Pasifik menghadapi kendala ekonomi dan lingkungan yang membatasi kemampuannya untuk mencapai tujuan pembangunan domestik dan internasional. Pandemi Covid-19 dan konsekuensi cepat dari perubahan iklim (termasuk pemutihan karang, peningkatan permukaan air laut, dan cuaca buruk) telah memperburuk masalah yang sudah ada sebelumnya, menciptakan banyak kendala, dan membebankan biaya pembangunan yang berlebihan. Pandemi tersebut berdampak signifikan pada banyak kegiatan berbasis laut, termasuk pariwisata, perikanan, perdagangan, dan transportasi dunia.

Negara-negara Kepulauan Pasifik, termasuk Indonesia, rentan terhadap bencana alam karena lokasi geografis dan infrastruktur yang tidak memadai. Siklon besar, tsunami, kekeringan parah, banjir, dan letusan gunung berapi, semuanya telah menimbulkan risiko yang signifikan di kawasan ini. Lebih jauh lagi, beberapa negara pulau karang merupakan dataran rendah yang menghadapi potensi ancaman dari kenaikan permukaan air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim. Kendati demikian, Indonesia dan negara-negara Kepulauan Pasifik masih memiliki banyak ruang untuk tumbuh dalam kemitraan mereka. Wilayah lautan yang dimiliki, mencakup lebih dari 70% dari keseluruhan wilayah kedaulatan mereka.

Indonesia, yang dua pertiga bagian wilayahnya adalah laut, berbagi lautan yang sama dengan negara-negara Pasifik, dan



Pertemuan Kedua Indonesia–Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) Tahun 2024. Foto: Dok. DPR RI.

dengan demikian, keduanya memiliki warisan dan kearifan Pasifik yang sama. Indonesia dan negara-negara Pasifik juga memiliki kapasitas untuk pengelolaan kelautan negara-negara di belahan bumi selatan. Negara-negara ini memprioritaskan kerja sama kelautan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, konektivitas, dan keberlanjutan. Namun, kerja sama maritim melibatkan banyak pemangku kepentingan dan mencakup semua sektor dan pilar, termasuk parlemen.

Selain itu, inisiatif Indonesia untuk memperkuat keterlibatan dengan kawasan Pasifik juga didasarkan pada ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) yang telah meletakkan dasar bagi visi kawasan Pasifik sebagai kawasan yang terintegrasi dan saling

terhubung secara erat. Karena itu, kerja sama antarnegara untuk mencapai kesejahteraan bersama di kawasan menjadi hal yang fundamental. Dengan mengusung tema “Partnership for Prosperity: Fostering Regional Connectivity and Inclusive Development”, DPR RI bersama-sama dengan parlemen negara-negara Pasifik berdiskusi seputar kontribusi lembaga legislatif untuk bekerja sama dan bersinergi dalam berbagai isu, seperti sosial budaya, pendidikan, pemberdayaan perempuan, pariwisata, ekonomi, sektor maritim, perubahan iklim dan bencana, serta tantangan lingkungan lainnya, dalam 2nd Meeting of the Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership.

“Mari kita perkuat semangat persaudaraan, rasa saling percaya, dan sikap saling menghormati, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah,” kata Presiden.

Agar diskusi dapat lebih terarah, pertemuan kedua IPPP yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo itu menekankan jalannya diskusi pada tiga hal pokok. *Pertama*, untuk memperkuat kerja sama antarparlemen di antara negara-negara yang berbagi Samudra Pasifik. *Kedua*, untuk mengeksplorasi hasil konkret yang mendorong konektivitas, keterlibatan, dan interaksi

regional di antara negara-negara yang berpartisipasi dalam IPPP. *Ketiga*, untuk memperkuat kerja sama pembangunan berkelanjutan dan inklusif untuk kawasan yang lebih stabil dan sejahtera.

Presiden Joko Widodo dalam kata sambutannya menekankan bahwa kita semua menghadapi tantangan-tantangan besar, baik dari sisi ketidakpastian ekonomi, ketegangan geopolitik antar-kekuatan besar, maupun ancaman perubahan iklim, dan berbagai krisis, dan kerja sama parlemen dapat dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi *best practice*, dalam mencari solusi bersama. Presiden sendiri menekankan tiga bidang penting yang harus menjadi perhatian bersama, yakni perubahan iklim, ekonomi biru yang merupakan potensi besar kawasan Pasifik, dan SDM. “Mari kita perkuat semangat persaudaraan, rasa saling percaya, dan sikap saling menghormati, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah,” kata Presiden.¹

Pertemuan ini juga menjajaki upaya-upaya untuk meningkatkan keterlibatan di antara negara-negara Pasifik dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman serta keunikan masing-masing. Selain itu, mengingat tantangan yang menghambat kawasan ini, mulai dari implikasi pascapandemi yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor pariwisata, dampak cepat perubahan iklim, termasuk pemutihan karang, naiknya

1 Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, (2024, 25 Juli), “Presiden Buka Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)”, <https://setkab.go.id/presiden-buka-indonesia-pacific-parliamentary-partnership-ipppt/>.



Pertemuan pimpinan DPR RI dengan delegasi dari Melanesian Spearhead Group (MSG) untuk meluruskan informasi-informasi yang salah soal Papua.

Foto: Dok. DPR RI.

permukaan air laut, hingga cuaca ekstrem, serta upaya-upaya untuk mencapai Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, DPR RI berkomitmen untuk membina Pasifik yang lebih terhubung yang dapat memperdalam interaksi, kerja sama, dan kolaborasi.

Menilai urgensi pertemuan kedua IPPP, Pimpinan BKSAP berinisiatif untuk meningkatkan mekanisme pertemuan menjadi lebih rutin dan formal melalui pembentukan Majelis DPR RI dengan parlemen negara-negara Pasifik, sehingga

namanya menjadi Indonesia–Pacific Parliamentary Assembly. Peningkatan status pertemuan menjadi lebih formal ini dirasa perlu agar ada forum regional khusus parlemen, yang dapat secara rutin, berkala, dan berkelanjutan mendiskusikan berbagai potensi kerja sama antara DPR RI dan parlemen negara-negara Pasifik. Rangkaian pertemuan kedua IPPP ditutup dengan *chair's summary* sebagai sebuah dokumen politik yang menekankan pada pentingnya kerja sama antara Indonesia dan negara-negara Pasifik untuk membangun konektivitas regional.

Di sela-sela penyelenggaraan IPPP yang kedua, pada 26 Juli 2024, DPR RI mengadakan pertemuan dengan perwakilan parlemen dari negara-negara yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), yang terdiri dari Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua BKSAP Fadli Zon. Pertemuan DPR–MSG itu, menurut Fadli Zon, untuk meluruskan informasi-informasi yang salah soal Papua. Usai pertemuan, Fadli Zon menjelaskan, anggota MSG berterima kasih atas penjelasan dari DPR soal Papua.



28

FOTO: VECTEEZY

Indonesia-Africa Parliamentary Forum (IAPF)

Benua Afrika memiliki hubungan historis yang erat dengan Indonesia. Hal ini bukan karena kedekatan letak geografis, melainkan karena nilai-nilai yang sama, yaitu semangat solidaritas, anti-kolonialisme, dan keinginan untuk saling menjalin kerja sama di antara negara-negara di belahan Bumi selatan. Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955 dan Gerakan Non-Blok (GNB) yang didirikan pada tahun 1961 menandai sejarah panjang hubungan Indonesia dengan Benua Afrika.

KAA merupakan konferensi interkontinental pertama yang pernah diselenggarakan di dunia. Dalam rangka merayakan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika, Indonesia menyelenggarakan Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-2 pada 1–3 September 2024 di Bali dengan mengusung tema “Bandung Spirit for Africa’s Agenda 2063”. *Bandung Spirit*, yang lahir dari KAA 1955, masih relevan dengan situasi saat ini. *Bandung Spirit* mengacu

kepada semangat negara-negara peserta KAA 1955 untuk bekerja sama saling menguntungkan. Indonesia dan negara-negara Afrika memiliki kecocokan visi, yakni *Visi Indonesia Emas 2045* dan *Africa's Agenda 2063*.

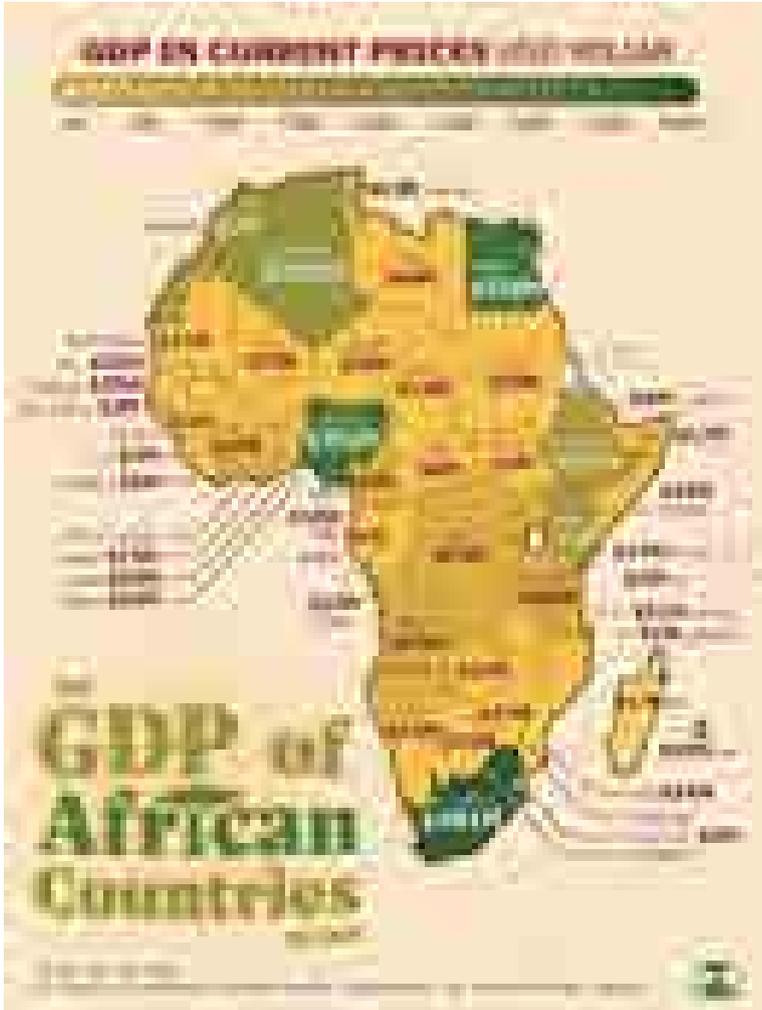
Africa's Agenda 2063 adalah cetak biru dan rencana induk Afrika untuk mengubah benua tersebut menjadi pusat kekuatan global di masa depan. Ini merupakan kerangka strategis bangsa-bangsa Afrika untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Asal mula Agenda 2063 adalah kesadaran para pemimpin Afrika bahwa ada kebutuhan untuk memfokuskan dan memprioritaskan kembali agenda Afrika dari perjuangan melawan apartheid dan pencapaian kemerdekaan politik menjadi memprioritaskan pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif untuk memosisikan ulang Afrika menjadi pemain dominan di arena global sekaligus juga menandai 100 tahun Uni Afrika yang didirikan pada 25 Mei 1963.¹

Kerja Sama Antar-Parlemen

Secara ekonomi, kerja sama Indonesia dan negara-negara Afrika memiliki potensi yang sangat besar. Jika digabung, kedua entitas itu memiliki produk domestik bruto (PDB) gabungan sebesar US\$4,4 triliun dan pasar dengan populasi sebanyak 1,7 miliar.²

1 African Union, (n.d.), "Agenda 2063: The Africa We Want", <https://au.int/en/agenda2063/overview>.

2 Kementerian Luar Negeri, (2024, 29 Juni), "Persiapan Indonesia-Africa Forum ke-2, Wamenlu RI Tekankan Semangat Konferensi Asia-Afrika", <https://kemlu.go.id/portal/id/read/6012/berita/persiapan-indonesia-africa-forum-ke-2-wamenlu-ri-tekankan-semangat-konferensi-asia-afrika>.



Potensi kerja sama ekonomi memang sangat luar biasa. Benua Afrika merupakan rumah bagi 30% cadangan mineral dunia. Permintaan akan sumber daya ini diperkirakan akan melampaui 315.000 ton pada tahun 2030, yang berarti lebih dari dua kali lipat volume pada tahun 2021. Peluang komersial

sumber daya strategis ini meningkatkan pentingnya mereka sebagai pelaku ekonomi global. Selain kaya akan sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi Afrika diperkirakan akan mendapatkan momentum positif di tahun-tahun mendatang. Meskipun terjadi perlambatan pertumbuhan PDB regional, yang turun menjadi 3,1% pada tahun 2023 dari 4,1% pada tahun 2022, benua ini akan tetap menjadi kawasan dengan pertumbuhan tercepat kedua setelah Asia.³

“ BKSAP DPR RI, yang merupakan *focal point* diplomasi parlemen DPR RI, merespons situasi ini dan berkomitmen untuk memperkuat hubungan yang telah terjalin dan mendorong terwujudnya kerja sama strategis antara negara-negara Afrika dan Indonesia.

Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, yang merupakan *focal point* diplomasi parlemen DPR RI, merespons situasi ini dan berkomitmen untuk memperkuat hubungan yang telah terjalin dan mendorong terwujudnya kerja sama strategis antara negara-negara Afrika dan Indonesia. Oleh karena itu, bersamaan dengan penyelenggaraan IAF,

3 African Development Bank Group, (2024), "African Economic Outlook 2024", <https://www.afdb.org/en/knowledge/publications/african-economic-outlook>.

BKSAP juga menyelenggarakan Forum Parlemen Indonesia-Afrika (Indonesia-Africa Parliamentary Forum/IAPF) yang pertama, juga di Bali, pada 31 Agustus–3 September 2024. IAPF menjadi wujud nyata upaya penguatan kerja sama yang lebih intens antara anggota parlemen kedua kawasan. IAPF berkomitmen untuk mengembangkan rencana komprehensif untuk kerja sama pembangunan jangka panjang antara Indonesia dan Afrika, dengan fokus pada berbagai sektor, di antaranya, ekonomi, kesehatan, pertanian, energi, dan bidang-bidang penting lainnya.

IAPF berupaya menegaskan kembali dedikasi DPR RI sebagai perwakilan rakyat untuk melaksanakan fungsi parlemen, khususnya melalui fungsi diplomasi parlemen, untuk berkolaborasi guna meningkatkan konektivitas ekonomi, politik, dan sosial antara Indonesia dan negara-negara Afrika. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas dan menghasilkan momentum untuk meningkatkan konektivitas regional, yang akan memberikan peluang untuk menjadikan masa depan kawasan dan warganya lebih tangguh, adil, dan sejahtera.

Pertemuan IAPF 2024 ini menekankan pada peran parlemen yang harus terus mendorong upaya mengurangi kesenjangan antarnegara dan mencapai pembangunan inklusif dengan memajukan transformasi digital; hubungan antarmasyarakat yang lebih kuat; memfasilitasi pertukaran budaya; dan pertukaran pengetahuan dan teknologi, termasuk melalui



Kerja Sama Selatan-Selatan (*South-South Cooperation*) dan kerja sama Triangular.

Para delegasi IAPF juga sepakat bawa perlu ada upaya untuk mengurangi kerentanan kawasan terhadap krisis pangan global dengan mendorong kerja sama dan berinvestasi dalam penelitian, berbagi teknologi, dan pemberdayaan di bidang pertanian. Sangat penting bagi parlemen untuk memanfaatkan program pertukaran pakar dan ilmuwan pertanian antara Indonesia dan Afrika guna memfasilitasi penyebaran pengetahuan dan pembelajaran Selatan-Selatan. Selain itu, ditekankan pula bahwa parlemen Indonesia dan negara-negara Afrika harus meningkatkan kolaborasi dalam

bidang kesehatan melalui investasi di industri farmasi, termasuk pengembangan vaksin untuk menangkal potensi penyebaran penyakit di masa mendatang.

Tidak dapat dimungkiri bahwa sektor perdagangan dan investasi memegang peranan penting dalam memacu pertumbuhan sosial dan ekonomi. Selain itu, perdagangan dan investasi juga dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, yang termasuk elemen penting dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Forum ini mendiskusikan potensi kerja sama yang besar yang perlu dioptimalkan, mengingat Indonesia dan Afrika memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga membutuhkan kerja sama untuk melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam transisi energi terbarukan dan ramah lingkungan.







BAGIAN

TVX

BKSAP 2.0



29

Menyambut
BKSAP di masa depan
dengan BKSAP 2.0.
Foto: vecteezy

BKSAP 2.0: Diplomasi Parlemen Indonesia ke Depan

Realitas politik global saat ini memiliki keterhubungan yang rumit baik antarnegara, antaraktor, maupun antarkawasan. Seiring dengan itu, tidak ada lagi alasan untuk melakukan dikotomi kepentingan nasional dan internasional. Mereka saling terhubung dan, oleh karenanya, negara tidak dapat lagi menuntaskan penyelesaian isu-isu bencana, dunia siber, korupsi, krisis air bersih, pandemi, dan lain-lain sendirian.

Akan tetapi, ada semacam diskoneksi antara aspirasi publik dan sistem multilateral dalam penyelesaian masalah-masalah tertentu. Di antaranya, yang terlihat jelas, adalah dengan mencuatnya gelombang protes antiperang dan keberpihakan publik di berbagai negara untuk kemanusiaan di Palestina dalam konflik Palestina-Israel pasca-Oktober 2023. Aksi masif publik di berbagai belahan dunia tersebut tidak terkonversi menjadi keputusan global dalam penyelesaian

tindak sewenang-wenang Israel yang membombardir Gaza hingga menelan korban lebih dari 38.000 jiwa. Diskoneksi ini mengkhawatirkan.

Diplomasi Parlemen Masa Depan

Harus diakui, ada ruang kosong dalam dialektika dan aksi global yang tidak dapat ditangani oleh pemerintah semata. Konsep *public private partnership* (PPP) memberi contoh solusi bagaimana isu pendanaan nyata-nyata tidak dapat ditangani oleh negara semata sehingga membutuhkan partisipasi swasta. Begitu pula dengan keterlibatan parlemen di level global. Sebagai pihak yang merupakan representasi lokal (konstituen/daerah pemilihan), institusi legislatif dan para legislatornya sejatinya bisa membantu tata kelola global, termasuk PBB, untuk mengidentifikasi masalah dan membangun hubungan lebih dekat dengan publik.

Harapan itu sudah dikemukakan oleh Sekjen PBB di masa lalu, Kofi Annan, ketika pada tahun 2003 ia membentuk Panel of Eminent Persons on United Nations–Civil Society Relations yang diketuai mantan Presiden Brasil Fernando Henrique Cardoso. Annan berharap, panel itu bisa mengkaji bagaimana agar terjadi hubungan lebih baik antara PBB dan organisasi internasional lainnya dengan organisasi nonpemerintah dan organisasi masyarakat sipil lainnya, termasuk parlemen, supaya melahirkan hubungan baru yang lebih baik antara lembaga-lembaga dunia itu dan publik.¹ Hasil laporan panel

¹ Kofi Annan, (2004), "Note by the Secretary-General", dalam UN, *We the peoples: civil society, the United Nations and global governance – Report of the Panel of Eminent Persons on UN-Civil Society Relations* (hal. 1), <https://archive.globalpolicy.org/images/pdfs/0611report.pdf>.

tersebut, yang dikenal sebagai Cardoso Report, menemukan adanya perbedaan substansi globalisasi politik dengan institusi politiknya yang masih berada di tataran nasional, sesuatu yang menurut Cardoso disebut sebagai lemahnya pengaruh demokrasi tradisional dalam hal-hal terkait tata kelola global yang menjadi alasan mengapa rakyat di berbagai belahan dunia mendesak akuntabilitas demokratis yang lebih kuat dari organisasi-organisasi internasional.²

Adalah *justified* atau dibenarkan apabila kemudian DPR mengambil peran diplomasi parlemen, seiring dengan termaktubnya mandat-mandat internasional tersebut baik di UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU MD3 dan perubahannya, maupun di Tata Tertib DPR RI. Ini dilakukan baik dengan alasan membangun keterhubungan isu, paradigma, wacana, dan aspirasi, maupun memperkuat keterlibatan dalam tata kelola global.

Dengan makin banyaknya isu nasional yang masuk ke dalam agenda global, diplomasi parlemen tidak dapat lagi dipandang hanya sebagai mekanisme pelengkap dari diplomasi negara. Aspirasi agar parlemen dapat makin sering berperan dalam isu-isu global telah mencuat dalam berbagai agenda. Hal itulah yang kemudian melatarbelakangi munculnya platform kolaborasi antara IPU dan organisasi internasional seperti IPU-UN Parliamentary Hearing, Parliamentary Conference of

2 United Nations, (2004), "We the peoples: civil society, the United Nations and global governance – Report of the Panel of Eminent Persons on UN-Civil Society Relations", hal. 8, <https://archive.globalpolicy.org/images/pdfs/0611report.pdf>.

the WTO, Forum of Parliamentarians at the CoSP UNCAC, ataupun ASEAN-AIPA Interface Meeting.

Ke depan, diplomasi parlemen perlu lebih maju lagi untuk memastikan agenda internasional berjalan dalam wilayah kebijakan nasional masing-masing. Begitu pun sebaliknya, diplomasi parlemen perlu turut serta memperjuangkan kepentingan nasional terakomodasi menjadi kepentingan politik global. Untuk itu, DPR perlu secara konsisten berperan dalam tata kelola global dengan menggaungkan keterlibatan legislatif dalam arena diplomasi internasional. DPR harus terus menyuarakan pentingnya parlemen melakukan tinjauan internasional atau terlibat dalam mekanisme lain untuk tinjauan atas pelaksanaan konvensi/traktat. Suara tersebut mulai lantang mewujud dalam beberapa mekanisme pertemuan parlemen internasional.

Di luar itu, BKSAP perlu pula menegaskan pentingnya alat kelengkapan dewan (AKD) untuk memperlakukan konvensi/traktat sebagai produk internasional yang perlu diawasi dan dipenuhi ketentuannya di tingkat nasional. Sepanjang tidak ada reservasi berarti pada instrumen internasional yang telah disepakati negara, DPR idealnya mampu melakukan tindak lanjut untuk mengukur dan mengevaluasi pelaksanaan konvensi/traktat. BKSAP pun dapat pula membangun wacana untuk berkontribusi di level nasional dalam mekanisme pengawasan dimaksud.

Untuk mendukung politik luar negeri pemerintah, DPR dan BKSAP dapat bersiap lebih matang dan detail dalam berdiplomasi. Kesiapan ini tidak hanya sebatas teknis administratif ataupun substansi. Agar argumen dapat lebih jelas dengan *rationale* yang kuat, DPR perlu melengkapi diri dengan data yang memadai mengenai hal-hal terkait kepentingan yang dibawa. Data tersebut tidak hanya berkaitan dengan isu, tetapi juga hal-hal personal, jika dipandang perlu, dari kawan bicara pada saat perjamuan ataupun pertemuan.

“ DPR-BKSAP dapat mendorong pengembangan program serupa sebagai basis identifikasi praktik terbaik yang dapat bermuara pada penyusunan produk legislasi yang lebih baik.

Membangun narasi personal dapat lebih mendekatkan dan memperdalam hubungan antara anggota DPR RI dan kawan bicara dari pemangku kepentingan internasional lainnya.

Diplomasi parlemen ke depan perlu berbasis data. Oleh karena itu, BKSAP dapat mempersiapkan bangunan pusat data diplomasi parlemen yang berisikan figur dan statistik nasional tentang keparlemenan (misalnya, komposisi, persentase dan

jumlah kursi partai di parlemen, komposisi pemuda dan perempuan, dan rentang usia anggota parlemen) serta pusat data legislasi global untuk memudahkan identifikasi dan penggaungan kepentingan dalam isu-isu internasional. Data yang bersifat nonkuantitatif juga perlu diintegrasikan dengan baik sebagai bekal informasi dasar bagi pelaksanaan diplomasi DPR.

Bangunan pusat data legislasi sejatinya telah diinisiasi sejumlah organisasi, seperti GOPAC dengan LEGISTrack yang memonitor perkembangan data legislasi antikorupsi pada periode tertentu (Januari–Juni 2023), ataupun IPU dengan partnernya yakni LSE Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment melalui Climate Change Laws of the World. Namun, hal tersebut masih dalam fokus isu tertentu. DPR-BKSAP dapat mendorong pengembangan program serupa sebagai basis identifikasi praktik terbaik yang dapat bermuara pada penyusunan produk legislasi yang lebih baik.

Berbekal data dan informasi pendahulu serta pengalaman sebelumnya, diplomasi parlemen ke depan perlu berorientasi pada upaya penanganan beberapa isu yang memerlukan penanganan cepat. Prioritas utama saat ini adalah bagaimana DPR RI dapat berkontribusi lebih jelas dan konkret dalam upaya perdamaian kawasan dan global. Konflik Israel-Palestina kini berpotensi melebar menjadi konflik Laut Merah setelah

Kelompok Houthi, Yaman, membajak kapal-kapal dagang yang melintas. Ketegangan makin berlipat akibat serangan Amerika Serikat dan Inggris ke Yaman. Di sisi lain, titik panas konflik lainnya juga menyebar di Iran hingga Suriah, bahkan Pakistan. Apabila situasi tersebut tidak disikapi dengan kepala dingin, soliditas masyarakat Muslim dalam berjuang demi Palestina akan terkoyak.

Dialog antarparlemen untuk mendinginkan situasi sangat penting guna mencegah eskalasi konflik lebih lanjut. Parlemen adalah titik krusial mengingat sebagian besar lembaga legislatif memiliki wewenang menyatakan perang ataupun perdamaian. Apabila dialog untuk menjembatani upaya perdamaian dapat dilakukan, tentu saja ini merupakan capaian tersendiri bagi diplomasi parlemen.

DPR juga perlu menindaklanjuti bentuk “mekanisme yang memadai” dalam pengawasan pelaksanaan komitmen 5PC dalam penyelesaian konflik di Myanmar lantaran hal ini telah menjadi mandat resolusi AIPA. Kontinuitas untuk menghidupkan isunya terus-menerus dalam setiap pertemuan AIPA adalah perwujudan mandat turut serta melaksanakan ketertiban dunia. Ini juga sebagai upaya agar kita tidak lupa akan situasi *hotspot* di kawasan sendiri yang juga direpresentasikan dengan eksistensi tarik-menarik kepentingan di kawasan Indo-Pasifik.



Legislasi Hijau

Prioritas isu berikutnya adalah dalam hal kebijakan hijau. Semangat menuju upaya perlindungan lingkungan dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim harus tetap dijaga di kalangan parlemen. Semua dilakukan demi bumi kita dan generasi masa depan. Ke depan, BKSAP dapat menindaklanjuti Buku Putih *Green Economy* dengan menyusun dokumen *policy options* yang dapat menjadi alternatif bagi penguatan produk-produk terkait legislasi hijau DPR, seperti RUU Perubahan Iklim dan RUU Masyarakat Adat.

Selain itu, BKSAP perlu bersiap untuk terlibat dalam berbagai diskursus global terkait masa depan. Langkah ini perlu dilakukan sebagai upaya tindak lanjut Konferensi Tingkat Tinggi untuk Masa Depan (Summit for the Future), yang usai digelar September 2024. Dokumen keluarannya, yakni Sebuah Pakta untuk Masa Depan, memiliki lingkup bahasan terkait:

1. Pembangunan berkelanjutan dan pembiayaan untuk pembangunan;
2. Perdamaian dan keamanan internasional;
3. Sains, teknologi dan inovasi, dan kerja sama digital;
4. Pemuda dan generasi masa depan;
5. Mentransformasi tata kelola global.

Diskursus dalam isu masa depan akan signifikan khususnya dalam isu-isu siber dan teknologi digital mengingat perkembangan kedua hal tersebut diprediksi makin cepat, khususnya dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan. DPR dan BKSAP perlu konsisten menyuarakan kendala dan tantangan terkait dampak penggunaan kecerdasan buatan, termasuk dalam kerja-kerja parlemen, agar masyarakat tidak terlena dengan masif dan cepatnya digitalisasi.

Diskursus tindak lanjut dari beragam isu tersebut sangat relevan untuk diperdalam oleh BKSAP dalam kontribusinya untuk mempercepat pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Bagaimanapun juga, kita akan makin dekat ke garis akhir dari pencapaian TPB.

Enam tahun lagi dari sekarang, kita akan berada di garis akhir pencapaian TPB. Belum tergambar apa yang akan muncul usai TPB, tetapi, kontribusi pemikiran dari KTT untuk Masa Depan dapat menjadi landasan mengenai apa yang akan terjadi setelah 2030.

Selain berkontribusi secara global, DPR perlu pula memperkuat perannya untuk menjadi pemengaruh. BKSAP menjadi aktor kunci dalam penguatan pengaruh tersebut. Selain itu, BKSAP juga perlu pula menjadi penyedia data informasi yang akurat atas isu-isu internasional dan kebijakan domestik dari parlemen negara lain. BKSAP berpandangan cukup ideal apabila di masa mendatang DPR memiliki kantor-kantor penghubung (*liaison offices*) di sejumlah negara dengan tradisi keparlemenan serta peran parlemen yang kuat. Praktik serupa juga ditunjukkan sejumlah negara, seperti Korea Selatan yang memiliki atase legislatif di Indonesia, Perpustakaan Kongres Amerika Serikat yang memiliki kantor di Jakarta, dan Parlemen Eropa yang membuka kantor penghubung untuk ASEAN, AIPA, dan DPR di Jakarta.

Tidak hanya itu, sebagai upaya memperkuat peran internasional DPR, BKSAP juga berpandangan perlunya sistem pendukung DPR (sekretariat dan tenaga ahli) diperkuat dengan pengayaan pengalaman internasional dengan program-program seperti tukar pengalaman metode kerja parlemen di negara lain ataupun penugasan khusus di organisasi-organisasi antarparlemen melalui kontribusi sukarela untuk pendanaan

program terfokus. Langkah-langkah ini merupakan upaya afirmasi lembaga legislatif untuk dapat makin kuat, baik dalam kapasitas internasional maupun nasional. Kedua hal tersebut, bersama dengan sumbangsih ide-ide dalam catatan kerja BKSAP periode-periode sebelumnya, semoga dapat menjadi bahan dialektika mendalam untuk memperkuat DPR beserta sistem pendukungnya.

“ BKSAP menjadi aktor kunci dalam penguatan pengaruh tersebut. Selain itu, BKSAP juga perlu pula menjadi penyedia data informasi yang akurat atas isu-isu internasional dan kebijakan domestik dari parlemen negara lain.

Dapat dikatakan bahwa peran BKSAP masa depan, yang bisa disebut BKSAP 2.0, adalah dalam rangka mendorong DPR untuk berperan lebih banyak dalam tata kelola global, berkontribusi dalam upaya perdamaian kawasan dan global, mengedepankan diplomasi hijau demi Bumi kita dan generasi masa depan, serta diplomasi parlemen berbasis data.

Committee of the Future

Mengingat pentingnya mengantisipasi isu atau tantangan yang dapat terjadi di masa depan dalam pengambilan keputusan saat

ini, BKSAP DPR RI mendorong agar Committee of the Future atau Komite Masa Depan dibentuk dan dioperasionalkan secara efektif oleh DPR RI. Dalam hal ini, pembentukan Komite Masa Depan di DPR RI dinilai sangat strategis karena dunia yang berkembang pesat dan telah memasuki era digital. Parlemen di beberapa negara juga telah membentuk komite yang sepadan, seperti Parlemen Finlandia, Parlemen Islandia, dan Parlemen Lithuania.

Salah satu isu yang penting untuk diprioritaskan oleh DPR RI adalah penggunaan teknologi baru, termasuk *artificial intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan, serta potensi



Komite Masa Depan di DPR RI sangat strategis karena dunia yang berkembang pesat dan telah memasuki era digital.

dampaknya terhadap demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat secara luas.

Melalui pembentukan komite tersebut, DPR RI melalui fungsi diplomasi parlemennya dapat bekerja sama dengan bertukar wawasan dan pengalaman dengan parlemen dan pemangku kepentingan yang relevan lainnya terkait strategi dan inisiatif yang perlu diambil dalam menghadapi potensi isu atau tantangan yang terjadi di masa depan. Hal yang tak kalah penting, DPR RI, secara nasional, dapat mengikutsertakan dan mengarusutamakan isu-isu serta strategi tersebut dalam menjalankan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasannya.

Sebagai tambahan, BKSAP DPR RI pada tahun 2023 telah mengikuti kegiatan Second World Summit of the Committees of the Future 2023, yang bertema “Bringing the Future to the Present: The Democracy of the Future, Artificial Intelligence and Parliaments”, dan akan terus berpartisipasi aktif ke depannya pada forum tersebut dan forum terkait lainnya.



REFERENSI

- 144th IPU Assembly Resolution. (2022, Maret). “Peaceful resolution of the war in Ukraine, respecting international law, the Charter of the United Nations and territorial integrity”. <https://www.ipu.org/file/13992/download>.
- 44th AIPA General Assembly RES.44GA/2023/Eco/01. (2023, Agustus). “Accelerating Green Transition for Sustainable and Resilient Economic Growth”. <https://cms.aipasecretariat-dms.org/storage/2023/Economic/resolution-on-accelerating-green-transition-for-sustainable-and-resilient-economic-growth.pdf>.
- 44th AIPA General Assembly RES.44GA/2023/Pol/03. (2023, Agustus). “Maintaining Regional Peace, Security, and Stability through Dialogue and Collaboration”. <https://cms.aipasecretariat-dms.org/storage/2023/Political-Security/resolution-on-maintaining-regional-peace-security-and-stability-through-dialogue-and-collaboration.pdf>.
- 44th AIPA General Assembly RES.44GA/2023/Pol/06. (2023, Agustus). “Parliamentary Cooperation in Contributing to Long-Lasting Peace in Myanmar”. <https://cms.aipasecretariat-dms.org/storage/2023/Political-Security/resolution-on-parliamentary-cooperation-in-contributing-to-long-lasting-peace-in-myanmar.pdf>.
- 44th AIPA General Assembly RES.44GA/2023/Soc/02. (2023, Agustus). “Mobilizing Parliamentary Actions on Promoting Green Jobs and Skills to Support Green Economic Transition”. <https://cms.aipasecretariat-dms.org/storage/2023/Socio-Cultural/resolution-on-mobilizing-parliamentary-actions-on-promoting-green-jobs-and-skills-to-support-green-economic-transition.pdf>.

- 44th AIPA General Assembly RES.44GA/2023/WAIPA/02. (2023, Agustus). “Enhancing ASEAN Resilience through Women Leadership and Gender-Responsive Parliaments”. <https://cms.aipasecretariat-dms.org/storage/2023/WAIPA/resolution-on-enhancing-asean-resilience-through-women-leadership-and-gender-responsive-parliaments.pdf>.
- 44th AIPA General Assembly RES.44GA/2023/YPA/01. (2023, Agustus). “Advancing Youth Engagement for Inclusive Development, Economic Transformation, and Democratic Participation”. <https://cms.aipasecretariat-dms.org/storage/2023/Young%20Parliamentarians%20of%20AIPA/resolution-on-advancing-youth-engagement-for-inclusive-development-economic-transformation-and-democratic-participation.pdf>.
- Achmad, N.M. & D. Prabowo. (2024, 20 Maret). “Menko Polhukam: RI Konsisten Sampaikan Keberatan Peta ‘10-Dash Line’ China”. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/20/06145421/menko-polhukam-ri-konsisten-sampaikan-keberatan-peta-10-dash-line-china>.
- African Development Bank Group. (2024). *African Economic Outlook 2024*. <https://www.afdb.org/en/knowledge/publications/african-economic-outlook>.
- African Union. (n.d.). *Agenda 2063: The Africa We Want*. <https://au.int/en/agenda2063/overview>.
- Amanta, F. (2022, 15 Juli). “Unpacking Indonesia’s Digital Accessibility”. CIPS. <https://www.cips-indonesia.org/post/opinion-unpacking-indonesia-s-digital-accessibility>.
- Annan, K. (2004). “Note by the Secretary-General”. Dalam UN, *We the peoples: civil society, the United Nations and global governance – Report of the Panel of Eminent Persons on UN-Civil Society Relations* (hal. 1). <https://archive.globalpolicy.org/images/pdfs/0611report.pdf>.

- Anwar, L.A. (2022, 3 Agustus). “Cerita Korban TPPO di Kamboja: Saya Dipaksa Jadi Operator Penipuan Daring Menarget WNI”. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/08/02/cerita-korban-tppo-di-kamboja-saya-dipaksa-jadi-operator-penipuan-daring-menarget-wni>.
- Badan Pusat Statistik. (2023). “Statistik Pemuda Indonesia 2023”. <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/29/18781f394974f2cae5241318/statistik-pemuda-indonesia-2023.html>.
- Bhowmick, S. (2021). “The Indo-Pacific economics: Inextricable Chinese linkages and Indian challenges”. *Raisina Debates*, ORF Expert Speak, December 8, 2021.
- Chegaboev, K. (2023). “The new constitution: 10 key changes”. Kun.uz. <https://kun.uz/uz/news/2023/05/02/yangi-konstitutsiya-10-ta-asosiy-ozgarish>.
- Cisco.com. (n.d.). “Chapter: Understanding Broadband Access Aggregation”. <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/bbds1/configuration/15-mt/ir-15-mt-book/bba-understanding.html>.
- Darwati, E. & A.D. Tolok. (2023, 27 Juli). “Kontroversi Nama Laut China Selatan Berubah Jadi Laut Natuna Utara”. Bisnis.com. <https://kabar24.bisnis.com/read/20230727/15/1678883/kontroversi-nama-laut-china-selatan-berubah-jadi-laut-natuna-utara>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2011, 7 Juni). “DPR Resmi Batasi Kunjungan Luar Negeri”. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/2817/t/DPR%20RESMI%20BATASI%20KUNJUNGAN%20LUAR%20NEGERI>.
- Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs, United Nations. (2024, 28 Juni). “Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) Outer limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines: Submissions to the Commission: Partial Submission by Malaysia in the South China Sea”. https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_mys_12_12_2019.html.

- Doha Declaration*. (2023). “Paragraf 7”. https://www.gopacnetwork.org/wp-content/uploads/2023/02/Doha-Declaration_English.pdf
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2020). “Dyah Roro bicara tiga faktor fundamental dalam Demokrasi Lingkungan”. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29585/t/javascript>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023, 25 Oktober). “Usulan Resolusi DPR RI tentang Gaza Didukung Separuh Suara Parlemen Dunia”. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/47194/t/Usulan%20Resolusi%20DPR%20RI%20tentang%20Gaza%20Didukung%20Separuh%20Suara%20Parlemen%20Dunia>.
- European Foundation for South Asian Studies (EFSAS). (2018, Mei). “The Rohingya Issue – Its wider ramifications for South Asia”. <https://www.efsas.org/publications/study-papers/the-rohingya-issue-%E2%80%93-its-wider-ramifications-for-south-asia/>.
- Friedrich, J., M. Ge, A. Pickens, & L. Vigna. (2023, 2 Maret). “This Interactive Chart Shows Changes in the World’s Top 10 Emitters”. World Resources Institute. <https://www.wri.org/insights/interactive-chart-shows-changes-worlds-top-10-emitters>.
- Gerszon, D., M. Nishant, Y. Christoph, Lakner, R.A.C. Aguilar, & H. Wu. (2021, 1 Juni). “Updated estimates of the impact of COVID-19 on global poverty: Turning the corner on the pandemic in 2021?”. World Bank Blog. <https://blogs.worldbank.org/en/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-turning-corner-pandemic-2021>.
- Ghosh, A.K., D. Sarkar, & A.B.R. Chaudhury. “Security, Economy, and Ecology: Setting Priorities for Cooperation in the Indo-Pacific”. Orfonline.org. <https://www.orfonline.org/research/security-economy-and-ecology>.
- Google, Temasek and Bain. (2021). “e-Conomy SEA 2021”. <https://www.ain.com/insights/e-conomy-sea-2021/>.” https://unfccc.int/documents/615084?gclid=EAIaIQobChMIzvaQz4H6gwMVxRB7Bx1yxAEwEAAAYASAAEgKfgfD_BwE.

<https://www.ipu.org/event/144th-assembly-and-related-meetings#event-sub-page-25792/>.

<https://www.wri.org/insights/interactive-chart-shows-changes-worlds-top-10-emitters>.

Human Rights Watch. (2020, Oktober). “An Open Prison without End – Myanmar’s Mass Detention of Rohingya in Rakhine State”. https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2020/09/myanmar1020_web.pdf.

ICNL-ECNL. (n.d.). “COVID-19 Civic Freedom Tracker – Keep Civic Space Healthy”. <https://www.icnl.org/covid19tracker/?location=&issue=5&date=&type=2,3,4,5> (untuk melihat jenis deklarasi darurat dapat melalui filter “type”).

International IDEA. (2022). “Global overview of COVID-19: Impact on elections”. <https://www.idea.int/news-media/multimedia-reports/global-overview-covid-19-impact-elections>.

International Monetary Fund. (2020, Juni). “World Economic Outlook – World Economic Outlook Update, June 2020”. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020>.

International Telecommunication Union. (2023). “Facts and Figures 2023: Internet Traffic”. <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2023/10/10/ff23-internet-traffic/>.

International Telecommunication Union. (2023). “Facts and Figures 2023: Internet Use”. <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2023/10/10/ff23-internet-use/>.

Inter-Parliamentary Union (IPU), the United Nations Economic Commission for Europe (ECE) and the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP). (2023, 19 Juni). “Enhancing the role of parliaments in accelerating the achievement of the SDGs: Taking forward the UNGA resolution”. Concept Note.

- Inter-Parliamentary Union. (2021). "Request submitted by the delegation of Indonesia (23 November 2021) 'Global parliamentary support for the humanitarian situation of the Palestinians'". <https://www.ipu.org/documents/2021-11/request-submitted-delegation-indonesia-23-november-2021-global-parliamentary-support-humanitarian-situation-palestinians>.
- Inter-Parliamentary Union. (2022). "144th Assembly and related meetings". <https://www.ipu.org/event/144th-assembly-and-related-meetings#event-sub-page-25792/>.
- Inter-Parliamentary Union. (2024). "Youth participation". <https://www.ipu.org/impact/youth-participation>.
- Inter-Parliamentary Union.(n.d.). "IPU Cooperation with the United Nations". <http://archive.ipu.org/un-c/un-overview.htm>.
- IPCC. (2022). Summary for Policymakers [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Tignor, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem (eds.)]. In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. (2022). "Enhanced Nationally Determined Contribution Republic of Indonesia." https://unfccc.int/documents/615084?gclid=EAIaIQobChMIzvaQz4H6gwMVxRB7Bx1yxAEwEAAyASAAEgKfgfD_BwE.
- Kementerian Luar Negeri. (2024, 29 Juni). *Persiapan Indonesia-Africa Forum ke-2, Wamenlu RI Tekankan Semangat Konferensi Asia Afrika*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/6012/berita/persiapan-indonesia-africa-forum-ke-2-wamenlu-ri-tekankan-semangat-konferensi-asia-afrika>
- Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang. Pasal 7 dan Pasal 8. <https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/ACTIP.pdf>

- McKinsey & Company. (2016). “Unlocking Indonesia’s Digital Opportunity”. https://www.mckinsey.com/-/media/McKinsey/Locations/Asia/Indonesia/Our%20Insights/Unlocking%20Indonesias%20digital%20opportunity/Unlocking_Indonesias_digital_opportunity.ashx.
- Media DPR RI. (2024). “Usulan Konkret BKSAP DPR RI ke Parlemen OKI dan Parlemen Asia Selamatkan Palestina”. <https://emedi.dpr.go.id/2024/01/13/usulan-konkret-bksap-dpr-ri-ke-parlemen-ok-i-dan-parlemen-asia-selamatkan-palestina/>.
- Meijerink, G., P.A.G. van Bergeijk, & N. Hendriks. (2020, 2 Oktober). “Covid-19 and world merchandise trade: Unexpected resilience”. CEPR. <https://cepr.org/voxeu/columns/covid-19-and-world-merchandise-trade-unexpected-resilience>.
- Odigbo, B., F. Eze, & R. Odigbo. (2020, 17 Juli). “COVID-19 lockdown controls and human rights abuses: the social marketing implications”. *Emerald Open Research*, 2: 45. DOI: 10.35241/emeraldopenres.13810.1.
- OHCHR. (2020). “COVID-19: Exceptional measures should not be cover for human rights abuses and violations” – Bachelet. <https://www.ohchr.org/en/statements/2020/04/covid-19-exceptional-measures-should-not-be-cover-human-rights-abuses-and-violations>.
- Pasal 16 dan Annex 2 Piagam ASEAN. <https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf>.
- Pasal 7 dan Pasal 8 Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang. <https://www.asean.org/wp-content/uploads/2015/12/ACTIP.pdf>
- Piagam ASEAN. Pasal 16 dan Annex 2. <https://asean.org/wp-content/uploads/images/archive/publications/ASEAN-Charter.pdf>
- Pörtner, H.O., D.C. Roberts, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, M. Tignor, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem (eds.). (2022). “Summary for Policymakers”. IPCC. Dalam Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022, *Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*.

- Reported Impact Since 7 October 2023. (2024). “UN OCHA”. <https://www.ochaopt.org/>.
- Rizqo, K.A. (2023, 30 Mei). “BP2MI Ungkap Data Ngeri WNI Korban TPPO, Ribuan Depresi hingga Cacat”. Detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-6746983/bp2mi-ungkap-data-neri-wni-korban-tpo-ribuan-depresi-hingga-cacat>.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2024, 25 Juli). “Presiden Buka Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP)”. <https://setkab.go.id/presiden-buka-indonesia-pacific-parliamentary-partnership-ipppl/>. Statuta AIPA Bag. IV (8).
- Stavridis, S. & D. Jancic. (Eds.). (2017). *Parliamentary Diplomacy in European and Global Governance*. Leiden: Brill Nijhoff.
- Sugiharto, S. (2013, 18 September). “M. Sharifudin Yusop: Reviving Malay As a lingua franca”. *The Jakarta Post*. <https://www.thejakartapost.com/news/2013/09/18/m-sharifudin-yusop-reviving-malay-a-lingua-franca.html>.
- United Nations. (2004). “We the peoples: civil society, the United Nations and global governance – Report of the Panel of Eminent Persons on UN-Civil Society Relations”, hal. 10. <https://archive.globalpolicy.org/images/pdfs/0611report.pdf>.
- United Nations. (2018). “Global cost corruption at least 5% of world gross domestic product, Secretary-General tells Security Council, citing WEF data”. <https://press.un.org/en/2018/sc13493.doc.htm>.
- United Nations. (2022). “Gender equality can’t wait – we must achieve it now for current and future generations”. <https://www.un.org/en/desa/we-must-achieve-it-now-current-and-future-generations>.
- United Nations. (2023). “Global Issues: Youth”. <https://www.un.org/en/global-issues/youth#:~:text=Today%2C%20there%20are%201.2%20billion,cent%2C%20to%20nearly%201.3%20billion>

- UN Women. (2020, 2 September). “Press release: COVID-19 will widen poverty gap between women and men, new UN Women and UNDP data shows”. <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2020/8/press-release-covid-19-will-widen-poverty-gap-between-women-and-men>.
- UNODC. (2021). “GOPAC Submission to the UNGASS 2021”. https://ungass2021.unodc.org/uploads/ungass2021/documents/session1/contributions/GOPAC_2nd_UNGASS_2021_SUBMISSION.pdf.
- WHO. (2024, 14 Juli). “WHO COVID-19 dashboard”. <https://data.who.int/dashboards/covid19/deaths?n=c>.
- World Bank. (2022). “Chapter 1. The economic impacts of the COVID-19 crisis”. <https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2022/brief/chapter-1-introduction-the-economic-impacts-of-the-covid-19-crisis>.
- World Meteorological Organization. (2024, 19 Maret). “State of the Global Climate 2023”. <https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate-2023>.
- WTO. (2022). “Chapter III: World trade and economic growth, 2021-22”. World Trade Statistical Review 2022. https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtsr_2022_c3_e.pdf.
- Yusuf, I. (n.d.). “Islam di Myanmar: Bacaan Pengantar”. Program Magister Agama dan Lintas Budaya – UGM. <https://cracs.ugm.ac.id/islam-di-myanmar-bacaan-pengantar/>.
- Zon, F. (2020, 8 Februari). “Fadli Zon: Soliditas Parlemen Negara Muslim, Faktor Penting Mewujudkan Kemerdekaan Palestina”. https://www.instagram.com/p/B8TLsB2JNad/?img_index=1.



Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) periode 2019-2024 menghadapi tantangan yang sulit. Lebih dari separuh masa tugasnya dilaksanakan dalam suasana pandemi Covid-19. Sebagai Alat Kelengkapan Dewan yang dibentuk untuk menjadi ujung tombak diplomasi parlemen, kondisi itu membuat banyak tugas BKSAP terkendala karena harus mengikuti protokol kesehatan ketat. Bahkan dalam banyak kesempatan diplomasi harus dilakukan melalui *video conference* karena tidak memungkinkan tatap muka langsung.

Selain bencana penyakit tersebut, tantangan yang dihadapi BKSAP sebagai wakil DPR RI adalah situasi politik regional dan global yang memanas. Perang Rusia-Ukraina, konflik Israel-Palestina, kasus Rohingya di Myanmar, dan lain-lain yang memanas membutuhkan diplomasi yang ulet karena dunia hampir terbelah pada dua pihak yang tajam. Melalui politik bebas aktif Indonesia tampil sebagai kekuatan penentu dan BKSAP ikut mendukung melalui diplomasi parlemen.

Buku ini membahas bagaimana masa turbulensi itu diarungi BKSAP dengan melakukan banyak terobosan diplomasi. Buku disusun dengan penyajian dan gaya bahasa yang populer agar bisa menjangkau banyak kalangan.



**Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia
2024**

ISAN